

**STUDI PENINGKATAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN
KEJURUAN UNTUK Mendukung Potensi Lokal
Perikanan di Kecamatan
Pangkalbalam dan Bukit Intan**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:
HERIAL
L4D007099



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**STUDI PENINGKATAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN
KEJURUAN UNTUK MENDUKUNG POTENSI LOKAL
PERIKANAN DI KECAMATAN
PANGKALBALAM DAN BUKIT INTAN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**HERIAL
L4D007099**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 April 2009

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 30 April 2009
Tim Penguji:

Ir. Djoko Suwandono, M.SP - Pembimbing Utama
Ir. Fitri Yusman, M.SP - Pembimbing Pendamping
Wido Prananing Tyas, ST. M.DP - Penguji I
Dr. Ir. Moh. Zaenuri, DEA - Penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis di akui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila dalam tulisan ini ternyata ditemukan duplikasi/ jiplak (*plagiat*) di tesis yang lain/ institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepas gelar magister teknik dengan penuh rasa tanggungjawab

Semarang, 30 April 2009

HERIAL
NIM L4D007099

Ketika kita memiliki harta, kita selalu sibuk untuk menjaganya dan mungkin dapat membahayakan jiwa kita, demikian juga jika harta tersebut menjadi warisan utama dalam akhir hidup kita, tidak jarang menjadi petaka bagi anak-anak kita. Tetapi jika kita memiliki ilmu, niscaya ilmu itu akan melindungi kita dan jika kita mewariskan ilmu itu kepada anak-anak kita maka mereka tidak akan berebut dengan warisan tersebut

Harta yang kita miliki akan berkurang terutama kualitasnya jika kita gunakan terus menerus, tetapi tidak dengan ilmu, ia akan menjadi bertambah jika kita ajarkan kepada orang lain

*Tesis ini kupersembahkan untuk:
para akademisi dan pihak terkait untuk melihatnya secara proporsional dan profesional*

ABSTRAK

Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam merupakan dua kecamatan di kota Pangkalpinang yang mempunyai keunggulan lokal sub sektor perikanan yang menonjol, tetapi hasilnya belum maksimal. Keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan di kecamatan Bukit Intan sebenarnya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang perikanan, SMK ini kurang diminati oleh siswa-siswa tamatan SMP/ MTs di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Fungsi SMK Negeri 4 Perikanan diharapkan dapat mencetak SDM yang handal merupakan masalah tersendiri bagi perkembangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di kedua kecamatan ini.

Oleh Peneliti, permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan “Bagaimana meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan”. Penelitian ini akan menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam.

Sasaran-sasaran yang akan diteliti, antara lain keadaan wilayah dan potensinya, kebijakan yang menyangkut pendidikan kejuruan dan bidang sub sektor perikanan, keadaan SDM, kebutuhan masyarakat akan pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal, dan peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan. Alat analisis yang digunakan untuk sasaran tersebut adalah analisis kualitatif, kecuali untuk menentukan tingkat kebutuhan pendidikan kejuruan dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis SWOT untuk sasaran peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan.

Temuan dari hasil analisis tiap sasaran-sasaran dalam penelitian ini menunjukkan tingginya potensi lokal perikanan di kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dan keberadaan SMK Negeri 4 sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut dengan harapan lulusannya dapat meningkatkan nilai keekonomian dari potensi yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan sangat dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan di dua kecamatan tersebut.

Dari hasil penelitian ini penulis merekomendasikan kepada pihak pemerintah selaku pensuplai kebijakan dalam bidang pendidikan dan perikanan untuk meningkatkan semua usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk saran studi agar dapat melanjutkan penelitian ini agar menjadi lebih berguna.

Kata Kunci: Potensi lokal, Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan kebijakan Pendidikan Kejuruan serta motivasi masyarakat dan dunia usaha terhadap pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal.

ABSTRACT

Bukit Intan district and Pangkalbalam district are the two districts in the city Pangkalpinang who have the benefits of a local fishery sub-sectors of prominent, but the results have not been up to. The existence of SMK Negeri 4 Fisheries in the district of Bukit Intan was expected to produce graduates who have competence in the field of fisheries. SMK Section of this less attractive students graduate Junior High School in the district of Bukit Intan and Pangkalbalam more of the other districts in the city Pangkalpinang. Function SMK Negeri 4 Fisheries is expected to print is a powerful human resources issues for the development of the management of Natural Resources in the second district this

By Researcher, cause problems on the question "the needs to improve vocational education-based potential for the local fishing communities and fisheries in the business district Bukit Intan and Pangkalbalam". This research will to analyze the level of secondary vocational education needs that are required by society and business actors in the field of fisheries in the district of Bukit Intan and Pangkalbalam.

Relation between the local potential and vocational education is limited to the goals that will be examined, the region and its potential, the policy regarding the field of vocational education and fishery sub-sectors, the level of human resources and community needs based vocational education and increasing the potential for local vocational education needs. The tool analyzes the most appropriate target for the qualitative analysis, but needs to determine the level of vocational education will be conducted with the quantitative approach to analysis and SWOT analysis to target the needs of vocational education increased

The findings from the analysis results of each goals in this research show the strong potential for local fishery in the district Bukit Intan and Pangkalbalam and existence of SMK Negeri 4 people is needed in the area in the hope that graduates can increase the value of the potential of the economy so that there can be concluded that vocational education based fishery potential local community is needed and the business areas of the fishery in the two districts. From the results of this research the author recommends to the government as suppliers policies in education and improve the fishery for all business related to it, and suggestions for study in order to continue this research in order to become more useful.

Keywords: Potential local, Human Resources, Planning and Vocational Education policy and the motivation and the business community against the potential for vocational education based on local

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah secara sadar yang mendalam dan dengan rasa rendah hati serta segala puji kehadiran Allah SWT penulis merasakan kebesaran sang Khaliq yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga terselesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Magister Pembangunan Wilayah dan Kota di UNDIP Semarang.

Selama proses penyelesaian penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan sehingga segala sesuatu menjadi mudah dan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

- **Menteri Pendidikan Nasional Indonesia**, yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui program beasiswa unggulan hingga penyelesaian tugas akhir tesis berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal Depdiknas tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.
- **Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.**; Ketua Program Studi MTPWK Universitas Diponegoro.
- **Bapak Ir. Djoko Suwandono, M.SP**, Pembimbing utama yang tentunya telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini layak untuk di publikasikan.
- **Bapak Ir. Fitri Yusman, M.SP**, Pembimbing pendamping yang sangat sabar dan teliti dalam membimbing penulis menyelesaikan dan menyempurnakan sehingga tesis ini selesai.
- **Ibu Wido Prananing Tyas, ST. MDP**, Dosen penguji dan pembahas 1 yang telah mengkritik secara positif dan memberikan saran dalam penyempurnaan penyusunan baik dalam hal isi maupun dalam hal teknis penulisan tesis ini sehingga layak dikatakan lulus secara ilmiah dan proporsional.
- **Bapak Dr. Ir. Moh. Zaenuri, DEA**, Dosen penguji 2 yang banyak memberikan masukan tentang perikanan, sehingga bagi penulis ini merupakan masukan yang sangat berarti untuk dimasukkan dalam saran untuk diteruskan kepada pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang.

- **Bapak/ Ibu Dosen pengajar S.2 MTPWK Diknas 2B** yang tidak dapat disebut satu persatu, telah memberikan dasar-dasar teori dan filosofi yang kuat dalam penyusunan tesis ini sehingga mempermudah penulis dalam penyusunannya.
- **Seluruh staf dan karyawan MTPWK;** mas Pri, mas Arief, mas Nur, mbak Linda, mbak Ratih, mbak Dian, mbak Dini, dan lainnya petugas perpustakaan, yang telah memperlancar semua proses baik dalam hal surat menyurat maupun dalam hal proses persidangan akhir tesis ini.
- **Semua teman-teman seperjuangan di kelas Diknas 2B angkatan 2007,** khususnya sahabat setia se-kost seperti **M. Munawir, A. Ridwan, Irfan Jauhari, dan Dedek,** yang telah banyak memberikan inspirasi, saran, meminjamkan literatur dan lain-lain sampai dengan menghibur di kala duka dan suntuk dalam proses penyusunan tesis ini.
- **Teristimewa ucapan terima kasih ini, kepada istri tercinta Hj. Etty Helastri** yang telah bersedia mendampingi, hadir di saat-saat sidang akhir tesis ini **dan kepada anak-anak tersayang Uswatun Hasanah, Habibatun Rahmah, dan Muhtadin Sholihin** yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga penulis merasakan kekuatan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sadar dan yakin bahwa apa yang penulis hadirkan dalam tesis ini jauh dari sempurna bagi yang mereka yang ahli dalam bidang ini, sehingga setiap masukan yang berniat memperbaikinya, dengan rendah hati penulis siap menerimanya sehingga kekurangan dalam penulisan ini dapat di minimalisir.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang berkepentingan dalam penelitian pendidikan dan kewilayahan.

Semarang, 30 April 2009
Penulis,

Herial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Sasaran Penelitian	10
1.3.3 Manfaat Penelitian	11
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.4.1 Ruang Lingkup Spasial	12
1.4.2 Ruang Lingkup Substansial	15
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Pendekatan Studi	17
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Kebutuhan Data	19
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7.3 Teknik Penetapan Sampling	24
1.7.4 Kerangka Analisis	27
1.7.5 Teknik Analisis	28
1.7.5.1 Potensi Wilayah dan Potensi Lokal	30
1.7.5.2 Kebijakan Pemerintah Daerah	30
1.7.5.3 Sumber Daya Manusia	31
1.7.5.4 Kebutuhan Stakeholder Terhadap Pendidik an Berbasis Potensi Lokal	32

1.7.5.5 Strategi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan an SMK Kejuruan.....	33
1.8 Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II KAJIAN TEORI	36
2.1 Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah	36
2.2 Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan	38
2.3 Perencanaan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Kejuruan	41
2.3.1 Pendekatan Perencanaan Pendidikan	42
2.3.2 Relevansi Pendidikan	50
2.3.3 Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat	51
2.3.4 Program Pengembangan SMK	51
2.3.4.1 Standar Pelayanan Minimal SMK	52
2.3.4.2 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal	54
2.3.4.3 Pendidikan Sistim Ganda	56
2.3.4.4. Life Skill	58
2.3.5 Pendekatan Sistim	58
2.3.6 Kepemimpinan Kependidikan	60
2.4 Pengertian Wilayah Pesisir	60
2.4.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir	62
2.4.2 Potensi Ekonomi Wilayah	63
2.4.3 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal	64
2.5 Pemodelan Sumber Daya	65
2.5.1 Pengertian Pemodelan	65
2.6 Interaksi Sistim Kegiatan Dengan Sistim Jaringan	66
2.6.1 Aksesibilitas dan Mobilitas	67
2.6.2 Jaringan Jalan	67
2.6.3 Sistim Transportasi Kota	69
2.7 Motivasi dan Motif	71
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI	80
3.1 Kondisi Umum Wilayah Studi	80
3.2 Aspek Kependudukan	84
3.3 Aspek Ekonomi	87
3.4 Aspek Kependidikan	92
3.5 Aspek Potensi Lokal	96

BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN	
KEJURUAN	101
4.1 Analisis Identifikasi Wilayah, Potensi Lokal dan SDM	101
4.1.1 Kecamatan Bukit Intan	101
4.1.2 Kecamatan Pangkalbalam	106
4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia	116
4.2 Analisis Keadaan Pendidikan dan Kebijakannya	122
4.2.1 Tenaga Kerja Tamatan SMA/SMK	123
4.2.2 Keadaan SDM di SMK Negeri 4	124
4.2.3 APK dan APM	127
4.2.4 Fasilitas Penunjang Pembelajaran	129
4.2.5 Program Pengembangan Kurikulum SMK	130
4.2.6 Pembiayaan Pendidikan	133
4.2.7 Lokasi SMK Negeri 4 Perikanan	135
4.2.8 Kerja Sama SMK N.4 Dengan DUDI	138
4.2.9 Keadaan Lulusan SMK N.4	139
4.3 Analisis Kebijakan Dalam Bidang Perikanan dan Keadaan SDM-nya	140
4.3.1 Indikasi Potensi Lokal Perikanan	140
4.3.2 Sarana dan Prasarana Perikanan	146
4.3.3 Sumber Daya Manusia; Keadaan Nelayan	148
4.4. Analisis Kebutuhan Stake Holder Terhadap Pendidikan Kejuruan	151
4.4.1 Keadaan Responden Secara umum	151
4.4.2 Pendidikan Pekerjaan dan Penghasilan Responden	152
4.4.3 Katagori Biaya Pendidikan	157
4.4.4 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, lokasi dan jarak sekolah	158
4.4.5 Minat Untuk Bersekolah di SMK N.4	160
4.4.6 Biaya Kurikulum dan Kebijakan SMK Perikanan	163
4.4.7 Motivasi Masyarakat Akan Pendidikan	167
4.5 Analisis Strategi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan	176
4.6 Sintesa Hasil Studi	186

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	193
5.1 Kesimpulan	193
5.2 Rekomendasi	195
5.2.1 Saran Pelaksana	195
5.2.2 Saran Studi	199
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN-LAMPIRAN	206

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data, Sasaran dan Variabel Terhadap Hasil Yang Diharapkan	20
TABEL I.2	: Sasaran Kebutuhan Sampel Penelitian	27
TABEL II.1	: Rangkuman Kajian Teori	76
TABEL III.1	: Penggunaan Lahan Kota Pangkalpinang	82
TABEL III.2	: Sebaran Penduduk Kota Pangkalpinang.....	86
TABEL III.3	: Kondisi Penduduk Kota Pangkalpinang Berdasarkan Usia	87
TABEL III.4	: Komposisi Penduduk Kota Pangkalpinang Berdasarkan Mata Pencarian	89
TABEL III.5	: Distribusi Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Pangkalpinang	91
TABEL III.6	: Jumlah Sekolah di kota Pangkalpinang	93
TABEL III.7	: Kondisi SMK di Kota Pangkalpinang	95
TABEL III.8	: Data APK Kota Pangkalpinang Tahun 2006	95
TABEL III.9	: Kondisi Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	96
TABEL III.10	: Kondisi Fasilitas di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	97
TABEL III.11	: Jumlah Armada dan Nelayan di Di Keca Matan Bukit Intan dan Pangkalbalam	98
TABEL III.12	: Perkembangan Produksi Ikan Dalam 3 Tahun	99
TABEL IV.1	: Pekerjaan Penduduk, Pelajat dan Nelayan di Kecamatan. Bukit Intan	103
TABEL IV.2	: Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Sarana Penangkapan ikan	105
TABEL IV.3	: Keadaann Penduduk U 16-18 th di Kecamatan Bukit Intan	106
TABEL IV.4	: Kondisi Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Pangkalbalam	109
TABEL IV.5	: Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Penangkapan Ikan di Kecamatan Pangkalbalam	110

TABEL IV.6	: Keadaan Penduduk U 16-18 Th di Kecamatan Pangkalbalam	112
TABEL IV.7	: Statistik Potensi Wilayah dan SDM	113
TABEL IV.8	: Tanggapan Responden thd Fasilitas Perikanan	114
TABEL IV.9	: Pendapat Responden Terhadap Kemudahan Akses	116
TABEL IV.10	: Pendapat Responden Tentang Konsumsi Ikan	117
TABEL IV.11	: Pendapat Responden Pengaruh SDM & Kualitasn Terhadap SDA	119
TABEL IV.12	: Pendapat Responden SMK N.4 Dapat Meningkatkan	120
TABEL IV.13	: SMK N.4 Mutlak di Perlukan	121
TABEL IV.14	: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Ketrampilan Pengusaha Perikanan Terhadap Produksinya	122
TABEL IV.15	: Keadaan Kualifikasi Guru di SMK N.4	127
TABEL IV.16	: Data Kelulusan Siswa SMK N.4	128
TABEL IV.17	: Angka APK dan APM SMA/SMK	130
TABEL IV.18	: Angka Melanjutkan ke SMK/SMA	131
TABEL IV.19	: Data Persentase Kegiatan PSG SMK	134
TABEL IV.20	: Keadaan Pekerjaan Orang Tua Siswa SMK Negeri 4	137
TABEL IV.21	: Perhitungan indeks LQ	145
TABEL IV.22	: Jumlah Armada dan Nelayan di dua kecamatan	150
TABEL IV.23	: Jenis Kelamin Responden	153
TABEL IV.24	: Usia Responden	154
TABEL IV.25	: Keadaan Pekerjaan Responden	155
TABEL IV.26	: Keadaan Pendapatan Responden	156
TABEL IV.27	: Keadaan Statistik Crostab Penghasilan & Pekerjaan	158
TABEL IV.28	: Keadaan Biaya Pendidikan Responden	160
TABEL IV.29	: Pendapat Responden Tentang Lokasi dan Jarak	162
TABEL IV.30	: Statistik Pernyataan Responden Terhadap Fasilitas Pendidikan	164
TABEL IV.31	: Pendapat Responden Tentang Biaya Pendidikan SMK N.4	166

TABEL IV.32	: Pendapat Responden Tentang Pengaruh Tidak Adanya Angkot Ke SMK N.4	168
TABEL IV.33	: Pendapat Responden Terhadap Pendi didikan SMA/SMK	170
TABEL IV.34	: Pendapat Responden Pentingnya Ketrampilan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup	172
TABEL IV.35	: Pendapat Responden Tentang SMK N.4 Berkembang	174
TABEL IV.36	: Statistik Crostab Motivasi Life Skill	174
TABEL IV.37	: Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK N.4	175
TABEL IV.38	: Motivasi Untuk Meningkatkan Fasilitas	176
TABEL IV.39	: Perluasan Akses SMK N.4	177
TABEL IV.40	: Pendapat Responden Terhadap PSG	178
TABEL IV.41	: Faktor Internal <i>Strenght</i> Terpilih	183
TABEL IV.42	: Faktor Internal <i>Weakness</i> Terpilih	183
TABEL IV.43	: Faktor Eksternal <i>Opportunity</i>	184
TABEL IV.44	: Faktor Eksternal <i>Threats</i>	184
TABEL IV.45	: Strategi S1-T1	185
TABEL IV.46	: Strategi S1-T2	185
TABEL IV.47	: Strategi S2-T1	186
TABEL IV.48	: Strategi S2-T2	186
TABEL IV.49	: Model Strategi Analisis SWOT	187
TABEL IV.50	: Sintesa Analisis Hasil Studi	189

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Administrasi Kota Pangkalpinang .	14
GAMBAR 1.2	: Kerangka Pemikiran	17
GAMBAR 1.3	: Diagram Proses Analisis	29
GAMBAR 2.1	: Perencanaan Pendidikan Dengan Pendekatan Sosial	45
GAMBAR 2.2	: Perencanaan Pendidikan Dengan Pendekatan Ketenagakerjaan	46
GAMBAR 2.3	: Bentuk Umum Sistem	60
GAMBAR 2.4	: Garis Pantai	62
GAMBAR 2.5	: Intersepsi Dunia Model Dengan Dunia Nyata	66
GAMBAR 2.6	: Transformasi Kualitatif dan Kuantitatif	67
GAMBAR 2.7	: Hirarki Jalan Berdasarkan Peran	70
GAMBAR 2.8	: Sistem Transpormasi Makro	71
GAMBAR 2.9	: Model Teori Isi dari Motivasi Stoner	72
GAMBAR 2.10	: Proses Motivasi Model Chung.....	74
GAMBAR 2.11	: Diagram Hirarki Kebutuhan Maslow.....	75
GAMBAR 3.1	: Posisi Kota Pangkalpinang Dalam Wilayah Provpinsi Kep. Bangka Belitung	83
GAMBAR 3.2	: Peta Sebaran Sentra Produksi	84
GAMBAR 3.3	: Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang	85
GAMBAR 3.4	: Keadaan Penduduk Kota Pangkalpinang	86
GAMBAR 3.5	: Peta Kecamatan Pangkalbalam	100
GAMBAR 3.6	: Peta Kecamatan Bukit Intan	101
GAMBAR 4.1	: Tanggapan Responden terhadap Potensi Perikanan	114
GAMBAR 4.2	: Pendapat Responden Tentang Kemudahan Akses	116
GAMBAR 4.3	: Diagram Pie Keadaan SDM Nelayan dan <i>Home</i> Industri	123
GAMBAR 4.4	: Grafik Pendapat Responden terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun Yang Tidak Bersekolah	124
GAMBAR 4.5	: Data Pencari Kerja tahun 2007	125

GAMBAR 4.6 : Sumber Pembiayaan SMK N.4	136
GAMBAR 4.7 : Posisi SMK Negeri 4	137
GAMBAR 4.8 : Keadaan Asal Usul Siswa SMK N.4	139
GAMBAR 4.9 : Keadaan Lulusan SMK N.4	141
GAMBAR 4.10 : Persiapan Es Balok Untuk Nelayan Melaut	147
GAMBAR 4.11 : Gedung LPPMHP di PPI Ketapang	148
GAMBAR 4.12 : Pendidikan Nelayan di Kota Pangkal Pinang	152
GAMBAR 4.13 : Keadaan Pendidikan Responden	155
GAMBAR 4.14 : Pendapat Responden Tentang Kurikulum	167
GAMBAR 4.15 : Pendapat Responden Tentang Kebijakan SMK Negeri 4	167
GAMBAR 4.16 : Keberadaan SMK N.4 Dapat Menaikkan Motivasi Untuk Mening katkan Taraf Hidup	172

DAFTAR LAMPIRAN

TABEL 1	: Sebaran Industri Ikan Laut olahan di Kecamatan Bukit Intan	209
TABEL 2	: Jumlah Karyawan Umum dan Karyawan Tamatan SMK Negeri 4 di Kec. Bukit Intan	209
TABEL 3	: Sebaran Industri Ikan Olahan di Kecamatan Pangkalbalam	210
TABEL 4	: Jumlah Karyawan Umum dan Karyawan Tamatan SMK Negeri 4 di Kecamatan Pangkalbalam	210
TABEL 5	: Pendapat Responden Terhadap Rendahnya Ketrampilan Nelayan di 2 Kecamatan Wilayah Studi	211
TABEL 6	: Angka Indikator Pendidikan	211
TABEL 7	: Keadaan Fasilitas Belajar di SMK N.4	212
TABEL 8	: Distribusi PDRG Berdasarkan Lap. Usaha	212
TABEL 9	: Distribusi Kegiatan Perekonomian Kota Pangkalpinang	213
TABEL 10	: Keadaan Statistik Sosial Responden	214
TABEL 11	: Keadaan Statistik Crostab Pendidikan	215
TABEL 12	: Katagori Biaya Pendidikan dan Pekerjaan ...	216
TABEL 13	: Statistik Minat Untuk Bersekolah di SMK Negeri 4	214
TABEL 14	: Usia 16-18 Tahun Anak Responden	217
TABEL 15	: Keadaan Anak Responden yang Bersekolah di SMK N4 15	218
TABEL 16	: Alternatif Sekolah Selain SMK N.4 Dari SMK Negeri 4	218
TABEL 17	: Pendapat Responden Setelah Lulus dari SMK Negeri 4	219
TABEL 18	: Alasan Responden Tidak Memilih SMK N.4	219
TABEL 19	: Alasan Memilih SMK N.4	220

GAMBAR 1	: Grafik Alamat Responden	221
GAMBAR 2	: Program Kegiatan Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing	221
GAMBAR 3	: Pendapat Responden Tentang SMK N.4	222
GAMBAR 4.	: Akses Menuju SMK N.4	222
GAMBAR 5	: Respon \Untuk Menutup SMK N.4	223
GAMBAR 6	: Suasana Belajar di Ruang Kelas SMK N.4 ..	223
GAMBAR 7	: Tampak Muka SMK N.4	224
GAMBAR 8	: Salah Satu Fasilitas Penunjang Pembelajaran	224
GAMBAR 9	: Ruang Praktek	225
GAMBAR 10	: Kegiatan Siswa Praktek THP	225
GAMBAR 11	: Dokumentasi Praktek Siswa THP	226
GAMBAR 12	:Sentra Pemasaran Produksi Hasil Pengolahan Ikan	227
GAMBAR 13	: Penulis Mengunjungi Salah Satu Kios Makanan	227
GAMBAR 14	: Para Nelayan Yang Siap Melaut	228
GAMBAR 15	: Salah Satu Fasilitas di PPI/TPI Ketapang	228

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pangkalpinang yang luas wilayahnya hanya 118,408 km² (berdasarkan PP nomor 79 tahun 2007) merupakan ibu Kota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyusunan RPJP-D Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026 bahwa pendapatan sektoral perekonomian Kota Pangkalpinang sektor produksi perikanan dan hasil-hasilnya mempunyai proporsi ke-5 yaitu sebesar 9,79% setelah sektor pemerintah umum dan pertahanan (18,59%), sektor angkutan jalan raya (13,97%), sektor bangunan (11, 92%), dan sektor perdagangan (10,90%) dari 20 sektor yang diperhitungkan.

Selain itu dalam RPJP-D tersebut sektor perikanan dan hasil-hasilnya berada pada urutan prioritas ke-2 setelah sektor perdagangan dalam perhitungan sektor unggulan Kota Pangkalpinang tahun 2006. Masih menurut data dalam RPJP-D Kota Pangkalpinang, lapangan usaha sektor pertanian yang mempunyai 4 sub sektor; sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, serta sub sektor perikanan, ternyata sub sektor

perikanan mempunyai nilai distribusi kegiatan perekonomian terbesar dengan rata-rata selama periode 2002-2006 sebesar 16,76%.

Berdasarkan data-data di atas maka sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan dan hasil-hasilnya merupakan sub sektor unggulan yang memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian Kota Pangkalpinang. Daerah pesisir yang panjang dimana terdapat 1 buah pelabuhan yang sangat strategis yang merupakan tempat utama keluar masuknya barang dan jasa dari Kota Pangkalpinang dan ke luar Kota Pangkalpinang, bahkan merupakan pintu utama ke dan dari pulau Bangka. Pelabuhan ini terletak di Kecamatan Pangkalbalam, yang disebut Pelabuhan Pangkalbalam. Masyarakat pesisir yang ada di Pangkalpinang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, perdagangan hasil perikanan, pengolah ikan, pengusaha jasa perikanan, pengelola wisata bahari, serta pengusaha penunjang lainnya yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil (Pedoman PEMP 2007) yang menempati dua kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalbalam yang luasnya 36,56 km² dan Kecamatan Bukit Intan yang luasnya 36,54 km².

Sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan dan potensi lokal yang salah satunya adalah pusat pemasaran ikan dan pengolahan hasil perikanan, maka potensi laut yang dikembangkan sesuai dengan kehidupan penduduk pesisir adalah mata pencaharian perikanan tangkap. Menurut Dwipo Negoro dalam Data Base Perikanan Tangkap, 2007 perairan laut Cina Selatan yang luasnya 250.000 km² yang merupakan batas timur

wilayah administrasi Kota Pangkalpinang ditaksir mempunyai potensi lestari MSY (*Maksimum Sustainable Yield*) sebesar 376.000 ton ikan/ tahun dengan rincian 213.000 ton/ tahun ikan demersal (ikan yang hidup jauh di bawah permukaan laut/ di laut dalam) dan 163.000 ton/ tahun ikan pelagis (ikan yang hidup di daerah permukaan laut) dimana 60% dari potensi tersebut atau setara dengan 225.600 ton ikan/ tahun masuk pada wilayah perairan Kota Pangkalpinang. Pemanfaatan potensi baru sekitar 48% setiap tahunnya atau sekitar 108.288 ton ikan/ tahun.

Berdasarkan renstra Kota Pangkalpinang 2004-2008, telah ditetapkan potensi perikanan yang cukup besar di Kota Pangkalpinang yang memungkinkan untuk dikembangkan sektor perikanan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berbagai produk turunan dari perikanan ikan laut seperti makanan olahan yang selama ini menjadi salah satu komoditas penting yang dihasilkan dari pulau Bangka. Dampak dari pengolahan hasil perikanan ini adalah berkembangnya industri yaitu jenis industri pengolahan. Kegiatan industri ini menempati kawasan seluas 1,440 Ha yang berada di dekat kawasan Pelabuhan Pangkalpinang. Dari lima kecamatan yang ada di Pangkalpinang sampai tahun 2005 kapasitas produksi ikan olahan hasil laut yang berupa kretek, getas, kerupuk, kemplang, dan kricu adalah 400 ton setiap tahun.

Visi Kota Pangkalpinang adalah "Terwujudnya Pangkalpinang sebagai kota perdagangan regional, jasa, dan industri yang berdaya saing di tahun 2014. Sebagai ibu Kota provinsi, Kota Pangkalpinang mempunyai peran, tidak hanya

sebagai pusat kegiatan lokal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan wilayah. Peran ini harus diantisipasi dan disiapkan secara matang oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan mengandalkan segenap potensi yang dimilikinya. Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah “Memacu perkembangan sektor perdagangan jasa dan industri yang berbasis lokal dan menciptakan sumber daya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Pangkalpinang”. Sebagai Kota yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Pangkalpinang harus menciptakan peluang-peluang usaha dalam bidang perikanan agar dapat berkembang, yaitu melalui sektor perdagangan, jasa dan, industri pengolahan perikanan laut. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perairan laut karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan ketrampilan, serta faktor eksternal keterbatasan pelayanan dan fasilitas oleh pemerintah (Rahardjo Adisasmita, 2006).

Untuk dapat mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota perdagangan, jasa dan industri, dan khususnya untuk sub sektor perikanan dan industri pengolahan hasil tangkapan, maka sangat perlu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai tenaga terampil dan profesional dalam bidang perikanan ini, misalnya melalui pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal.

Di Kota Pangkalpinang saat ini memiliki pendidikan menengah kejuruan dalam 4 bidang keahlian, yaitu (1) jurusan

Teknologi dan Industri, (2) jurusan Bisnis dan Manajemen, (3) jurusan Pariwisata, serta (4) jurusan Perikanan dan Kelautan. Ke-4 bidang keahlian ini tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang.

Untuk bidang keahlian Perikanan dan Kelautan dibangun di kawasan yang mempunyai potensi lokal dalam bidang perikanan yaitu di perbatasan Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam. Di dalam perkembangan berdirinya pendidikan kejuruan dengan bidang keahlian Teknologi dan Industri yang paling diminati oleh siswa lulusan SMP/ MTs, tidak begitu halnya dengan SMK dengan bidang keahlian Perikanan dan kelautan, yaitu SMK Negeri 4 Perikanan yang berada di Kecamatan Bukit Intan. Sejak tahun berdirinya pada tahun pelajaran 2002-2003 jumlah siswanya tidak melebihi dari 55% dari kapasitas yang tersedia.

Dalam tahun 2006, dari jumlah penduduk 33.656 jiwa yang ada di Kecamatan Pangkalbalam jumlah siswa Sekolah Menengah adalah 2.597 jiwa dengan angka partisipasi kasar (APK) 78,05%, artinya masih ada 21,95% penduduk usia 15-18 tahun yang tidak bersekolah SMA atau SMK yang ada di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk Kecamatan Bukit Intan dengan jumlah penduduk 39.506 jiwa terdapat jumlah siswa sekolah menengah adalah 2.616 jiwa dengan angka partisipasi kasar (APK) 92,16%, artinya masih ada 7.84% penduduk usia 15-18 tahun tidak bersekolah menengah di Kecamatan Bukit Intan. Data di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan Sekolah

Menengah, khususnya SMK yang ada di Kecamatan Bukit Intan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Idealnya, selain melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang optimal juga sangat dibutuhkan arah pembangunan pendidikan yang diarahkan pada seberapa besar potensi lokal yang ada di Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Pangkalbalam.

Misi Kota Pangkalpinang adalah ”Memacu perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berbasis lokal dan menciptakan sumber daya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang”. Dalam menjalankan misi di atas, maka salah satu isu strategis yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang harus diemban oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang adalah mengembangkan pendidikan secara optimal di semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik serta penguatan kelembagaan pendidikan secara sistematis. Untuk itulah pendekatan perencanaan pendidikan yang dilakukan di Kota Pangkalpinang dapat melalui pendekatan kebutuhan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan (Husaini Usman, 2006). Hal ini berarti lulusan SMK, khususnya SMK perikanan harus dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan, khususnya bidang perikanan. Selain itu dari segi pendekatan sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pelaku usaha dalam bidang perikanan ini dapat meningkat.

Melihat salah satu potensi lokal yang ada di Kota Pangkalpinang pengembangan pendidikan SMK di Kota Pangkalpinang dapat diarahkan pada peningkatan kompetensi lulusan dalam bidang perikanan, misalnya peningkatan kompetensi penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapannya. Satu-satunya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membuka jurusan perikanan adalah SMK Negeri 4 Perikanan. SMK Negeri 4 ini didirikan pada tahun pelajaran 2002-2003 dengan dua jurusan yaitu (1) Neutika Perikanan Luat (NPL) yang tujuan kurikulumnya adalah tersedianya tenaga terampil dalam bidang teknik penangkapan ikan dan (2) Teknik Pengelolaan Hasil Tangkapan (THP) dimana tujuan kurikulumnya adalah terciptanya tenaga terampil yang mampu mengolah hasil tangkapan ikan dan sejenisnya sebagai bagian dari bidang industri perikanan.

Dalam perkembangannya, SMK Negeri 4 Perikanan yang ada saat ini selalu mengalami kekurangan jumlah siswa dalam setiap tahun pelajaran. Pada tahun pelajaran 2006-2007 jumlah daya tampung SMK ini adalah 288 siswa, sedangkan siswa yang ada hanya 147 siswa atau sekitar 51% dari kapasitas yang tersedia. Demikian juga dengan 2 tahun sebelumnya hanya terisi tidak lebih dari 55% dari kapasitas yang ada. Fenomena di atas memperlihatkan keberadaan SMK perikanan ini belum mampu menjadi sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam bidang perikanan yang menjadi sektor unggulan pembangunan Kota Pangkalpinang, khususnya Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan.

Masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha dalam bidang perikanan ini yang berada di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan sebenarnya dapat memaksimalkan keberadaan lembaga pendidikan SMK perikanan ini, namun apa yang terjadi saat ini bagi mereka keberadaan pendidikan kejuruan belum mampu memberikan kontribusi positif yang besar.

1.2. Rumusan Masalah

Gambaran keadaan di atas, bahwa Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam merupakan kawasan potensial dalam sub sektor perikanan dimana sebagian penduduknya bermatapencarian sebagai nelayan. Adanya dukungan sarana dan prasarana perikanan yang tersedia di dua kecamatan ini seharusnya terjadi optimalisasi terhadap produk perikanan dan hasil olahannya, sehingga kehidupan para nelayan ini akan menjadi lebih baik dan sejahtera. Untuk memberikan nilai tambah bagi para nelayan ini maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang perikanan. Tentunya hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan. SDM yang terampil dan terlatih tentunya dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bernilai dan memberikan hasil maksimum bagi pembangunan ekonomi di dua kecamatan tersebut dan sudah dapat dipastikan kesejahteraan para nelayan ini dapat meningkat.

Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah membangun satu lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berbasis potensi lokal di kedua kecamatan

tersebut, yaitu SMK Negeri 4 Perikanan yang berlokasi di Kecamatan Bukit Intan yang berada di perbatasan Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Keberadaan sejumlah SMP di dua kecamatan ini yaitu sebanyak 8 unit menjadi alasan utama untuk program kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah khususnya pendidikan menengah kejuruan.

Secara realistis, keberadaan guru, tersedianya sarana penunjang dan kurikulum yang digunakan belum mampu menaikkan motivasi masyarakat di dua kecamatan tersebut untuk memanfaatkan pendidikan kejuruan yang ada ini, padahal lembaga SMK Perikanan ini diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat diterima pada lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pengolahan hasil perikanan serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi siswa lulusan tersebut.

Rendahnya nilai APK dan kapasitas siswa yang tertampung menjadi indikator yang dapat dijadikan acuan kurang berhasilnya SMK tersebut menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang perikanan. Pertanyaan penelitiannya (*research quation*) ”Bagaimana meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan”

1.3.Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang telah di gambarkan di atas maka sasaran penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis wilayah dan potensi lokal Kota Pangkalpinang, Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam
2. Menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bidang sosial terutama dalam bidang sub. bidang pendidikan dan sub. sektor perikanan di Kota Pangkalpinang
3. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pelaku dan pengguna hasil pembangunan yaitu pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik potensi lokal di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan masyarakat (terutama masyarakat nelayan dan pelaku usaha dan dunia industri dalam bidang perikanan) terhadap pendidikan yang berbasis

potensi lokal di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan

5. Menganalisis strategi peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan melalui faktor eksternal dan internal di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan

1.3.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adanya peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan sehingga SMK Negeri 4 Perikanan yang telah ada dapat maksimalkan keberadaannya bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan.

Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang manfaat penelitian ini adalah dapat merumuskan perencanaan wilayah dan pengembangan sektor unggulan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Sedangkan bagi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan wacana untuk merekomendasi lokasi yang sesuai untuk membangun sebuah sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi lokal di daerah tersebut.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup substansial

1.4.1. Ruang Lingkup Spasial

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah

1. Kecamatan Pangkalbalam dengan luas wilayah 36,56 km² yang terdiri dari 1 desa dan 9 kelurahan:
 - a. Desa Selindung
 - b. Kelurahan Selindung
 - c. Kelurahan lontong pancur
 - d. Kelurahan Ketapang
 - e. Kelurahan Ampui
 - f. Kelurahan Air Salemba
 - g. Kelurahan Rejosari
 - h. Kelurahan Gabek I
 - i. Kelurahan Gabek II
 - j. Kelurahan Pasir Garam

Jumlah penduduk di kecamatan ini pada tahun 2006 adalah 33.656 jiwa dengan kepadatan 946,19 jiwa dalam setiap km² dan merupakan daerah kedua terpadat setelah kecamatan Taman Sari, 11,61 jiwa dalam tiap km². Jumlah nelayannya 1.819 (Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang, 2007) merupakan jumlah nelayan terbesar dari 5 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang, yaitu 52,70%. Kecamatan ini merupakan pusat jasa pelabuhan regional, pusat distribusi regional, pusat pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perikanan dan sentra produksi lainnya yang berkaitan dengan perikanan. Jumlah industri rumah tangga dan industri sedang yang bergerak dalam

bidang pengelolaan hasil perikanan sebanyak 16 pengusaha yang merupakan jumlah terbesar pengusaha pengolahan hasil perikanan di Kota Pangkalpinang.

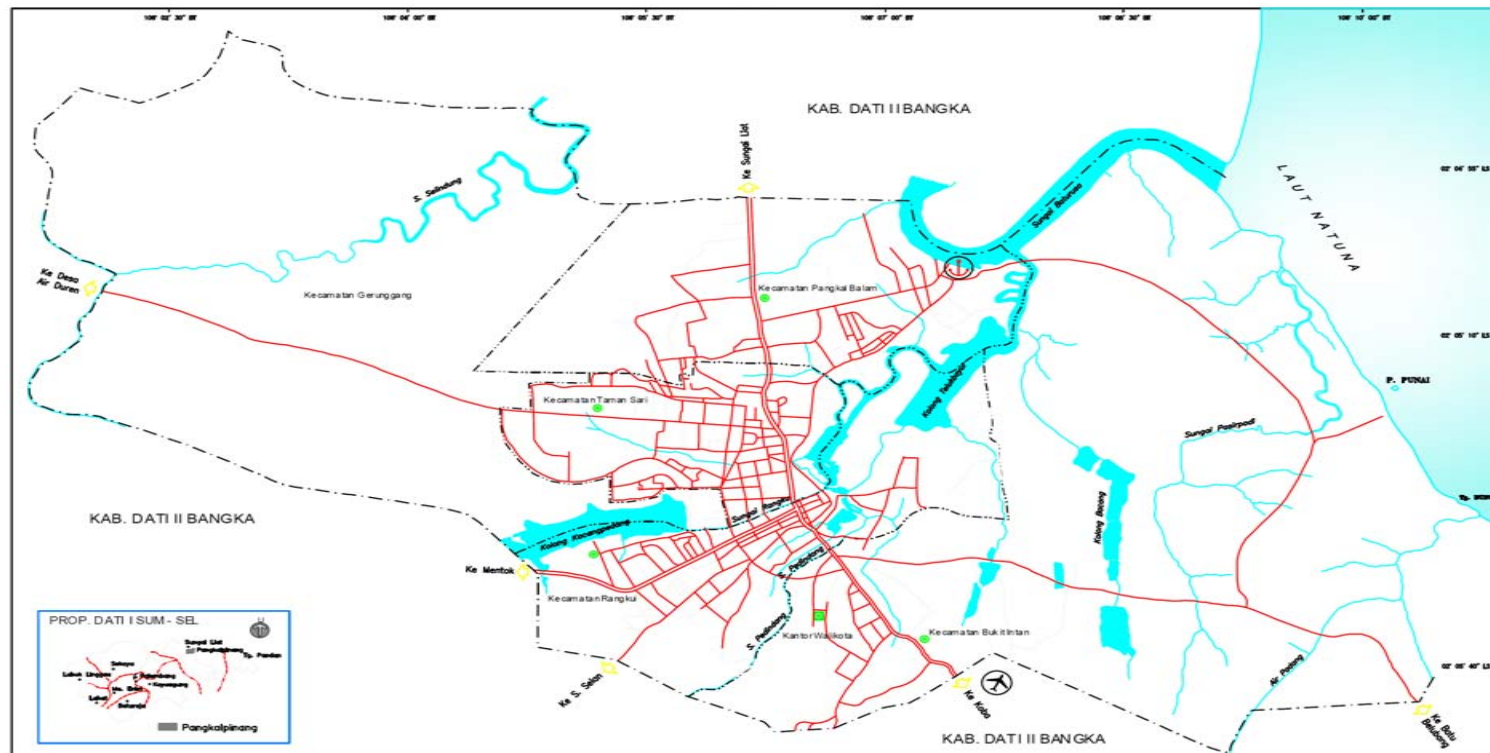
2. Kecamatan Bukit Intan dengan luas wilayah 36,54 km² yang terdiri dari 7 kelurahan:

- a. Kelurahan Semabung lama
- b. Kelurahan Semabung baru
- c. Kelurahan Bukit Intan
- d. Kelurahan Bukit Besar
- e. Kelurahan Sriwijaya
- f. Kelurahan Air Itam
- g. Kelurahan Bacang

Jumlah penduduk pada di kecamatan ini pada tahun 2006 adalah 39.506 jiwa dengan kepadatan 1.081,17 jiwa dalam setiap km² merupakan daerah keempat terpadat setelah Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Rangkui. Jumlah nelayan yang berada di kecamatan ini adalah 989 nelayan atau 28,66% urutan ke dua jumlah nelayan terbanyak di Kota Pangkalpinang (Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang, 2007). Untuk mendukung hasil para nelayan ini, di kecamatan ini terdapat 7 pengusaha yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil perikanan.

Selain itu juga, Kecamatan Bukit Intan merupakan pusat pemerintahan dan layanan publik lainnya, pusat pengembangan wisata pantai, dan industri kecil terutama yang berkaitan dengan hasil laut dan hutan. Satu-satunya sekolah menengah kejuruan

bidang perikanan yang ada di Kota Pangkalpinang berada di Kecamatan Bukit Intan yang dioperasikan pada tahun 2002



LEGENDA

- KANTOR WALIKOTA
- KANTOR CAMAT
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
- BATAS KOTA
- BATAS KECAMATAN
- KOLONG / DANAU
- SUNGAI
- ⊙ PELABUHAN UDARA DEPATI AMIR
- ⊙ PELABUHAN PANGKALBALAM



0 0.75 1.5 KM
Skala 1 : 15.000



GAMBAR 1.1
PETA ADMINISTRASI KOTA PANGKALPINANG

1.4.2. Ruang lingkup Substansial

Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka substansial ruang lingkupnya dibatasi pada sasaran-sasaran penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini menyangkut keterkaitan antara potensi wilayah dengan pendidikan yang akan dikembangkan di wilayah tersebut, maka penulis membatasi penelitian pada empat konsep utama, yaitu (1) Potensi lokal perikanan yang telah tersedia, (2) kualitas Sumber daya manusia, yaitu masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan, para pengusaha pengelolaan perikanan, dan para pelaku pembuat kebijakan dan pelaksana dalam perikanan (3) SMK Negeri 4 perikanan yang sudah ada, dan (4) kebijakan pemerintah daerah terkait dengan potensi lokal dan kebijakan pendidikan kejuruan di Kota Pangkalpinang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk pembangunan wilayah diperlukan potensi lokal dan sumber daya alam dari wilayah tersebut. Namun melimpahnya sumber daya alam di suatu wilayah tidak menjadikan masyarakat dan penduduknya sejahtera jika tidak diikuti dengan pengelolaan, dan eksploitasi dan memberikan nilai tambah bagi wilayahnya. Didirikannya SMK Negeri 4 Perikanan adalah sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan hasil dari potensi lokal dan SDA. Namun dalam perjalanannya dari didirikannya sejak tahun pelajaran 2002-2003 belum memberikan harapan yang positif bagi masyarakat dan penduduk Kecamatan

Pangkalbalam dan Bukit Intan, karena hingga kini keberadaan SMK tersebut belum dapat mengoptimalkan operasionalisasinya.

Dengan bantuan kajian literatur dan tujuan penelitian menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam, maka penelitian ini akan membatasi sasaran-sasarannya dalam penelitian, yaitu (1) sasaran-sasaran pada kondisi wilayah dan potensi lokalnya, (2) keadaan sumber daya manusianya yang berhubungan langsung dengan potensi lokal, (3) kebijakan daerah bidang pendidikan dan perikanan, (4) kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal dan (5) strategi peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan melalui faktor internal dan eksternal.

Kelima sasaran ini masing-masing akan dianalisis sesuai dengan peruntukannya. Untuk potensi wilayah, kebijakan dalam bidang pendidikan dan perikanan, serta sumber daya manusia akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan tingkat kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal bagi *stakeholder* akan dilakukan analisis kuantitatif. Untuk identifikasi strategi peningkatan kebutuhan pendidikan akan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Secara sederhana kerangka pemikiran ini dituangkan dalam GAMBAR 1.2 berikut:

[D:\TESIS-2\Kerangka Pemikiran versi b.5i.doc](#)

1.6 Pendekatan Studi

Penelitian ini penulis kelompokkan ke dalam penelitian deskriptif, karena metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian dalam bidang sosial dalam konteks kewilayahan, maka metode penelitiannya dititikberatkan pada metode penelitian kualitatif, walaupun ada bagian-bagian tertentu yang menggunakan metode kuantitatif. Kedua metode ini digunakan sesuai dengan sasaran penelitian. Penelitian terhadap wilayah dan potensinya, serta sumber daya manusia digunakan pendekatan kualitatif, begitu juga substansi penelitian yang menyangkut kebijakan dan perencanaan dalam bidang pendidikan dan perikanan yaitu melalui studi dokumen dan wawancara kepada pimpinan atau yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif ini juga dimungkinkan digunakan jika adanya keterbatasan data primer yang mungkin sangat diperlukan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti kebutuhan *stakeholder* akan pendidikan kejuruan di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Kuesioner disebarkan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Kebutuahn Data

Seperti umumnya penelitian, maka data yang penulis perlukan berupa data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari sumber atau responden, misalnya melalui wawancara langsung terhadap berbagai narasumber. Wawancara ini antara lain akan dilakukan terhadap:

- a. Camat di dua kecamatan, Bukit Intan, dan Pangkalbalam
- b. Pejabat di Dinas Perikanan, Perdagangan, dan Pendidikan, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- c. Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Perikanan

Untuk data primer yang lain, dilakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, nelayan dan atau pelaku usaha perikanan sebagai *stakeholdernya* yang dijadikan sampel di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam tersebut.

Untuk data skunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi, ini sebagian besar sudah dilakukan di dalam menunjang informasi dalam penulisan proposal tesis yang lalu. Data skunder ini antara lain didapatkan pada Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BAPPEDA, Badan Statistik, Internet, dan laporan-laporan resmi pembangunan dan ekonomi Kota Pangkalpinang.

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA, SASARAN DAN VARIABEL TERHADAP HASIL YANG DIHARAPKAN

No	Sasaran	Hasil Yang diharapkan	Variabel yang ditentukan	Data Yang diperlukan	Sumber Data
1.	Potensi wilayah Kota Pangkalpinang	Gambaran yang jelas tentang potensi lokal Kota Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya potensi lokal - Model pengelolaan perikanan - Pengembangan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peta dan data wilayah - PDRB Kota Pangkalpinang - Data hasil perikanan - Data sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan - Data perhitungan sektor unggulan Kota Pangkalpinang - Data Base perkembangan produksi perikanan dan pengolahannya - Data output-input sektoral perekonomian Pangkalpinang - Data distribusi kegiatan perekonomian Pangkalpinang 	<ul style="list-style-type: none"> -Bappeda -Dinas Perikanan -BPS Kota Pkpinang -Bagian Ekonomi Pemkot -Responden
2.	Kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial, khususnya pendidikan dan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan	- Perencanaan pendidikan kejuruan perikanan sesuai dengan potensi wilayah Kota Pangkalpinang & kebijakan sub sektor perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Model pendidikan kejuruan perikanan - Pendidikan berbasis keunggulan lokal 		<ul style="list-style-type: none"> -Dinas Pendidikan -SMK N.4 Perikinanan -Dinas Perikanan -Responden

No	Sasaran	Hasil Yang diharapkan	Variabel yang ditentukan	Data Yang diperlukan	Sumber Data dan
3.	Sumber Daya Manusia	Adanya SDM yang profesional untuk mengelola potensi lokal perikanan di Kota Pangkalpinang baik di Kecamatan Bukit Intan maupun di Kecamatan Pangkalbalam	<ul style="list-style-type: none"> - lembaga SMK Peri Kanan - Lapangan pekerjaan - keadaan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Data siswa - Data kelulusan siswa - APK dan APM - Data tenaga kerja bid. perikanan - penghasilan penduduk - tingkat pendidikan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> -SMK Negeri 4 Perikanan -Dinas Pendidikan -Dinas Tenaga Kerja -BPS -Responden
4	Kebutuhan masyarakat	Adanya kesesuaian kebutuhan masyarakat, <i>stakeholder</i> dengan pendidikan kejuruan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan untuk meningkatkan taraf hidup	<ul style="list-style-type: none"> - indikasi pendidikan yang diperlukan - kurikulum SMK - lokasi sekolah - transportasi - biaya pendidikan - motivasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - data Industri di 2 kecamatan - data SM di 2 kecamatan - data kualifikasi guru - data sarana & prasarana SMK - Kurikulum SMK 	<ul style="list-style-type: none"> -Dinas Perindustrian -Dinas Pendidikan -SMK Negeri 4 -responden : nelayan, pelaku usaha bid. Perikanan masyarakat
5..	Strategi Peningkatan Kebutuhan pendidikan SMK	Teridentifikasi faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan SMK	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor internal (kekuatan & kelemahan) - faktor eksternal (peluang & ancaman) 	<ul style="list-style-type: none"> - keadaan SDM/ SDA, fasilitas pendidikan dan prasarana wilayah di kedua kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - kecamatan dalam angka - Dinas Pendidikan - SMK N.4 - BPS - Dinas Dukcapil

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenisnya, data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer dilakukan pengumpulan dengan cara langsung di lapangan dengan cara;

1. Pengamatan langsung (*observasi*) di lapangan untuk mengetahui jelas kondisi yang riil yang sedang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Aktivitas nelayan dan alat tangkapnya dengan lokasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Pangkalbalam
 - b. Aktivitas para pengrajin pengolahan ikan di beberapa industri rumah tangga dan industri pengepangan ikan di dua Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan
 - c. Aktivitas SMK Negeri 4 Perikanan di Kecamatan Bukit Intan
2. Teknik wawancara (*interview*); teknik dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan yang diperlukan antara lain tentang:
 - a. kebijakan pemerintah mengenai sektor unggulan perikanan Kota Pangkalpinang dengan pejabat yang berkompeten di Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pangkalpinang.
 - b. Kondisi penduduk, mata pencaharian dan potensi lokal secara mendalam di dua

Kecamatan yaitu Pangkalbalam dan Bukit Intan dengan camat di ke-2 kecamatan tersebut dan pihak BPS Kota Pangkalpinang.

- c. Kebijakan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal dan pengelolaan SMK Negeri 4 Perikanan kepada pejabat Dinas Pendidikan dan kepala SMK Negeri 4 Pangkalpinang.
 - d. Kondisi tenaga kerja dilakukan wawancara dengan pejabat Disnaker Kota Pangkalpinang
3. Teknik Koesioner, yaitu dengan menyebarkan beberapa pertanyaan terbuka dan atau tertutup untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan lokasi Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan antara lain:
- a. data responden
 - b. data tingkat kebutuhan pendidikan kejuruan
 - c. data pemahaman terhadap potensi lokal dan SDM
 - d. data motivasi masyarakat terhadap pendidikan berbasis potensi lokal

Untuk data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup seluruh keperluan data yang diperlukan dengan sumber tertentu

1. Dinas, Badan, dan kantor, serta sekolah terkait yang ada di Kota Pangkalpinang dan khususnya di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan; antara lain:
 - a. Data PDRB Kota Pangkalpinang

- b. Data Statistik Tenaga kerja dan sektor ekonomi lainnya
- c. Data siswa, APK dan APM, sarana dan prasarana penunjang Pendidikan Kejuruan serta data kompetensi guru sekolah menengah kejuruan
- d. Data-data lain yang diperlukan

1.7.3 Teknik Penentuan Sampling

Dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu ; tenaga, waktu dan biaya (Purwanto, 2007), Populasi penelitian ini adalah masyarakat dan atau pelaku usaha dalam bidang perikanan yang ada di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan. Nelayan yang berdomisili di kedua kecamatan tersebut merupakan bagian penting dari sampel ini.

Semua penduduk sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel atau responden, namun karena banyaknya jumlah penduduk sebagai populasi maka digunakan teknik sampling dalam penelitian ini. Formulasi yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah

$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

persamaan 1

(Sumber; Nurinawati Umi, dkk,2007)

dimana :

n : ukuran sampel

Z : derajat koefisien konfidensi

p : proporsi populasi yang diestimasi yang ada dalam suatu populasi

q : proporsi sisa dalam populasi, dimana besar q tergantung dari nilai p yaitu $q = 1 - p$

e : tingkat kepercayaan yang diinginkan

Untuk mengatasi hambatan dalam penelitian ini, terutama dalam masalah tenaga dan biaya maka penulis memilih tingkat presisi (p) sebesar 7% dimana tingkat kepercayaan *konfidensi*, (e) sebesar 95% atau 0,05). Nilai derajat konfidensi, Z untuk $e = 0,05$ adalah 1,96. Dari apa yang ditentukan ini maka jumlah sampel yang diteliti di dua kecamatan ini adalah: Untuk Kecamatan Pangkalbalam, jumlah populasinya adalah 33.656 jiwa sedangkan Kecamatan Bukit Intan jumlah populasinya adalah 39.506 jiwa. Maka berdasarkan rumus ini

$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

Jika :

$$Z = 1,96$$

$$p = 7\% = 0,07 \text{ dan } q = 1 - 0,07 = 0,93$$

$$e = 0,05$$

$$n = \frac{1,96^2 (0,07 \times 0,93)}{(0,05)^2}$$

$$n = 100,035$$

dibulatkan 100 sampel, sehingga masing-masing kecamatan akan ditentukan sampel berdasarkan persentase proporsi.

$$P = \frac{N}{N_o} \times n$$

Persamaan 2

Dimana :

P : sampel terpilih di suatu wilayah

N : jumlah populasi di wilayah sampel terpilih

N_o : jumlah populasi di seluruh wilayah penelitian

n : jumlah sampel proporsi yang sudah ditetapkan di seluruh wilayah penelitian

Jadi jumlah sampel di tiap kecamatan adalah seperti pada

TABEL I.2 berikut:

TABEL I.2
SEBARAN KEBUTUHAN SAMPEL PENELITIAN

No	Kecamatan	Jumlah Populasi	Jumlah sampel
1	Pangkalbalam	33.656	46
2	Bukit Intan	39.506	54

Berdasarkan 100 orang sampel di dua kecamatan ini akan di acak (*random sampling*) yang terdiri dari *stakeholder* masyarakat terutama nelayan dan pelaku usaha dalam bidang perikanan. Sampel yang akan dipilih secara random merupakan sampel kesempatan (*probability sampling*) sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara objektif (Istijanto, 2008). Terpilihnya setiap satuan elementer ke dalam sampel ini benar-benar berdasarkan faktor kebetulan dan bebas dari subjektifitas peneliti maupun orang lain.

1.7.4 Kerangka Analisis

Analisis merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah riset (Istijanto, 2008). Analisis juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi sasaran-

sasaran dalam penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar dapat menggambarkan secara jelas dan terinci tentang data-data, maka diperlukan analisis diskriptif kualitatif dan diskriptif kuantitatif.

Untuk sasaran indentifikasi potensi wilayah atau potensi lokal wilayah, Kebijakan Pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan dan Perikanan dan identifikasi sumber daya manusia dilakukan analisis diskriptif kualitatif, hal ini disebabkan peneliti lebih banyak menggunakan data sekunder dan sebagian data primer yang diambil dengan metode wawancara. Sementara itu analisis diskriptif kuantitatif penulis gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, nelayan, serta pihak dunia usaha dan dunia industri perikanan di kedua kecamatan tersebut. Untuk identifikasi kebutuhan pendidikan SMK kejuruan berbasis keunggulan lokal dilakukan dengan analisis SWOT berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang terpilih.

1.7.5 Teknik Analisis

Dalam upaya memperkaya data dan lebih untuk memahami fenomena sosial yang diteliti, maka dilakukan usaha untuk mengkombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995). Dengan demikian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hubungan antara teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat pada GAMBAR 1.3 berikut:

[hiperlink\kerangka analisis versi b.5.doc](#)

1.7.5.1 Potensi Wilayah dan Potensi Lokal

Data input yang diperlukan untuk melakukan analisis pada potensi wilayah dan potensi lokal adalah data wilayah dan potensi lokalnya, data sarana dan prasarana yang telah ada. Untuk kedua data input ini akan dilakukan teknik analisis diskriptif dari studi dokumen yang ada. Data yang menyangkut perekonomian wilayah akan digunakan analisis LQ (*Location Quotient*). Dengan LQ ini dapat menunjukkan basis ekonomi wilayah.

Dengan menggunakan variabel PDRB Kota Pangkalpinang pada perkembangan ekonomi sektoral. Hasil yang diharapkan dari hasil analisis pada sasaran potensi wilayah dan potensi lokal ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang potensi lokal yang dapat dikembangkan.

1.7.5.2 Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada sasaran yang kedua ini terdiri dari kebijakan Pemerintah dalam bidang-bidang pendidikan dan sub sektor perikanan, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif. Analisis dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang pada bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan, data jumlah sekolah kejuruan, data sarana dan prasarana pada SMK Perikanan yang sudah ada, pembiayaan pendidikannya, kurikulum SMK Perikanan, dan lulusan yang telah dihasilkan oleh SMK tersebut sejak berdirinya pada tahun pelajaran 2002-2003.

Dengan bantuan data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) khusus untuk sekolah kejuruan, analisis diskriptif pada sasaran ini akan didukung oleh hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memegang kebijakan terhadap pendidikan kejuruan ini, yaitu kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang dan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Perikanan. Hasil yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana kebijakan pendidikan yang direncanakan dapat dijadikan pegangan untuk pengembangan pendidikan berbasis lokal.

Sedangkan untuk kebijakan pemerintah pada sektor pertanian, sub sektor perikanan, dan pengolahannya akan dilakukan analisis diskriptif dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pada sub sektor ini dengan dibantu dengan database Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang.

1.7.5.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud pada sasaran ke tiga ini adalah pelaku dan sekaligus pemanfaatan hasil pembangunan yang berkaitan dengan sektor unggulan yang merupakan basis ekonomi Kota Pangkalpinang. Analisis Diskriptif yang dilakukan berdasarkan data tentang pendidikan, data tingkat pendapatan masyarakat dan atau nelayan, pelaku usaha bidang industri perikanan dan data tenaga pendidik di SMK Negeri 4 Perikanan. Hasil analisis ini akan memperlihatkan pengaruh SDM dalam pengembangan potensi lokal perikanan.

1.7.5.4 Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pendidikan Berbasis Lokal

Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat nelayan, dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di kedua Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dilakukan analisis kuantitatif yaitu dengan menyebarkan beberapa pertanyaan dimana masing-masing pertanyaan diberikan skor. Responden yang dijadikan sampel adalah masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha dalam bidang perikanan yang ada di kedua kecamatan yang menjadi objek penelitian

Kuesioner yang akan dibagikan berisi pertanyaan yang menggunakan skala nominal, ordinal, dan atau interval. Analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan TABEL *mean*, frekuensi, *median*, presentase dan beberapa data yang memerlukan *crosstab* (Istijanto, 2008).

Mean adalah nilai rata-rata dari data observasi suatu variabel dan merupakan jumlah semua data observasi di bagi jumlah yang di observasi. Modus menggambarkan nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling banyak, sedangkan median adalah ukuran nilai tengah dari data yang telah diurutkan. (Istijanto, 2008)

Analisis deskriptif untuk mengukur penyimpangan yang terdiri dari *range*, *standart deviasi*, dan *variance* untuk menghasilkan data yang dapat menunjukkan pusat, pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Tujuan analisis deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis data faktual dan

akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Range (rentangan) adalah data tertinggi dikurangi data yang terendah. *standar deviasi* yang juga disebut sebagai simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat (derajat) variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari reratanya. Sedangkan *variance* adalah kuadrat dari simpangan baku yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penyebaran atas variasi data.

1.7.5.5 Strategi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan SMK Kejuruan

Sasaran yang kelima ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam seperti keadaan sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas pendidikan, prasarana wilayah yang ada, dan kebijakan-kebijakan potensi wilayah yang merupakan bagian dari kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman bagi pengembangan pendidikan kejuruan di kedua wilayah tersebut. Analisis yang tepat untuk faktor eksternal adalah kekuatan (S) dan kelemahan (W) dan faktor internal adalah peluang (O) dan ancaman (T) faktor eksternal adalah analisis SWOT.

1.8 Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab

- a. BAB 1 Pendahuluan; pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan masalah rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di

SMK Negeri 4 Perikanan yang berada di Kecamatan Bukit Intan padahal potensi utama daerah tersebut dan daerah lain yang berdekatan yaitu Kecamatan Pangkalbalam adalah sub sektor perikanan dimana sub sektor tersebut merupakan sektor basis atau sektor unggulan bagi perekonomian Kota Pangkalpinang. Permasalahan ini diidentifikasi untuk menjadi masalah dalam penelitian ini. Setelah mengetahui permasalahan dalam penelitian ini, dirumuskanlah tujuan dan sasaran-sasaran berdasarkan permasalahan yang ada. Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka permasalahan, tujuan dan sasaran ini diarahkan pada ruang lingkup studi untuk membatasi secara spasial. Untuk melihat secara utuh dan sistematis apa yang menjadi masalah, tujuan, dan sasaran-sasaran dalam penelitian ini serta analisis apa yang mungkin digunakan dituangkan dalam satu kerangka pemikiran. Dalam bab ini juga dipaparkan alat analisis apa yang paling sesuai digunakan untuk mengolah data primer dan sekunder yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan sesuai dengan pendekatan studi yang dilakukan. Untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan maka ditampilkan kerangka analisis secara keseluruhan.

- b. BAB II Kajian Literatur; Bab ini membahas teori-teori yang sangat mendukung dan tentunya sangat berhubungan dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini. Antara lain mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pengembangan wilayah, pengertian dan potensi wilayah pesisir dan pengelolaannya, sumber daya

alam dan manusia, perencanaan dan kebijakan pendidikan kejuruan, pemodelan sumber daya dan interaksi sistem kegiatan serta pengertian motivasi dan motif. Teori-teori ini diharapkan menjawab permasalahan-permasalahan secara teoritis

- c. BAB III Gambaran Umum Wilayah Studi; Pada bab ini akan memberikan gambaran kondisi Kota Pangkalpinang yang ditinjau dari segi geografis, kependudukan, aspek ekonomi, tata guna lahan, pendidikan, dan gambaran potensi wilayah studi.
- d. BAB IV; Analisis Tingkat Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Lokal Perikanan. Analisis yang akan dilakukan terhadap potensi wilayah dan lokal, sumber daya manusia, analisis perencanaan pendidikan dan perikanan, analisis kebutuhan pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal dan strategi peningkatan kebutuhan pendidikan kejuruan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan.
- e. BAB V; Kesimpulan dan Rekomendasi, Bab ini merupakan rangkuman yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Sumber Daya Alam dan Pengembangan wilayah

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi termasuk tanah itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan sumber daya adalah sesuatu yang masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sumberdaya adalah sumberdaya alam yang sudah diambil dari dalam atau dari atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain sehingga dapat dihasilkan produk baru yang berupa barang dan jasa bagi konsumen maupun produsen. (Muhammad Suparmoko, 2006)

Menurut Spencer dan Thomas dalam Jayadinata, 2006 sumber daya adalah setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses dan penggunaannya dapat dipahami. Menurut White dalam Jayadinata, 2006 sumber daya terdiri atas dua macam (1) sumber daya alam dan (2) sumber daya manusia.

Pantai dan ikan yang terdapat di Pangkalpinang merupakan sumber daya alam (*natural resource*) yang potensial. Barang sumber daya yang dapat diproduksi dari sumberdaya alam tersebut adalah berupa makanan olahan yang terbuat dari ikan

dan sejenisnya, misalnya getas (kretek), abon ikan, pempek, kricu (kripik cumi) dan lain-lain. Semakin banyak tersedianya barang sumber daya yang diproduksi maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi dan semakin mengurangi tersedianya sumberdaya alam yang ada di dalam bumi karena barang sumberdaya itu harus diambil dari tempat persediaan sumberdaya alam.

Perikanan merupakan sub sektor yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Masalah efisiensi dikaitkan dengan jumlah persediaan ikan yang terus terancam punah dan masalah distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Ikan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih (*renewable resource*) yang memerlukan usaha-usaha pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan dan mengembangkan unit populasi yang ada. Dalam usaha pengelolaan tersebut diperlukan pengetahuan dan informasi tentang perikanan dalam rangka mempelajari perilaku kehidupan dan sifat-sifat dari unit populasi yang merupakan suatu komunitas dalam sumberdaya alam tersebut.

Dengan dicetuskannya zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut, maka hal ini mendorong pemerintah Kota Pangkalpinang memanfaatkan potensi perikanan yang ada di perairan sebelah timur pulau Bangka, yaitu Laut Cina Selatan yang merupakan batas timur Kota Pangkalpinang.

Keberhasilan pembangunan perikanan tidak terlepas dari perencanaan yang matang berdasarkan informasi tentang semua aspek yang mempengaruhi sumberdaya alam tersebut, terutama

aspek sumber kehidupan dan penggunaannya. Untuk merncapai tingkat keberhasilan tersebut, faktor utama yang menentukan adalah pengelolaan secara bertanggungjawab artinya pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana dalam melestarikan persediaan sumber daya ikan tersebut yang sekaligus tidak saja dapat dinikmati secara optimal oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Sub sektor perikanan memberikan harapan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia masa kini dan masa yang datang. Perikanan merupakan satu bagian dari kegiatan ekonomi yang memberikan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui berbagai usaha yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih layak dan baik. Oleh karena itulah diperlukan sumber daya manusia yang profesional yang dapat memanfaatkan sumber daya alam ikan menjadi potensi lokal Kota Pangkalpinang.

2.2 Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan

Sumber daya manusia sangat penting artinya dalam pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) selaku objek direncanakan untuk ditingkatkan taraf hidupnya sampai derajat yang sempurna. SDM selaku objek adalah sebagai perencana, pelaksana dalam pembangunan. keduanya hanya berbeda pada taraf kemampuan mengambil peran dalam pembangunan. H.W Singer (1959) dalam Alkadri et al (1999) mengemukakan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam

pembangunan ekonomi, sementara Fabrican dalam sumber yang sama menyatakan adanya kaitan yang erat antara pendidikan dan penghasilan yang diperoleh oleh seseorang tenaga kerja.

Peningkatan mutu modal manusia dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa mengabaikan investasi fisik dan pembiayaannya.

Sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut istilah sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang ada dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi. (Ahmad. S. Ruky, 2006)

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas dan peran sumber daya manusia dalam pembangunan wilayah, Subroto Ary dalam Alkadri et.al (1999) menulis lima buah usaha, tiga diantaranya adalah:

- a. meningkatkan pendidikan keahlian, ketrampilan, dan kemampuan tenaga kerja dalam menguasai tugas pekerjaannya agar dapat meningkatkan produktivitas.
- b. perlu peningkatan penyuluhan dan penguasaan teknologi pertanian, kehutanan, dan perikanan agar mereka dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar internasional.
- c. perlu ditingkatkan jumlah maupun kualitas pendidikan diploma atau politeknik serta perguruan tinggi guna

mengisi kekosongan tenaga menengah kejuruan dan manajemen.

Menurut Nachrowi dan Suhandoyo dalam Alkadri et al (1999) pengelolaan sumber daya yang ada harus profesional dan akuntabel, disamping untuk kesejahteraan masyarakat juga untuk menjawab tantangan globalisasi yang melanda seluruh masyarakat, bangsa dan negara di dunia ini. Globalisasi menuntut daya saing manusia yang berkualitas pula, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang cukup menggerakkan seluruh sumber daya wilayah yang ada

Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/ pengembangan wilayah, di samping sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan/ pengembangan wilayah tersebut. SDM yang berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah (Sinar Pagi, 17-23 Januari 2007), karena dibekali dengan pengetahuan dan merujuk Nonaka dalam Winardi (1986) bahwa satu-satunya sumber yang dapat diandalkan bagi tercapainya keunggulan kompetitif yaitu pengetahuan.

Dalam konteks SDM berkualitas, kebijakan pembangunan nasional bidang kependudukan tidak terpisahkan dengan kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Pada hakekatnya SDM adalah penduduk dan untuk mencapai SDM yang berkualitas dilakukan melalui proses pendidikan. Maka untuk bidang kelautan ini sangat diperlukan pendidikan menengah bidang perikanan, misalnya SMK Perikanan.

2.3 Perencanaan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Menurut Clayton, et.al (1986) dalam Allyn and Bacon (1990) prinsip pembelajaran berkualitas, yaitu meliputi:

1. Belajar adalah suatu proses yang melibatkan tingkah laku, rangkaian peristiwa dan juga hasil.
2. Belajar adalah hasil dari pengalaman
3. Belajar sangat tergantung pada apa yang dilakukan pembelajaran, hal tersebut tentu saja melibatkan bagaimana memahami, berpikir, merasakan dan bagaimana bertindak
4. Hasil akhir dari proses belajar adalah terjadinya beberapa perubahan perilaku, potensi dan aktualisasi diri.
5. Perubahan dalam diri pelajar cenderung sebagai akibat dari perilakunya dalam sistem motivasi.

Perencanaan seringkali dipahami secara umum sebagai upaya menentukan masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain perencanaan itu identik dengan masa depan. Beberapa pengertian perencanaan antara lain; Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ialah hubungan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu menilai situasi dan kondisi saat ini; merumuskan serta menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan datang); dan menentukan apa

saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan (Husaini Usman, 2006).

Lebih jauh menurut Husaini Usman (2006), perencanaan merupakan seni dan ilmu menata penggunaan lahan, karakter dan letak bangunan, serta jalur komunikasi sehingga memaksimalkan keinginan ekonomi, keindahan, dan kesenangan.

Kata kebijakan adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*Policy*". "kebijakan" berbeda artinya dengan kebijaksanaan yang dalam bahasa Inggrisnya "*Wisdom*". Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalam kebijaksanaan (Muhammad Irfan, 1988)

berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut mungkin dapat digabungkan dengan pengertian sebagai berikut : "Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu".

2.3.1 Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. (Udin Syaefuddin Su'ud, et al, 2006), sedangkan menurut Burhanuddin, (1994), perencanaan pendidikan pada hakikatnya tidak lain dari pada proses pemilihan yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang lebih efektif dan

efisien sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat.

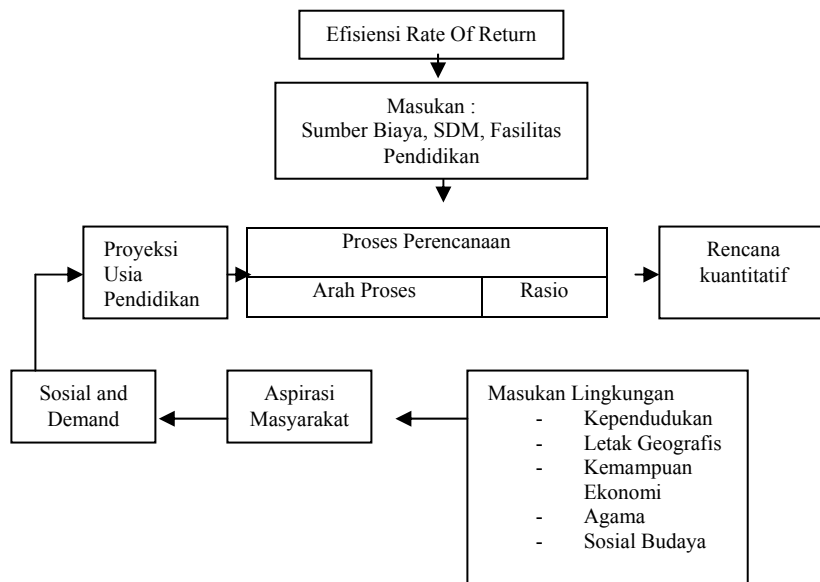
Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka terdapat empat pokok yang ada dalam perencanaan pendidikan itu, antara lain (1) berorientasi ke masa depan, (2) berupa serangkaian aktivitas atau kegiatan, (3) melalui proses yang sistematis dan terarah, serta (4) mempunyai tujuan-tujuan antara dan tujuan akhir yang tertentu

Menurut Husani Usman, (2006) terdapat empat pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu (1) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*), (2) pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), (3) pendekatan untung rugi (*cost dan benefit approach*), (4) pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness*).

Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat itu. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Terdapat tiga kelemahan pendekatan sosial ini, (1) mengabaikan masalah alokasi dalam masalah nasional, dan secara samar tidak mempermasahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia, (2) mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan (*manpower planning*) yang diperlukan masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat, dan (3) pendekatan sosial ini cenderung hanya

menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kuantitas lulusan lebih diutamakan ketimbang kualitas.

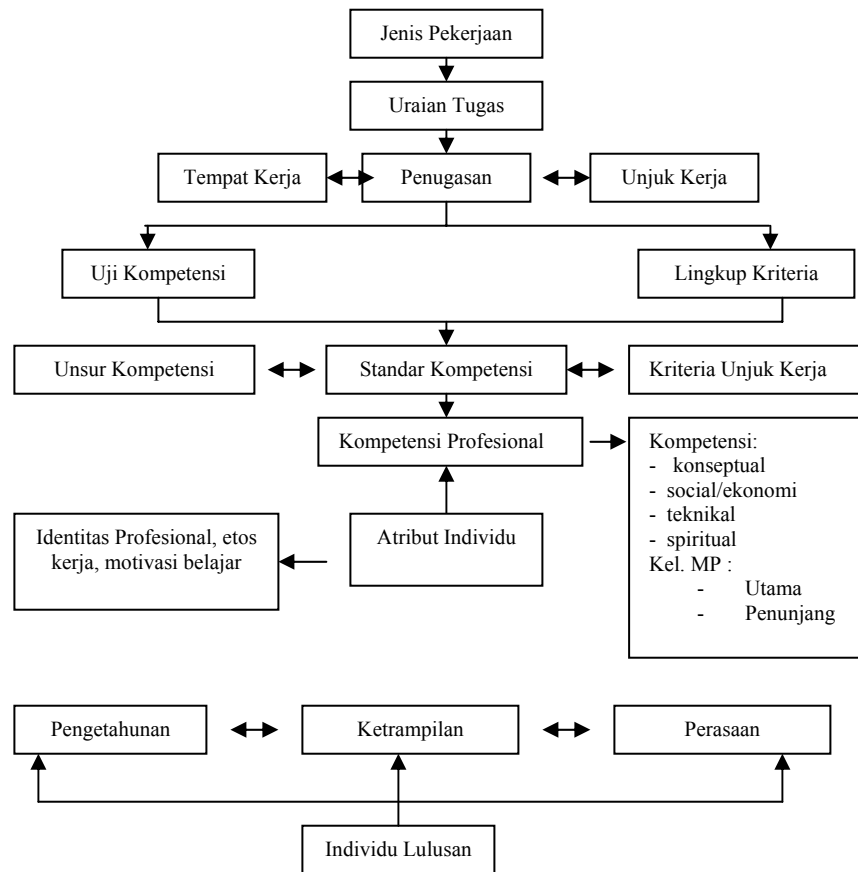
Program pendekatan ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah program wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar SD/ MI sampai dengan SMP/ MTs, sedangkan pendidikan lanjutan wajar 12 tahun baru beberapa daerah kota dan kabupaten yang telah menetapkannya, termasuk Kota Pangkalpinang yang telah menetapkan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2006. Menurut Husaini Usman salah satu kelemahan pendekatan ini adalah mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan yang diperlukan masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan (terutama SMK) yang kurang dibutuhkan masyarakat.



(sumber Husaini Usnan, 2006)

GAMBAR 2.1
PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN
PENDEKATAN SOSIAL

Pendekatan ketenagakerjaan adalah pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Di sekolah menengah kejuruan, pendekatan ini telah diterjemahkan dalam bentuk program pendidikan sistem ganda (PSG) melalui kebijakan *link and match*.



(Sumber : Husaini Usman, 2006)

GAMBAR 2.2.
PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN
PENDEKATAN KETENAGAKERJAAN

Masih menurut Husaini Usman, pendekatan ketenagakerjaan mempunyai tiga kelemahan, yaitu:

- a. mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini mengabaikan sekolah menengah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja, pendekatan ini khusus untuk sekolah menengah kejuruan saja
- b. menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan
- c. tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, disisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya.

Pendekatan keefektifan biaya menitikberatkan pemanfaatan biaya secermat mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggaran maupun bagi peserta didik. Misalnya didirikan SMK Teknologi Perikanan yang dapat mendukung potensi perikanan di suatu daerah.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah pembangunan yang menjamin investasi masa depan yang panjang. Dalam UUD 1945 pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah wajib membiayainya. Sementara dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing dan membantu serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pembangunan pendidikan Depatemen Pendidikan Nasional telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009 antara lain adalah:

1. Program pemerataan dan perluasan akses
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan Citra Publik.

Kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing salah satunya memberikan arahan program pada pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal disetiap kabupaten/ kota. Gunawan menyebutkan paling tidak terdapat 6 (enam) tugas sekolah dalam mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan, dua diantaranya adalah (1) sekolah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, dan (2) Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial (Gunawan, 2000).

Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Setiap daerah dituntut menciptakan pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas SDM-nya sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah. Namun peningkatan SDM ini perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang baik, pengelola yang profesional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar yang cukup, dan anggaran pendidikan yang cukup dan memadai.

Selama ini semua subsistem pendidikan tadi dikelola oleh pusat dan ketika otonomi daerah mulai dilaksanakan, daerah akan semakin leluasa untuk menentukan sistem pendidikan yang akan diterapkan di daerahnya. Namun dalam menyikapi realitas ini, daerah tidak perlu berlebihan dengan mengesampingkan program nasional. Dalam arti bahwa sistem yang digunakan di daerah, tetap mengacu pada program nasional yang tercermin dalam empat strategi dasar pendidikan nasional yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi (M.Sobry Sutikno, 2006).

Salah satu alat kebijakan pemerintah yang terindependensi dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya adalah perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan harus diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas namun optimalisasi kinerja manajemen pendidikannya belum berjalan sesuai dengan harapan.

Bentuk pelaksanaan dari perencanaan pendidikan itu adalah berkenaan dengan penerapan desentralisasi pendidikan yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui penerapan

MBS itu akan berimplikasi dan berdampak pula pada perubahan sistem perencanaan pendidikan itu sendiri. Selama ini sekolah yang dikontrol secara ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam mengelola sumber dayanya sehingga mutu dapat ditingkatkan.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Oleh masyarakat, pendidikan masih dianggap sebagai konsumsi dan belum dilihat sebagai investasi (H.A.R Tilaar, 2006). Sebagai bahan konsumsi cenderung pendidikan itu dianggap sebagai produksi massa depan dengan harga yang ingin ditekan serendah mungkin. Akibatnya pendidikan menjadi semacam komoditi dengan kualitas rendah. Lain halnya jika pendidikan itu dianggap sebagai investasi baik oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diinginkan adalah produk yang prima kualitasnya.

Pendidikan dimassa yang akan datang harus merupakan status industri dalam arti bahwa pendidikan memerlukan pengelolaan yang profesional agar "*rate of return*" dari industri pendidikan itu sama atau setidaknya tidaknya lebih baik dari sektor ekonomi lainnya. Bukankah sektor-sektor yang lain itu nantinya akan digerakkan dan dikelola oleh sumber daya yang merupakan output investasi sektor pendidikan.

2.3.2 Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan atau *efisiensi eksternal* status sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi sektor-sektor pembangunan. (H.A.R Tilaar, 2006)

Dewasa ini kecenderungan dimana tampak gejala yang semakin mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran lulusan sekolah menengah dan pendidikan tinggi.

Masalah tidak relevannya pendidikan bukan saja disebabkan adanya kesenjangan antara *supply* sistem pendidikan dengan *demand* tenaga yang diperlukan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga dikarenakan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3.3. Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri haruslah berakar dalam masyarakat setempat, oleh sebab itu pendidikan lebih baik jika dikelola dengan sistem desentralisasi, artinya kebutuhan pendidikan itu sesuai dengan keadaan masyarakat di wilayah tersebut (H.A.R Tilaar, 2006) dan bukan dengan sistem sentralisasi, sebab akan cenderung mengasingkan pendidikan dan masyarakat.

Dalam membicarakan kurikulum, pendidikan, penelitian, peranan universitas, program pendidikan berkelanjutan, maupun pembiayaan pendidikan menuntut adanya desentralisasi. Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Dinas

Pendidikan kabupaten/ kota merupakan lembaga riil dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya alam dan manusia dalam daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa semua jenjang, dan jenis pendidikan; dan pelatihan di daerah tersebut berada dalam satu manajemen (H.A.R Tilaar, 2006). Dalam masyarakat industri terdapat artikulasi antara jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan antara dunia pendidikan dan dunia kerja

2.3.4 Program Pengembangan SMK

Salah satu program Departemen Pendidikan Nasional untuk sekolah menengah kejuruan adalah *re-engineering* (RE) SMK, yaitu penataan ulang bidang/ program keahlian, penataan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, menuju peningkatan peran SMK menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu (PPKT). Salah satu hasil yang diharapkan pada program ini adalah tertatanya bidang dan program keahlian SMK sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar kerja, serta terwujudnya pola pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (*competency based training*). *Re-engineering* SMK ini membuka peluang untuk saling bekerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.

Selain program RE di atas adanya penetapan SMK berstandar Internasional. Untuk dapat ditunjuk sebagai sekolah bertaraf internasional harus dapat memenuhi kriteria antara lain; (1) memiliki tenaga kependidikan khususnya guru-guru produktif

yang sebagian bersertifikat internasional, memiliki pengalaman kerja/ magang di industri berstandar internasional dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, (2) tersedianya fasilitas yang mendukung pencapaian kompetensi tamatan standar internasional, baik milik sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain (*out sourcing*).

Dalam Kebijakannya, Depdiknas akan berusaha menetapkan 100 SMK berstandar Nasional dengan syarat; (1) Memiliki tenaga kependidikan khususnya guru produktif yang memiliki kompetensi bersertifikasi nasional, berpengalaman kerja di dunia industri pada bidang yang relevan minimal satu tahun, (2) Tersedianya fasilitas pendidikan yang mendukung pencapaian kompetensi tamatan baik milik sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain, (3) Mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas, (4) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi dengan menggunakan perangkat dan prosedur serta mekanisme yang terstandar, dan dilakukan oleh asesor yang memiliki otoritas dan diakui secara nasional.

2.3.4.1 Standar Pelayanan Minimal SMK

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX pasal 35 ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat (2) berbunyi Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan lebih jelas diterangkan. Dalam Bab V membahas standar kompetensi kelulusan, pasal 25 ayat (1) berbunyi standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pasal 26 ayat (3) berbunyi standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Bab VI membahas tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 28 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29 ayat (6) dinyatakan bahwa pendidik pada SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang diajarkan.

Bab VII Peraturan Pemerintah membahas tentang standar sarana dan prasarana. Pasal 42 dari Bab tersebut berbunyi ayat (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2.3.4 2 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal:

1. Lingkup situasi dan kondisi daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tersebut yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, seni dan budaya atau lainnya yang berupa hasil bumi, tradisi, pelayanan/ jasa atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.
2. Lingkup keunggulan lokal; mencakup potensi keunggulan lokal, bagaimana mengelola, mengolah/ mengemas, mengoptimalkan, memasarkan atau proses lainnya yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan maupun Pendapatan Asli daerah (PAD). Maka dipandang perlu penyelenggaraan pendidikan

berbasis keunggulan lokal yang dikembangkan di sekolah (setingkat SMA/ MA/ SMK atau sederajat)

Dalam upaya menyambut era industri pendidikan masyarakat diarahkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan dapat menjawab tantangan masa depan. Menurut H.A.R Tilaar (2006) keterkaitan yang kuat dengan pengembangan pendidikan khususnya pada pendidikan lanjutan, yaitu SMK. Menurutnya ada sepuluh kecenderungan atau *mega-trends* pola pendidikan yang harus dilaksanakan dalam masyarakat modern di Indonesia di masa depan. Namun penulis hanya mengambil yang terdapat keterkaitan dengan pengembangan pendidikan di wilayah khususnya pembangunan dan pengembangan SMK, yaitu **(1) Kurikulum**; masyarakat industri modern adalah masyarakat yang hidup dan dihidupi oleh sains dan teknologi, oleh sebab itu, pelajaran *sains* dan teknologi menempati prioritas tinggi, terutama pendidikan dasar. Masyarakat industri bukan hanya melek huruf, juga melek angka (*numerik*) dan melek ilmu pengetahuan (*sains*). **(2) Proses Belajar Mengajar**, pada PBM yang akan datang peserta didik harus mandiri dan mencari sendiri setelah diadakan tuntunan guru. **(3) Tenaga Kependidikan**, sosok guru yang akan datang perlu menguasai sains dan teknologi, ia membawa peserta didik kepada pengenalan sains dan teknologi, dan lebih dari itu ia adalah sosok personifikasi dari moral dan keyakinan agama. **(4) Pembiayaan Pendidikan**, pendidikan yang bermutu merupakan investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan (*cost sharing*) pada hakekatnya akan

memberikan suatu kekuatan pada masyarakat (*empowering the society*) untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. **(5) Desentralisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat**, pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern haruslah berakar dalam masyarakat setempat. Dalam masyarakat industri modern terdapat artikulasi antar jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan, antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Indrajati Sidi menulis reformasi sekolah kejuruan yang sangat urgen untuk dilakukan ialah *pertama*, Sistem "*Demand-Driven*" yang dipacu kebutuhan pasar kerja, *kedua*, sistem pendidikan kejuruan yang memberikan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi nasional yang baku. standar-standar tersebut benar-benar memberikan kompetensi yang telah ditentukan oleh industri, *ketiga*, pendidikan kejuruan untuk sektor formal dan informal, *keempat*, sistem pengelolaan yang terdesentralisasi, agar pendidikan kejuruan lebih responsif dan antisipatif terhadap perubahan dunia kerja. (Indra Djati Sidi, 2001)

2.3.4.3 Pendidikan Sistem Ganda

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah suatu pola kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pendidikan Sistem Ganda ini merupakan kebijakan dari Depdiknas. Kerjasama yang dilakukan oleh SMK dan DUDI dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Model Pendidikan Sistem Ganda merupakan implementasi kontrol dari pelaksanaan

kerjasama antara lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan Sistem Ganda merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis sinkron antara pendidikan di sekolah dan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dan dimaksudkan untuk mencapai keahlian tertentu.

Menurut Wardiman Djoyonegoro (1997) memberikan konsep Pendidikan Sistem Ganda adalah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) Merupakan program bersama, milik bersama, dan tanggung jawab bersama, (2) Dunia usaha dan industri ikut serta dalam totalitas kegiatan SMK, (3) Pengintegrasian kegiatan belajar di sekolah dengan kegiatan praktik di industri akan menghilangkan perbedaan standar nilai di sekolah, (4) Pendidikan Sistem Ganda mengacu kepada pencapaian mutu tamatan yang terstandar, diukur melalui proses uji keterampilan, dan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda menganut prinsip saling membantu, saling mengisi, dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama.

Masih menurut Wardiman Djoyonegoro (1997) Pendidikan Sistem Ganda memiliki karakteristik : (1) Standar profesi, (2) Standar pendidikan dan pelatihan, (3) Kerja sama dengan dunia usaha dan industri, (4) Pengujian dan sertifikasi, (5) Peraturan pendukung, (6) Nilai tambah, dan (7) Kelembagaan.

2.3.4.4. Life Skill

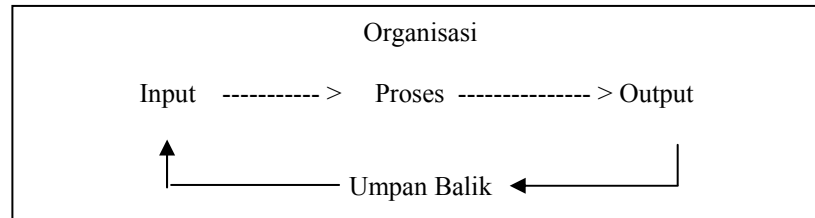
Di dalam Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan (2005) *Life Skill* diartikan sebagai kecakapan hidup yang sangat diperlukan (*basic*), kecakapan hidup yang dimaksud adalah antara lain kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup (*Life Skill*) lebih luas dari keterampilan untuk bekerja apalagi sekedar ketrampilan manual.

Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi 5 bagian: (1) keterampilan mengenal diri sendiri (*self awarness*) yang sering disebut kemampuan personal (*personal skill*), (2) Kecakapan berpikir rasional (*think skill*), (3) kecakapan sosial (*social skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*), dan (5) Kecakapan vokasional (*vocational skill*)

2.3.5 Pendekatan Sistem

Suatu sekolah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling menunjang antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Bagian-bagian ini membentuk suatu sistem. Menurut Gerald dalam Husaini Usman, 2006 mendefinisikan sistem ialah tata cara kerja yang saling berkaitan dan bekerja sama membentuk suatu aktivitas atau mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bangkhart dalam Husaini Usman, 2006 sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Bentuk umum

suatu sistem terdiri atas input, proses, output dan umpan balik. Umpan balik ialah hasil output untuk memperbaiki input yang akan datang. Keempat unsur tersebut berada dalam suatu organisasi. Sekolah yang merupakan suatu organisasi terbuka, maka sekolah dapat dipengaruhi oleh lingkungan luarnya



(Sumber: Husaini Usman, 2006)

GAMBAR II.3
BENTUK UMUM SISTEM

Berkaitan dengan lembaga sekolah seperti SMK maka lingkungan luar yang dapat mempengaruhi kinerja SMK antara lain lingkungan masyarakat sekitar, jarak yang harus ditempuh siswa ke sekolah tersebut, kebutuhan pasar akan lulusan SMK tersebut, keadaan sosial ekonomi orang tua siswa, dan lain-lain. Sedangkan di dalam lembaga sekolah sendiri yang merupakan suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kurikulum, profesionalisme tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang ada, dan lain-lain.

Dimensi pendidikan kejuruan meliputi dimensi manusia (*human*), tugas (*task*), dan lingkungan (*environment*) Dimensi manusia meliputi hubungan manusia, kreativitas, tanggungjawab (*comitmen*), fleksibilitas, dan orientasi jauh kedepan. Sedangkan dimensi tugas meliputi perencanaan, pengembangan, manajemen,

dan penilaian. Dimensi lingkungan meliputi sekolah, masyarakat dan penyediaan tenaga kerja. (Finch & Mc. Gough, 1982)

2.3.6 Kepemimpinan Pendidikan

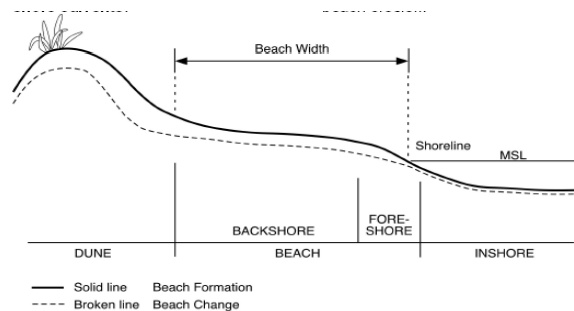
Untuk lingkungan pendidikan kejuruan dikenal dengan pemimpin sebagai *leader, administrator, educator, supervisor, climate maker, manager dan entrepreneur* (anonim, 1995). Sesuai dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang sangat terkait adalah pemimpin kewirausahaan (*entrepreneur*), yaitu kepala sekolah harus mampu menganalisis peluang, memanfaatkan peluang serta dapat menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif, mampu mengkondisikan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara produktif dan selalu berorientasi pada nilai tambah. Langkah di atas perlu didukung oleh kompetensi yang memanfaatkan dan menciptakan peluang, serta mengembangkan dana dari berbagai sumber untuk menunjang operasional sekolah.

2.4 Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (*intrusi*) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar dari pada daerah paparan benua (*continental shelf*), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air

tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (*coral reef*), padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (*sand dune*) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (*trailing edge*) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (*collision edge*), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.



(Sumber: Dahuri, 2001)

GAMBAR 2.4.
GARIS PANTAI

Berdasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara daratan dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya.

2.4.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Rokhmin Dahuri (2001) lebih menjelaskan mengenai definisi dan pengertian pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan menggunakan beberapa pemahaman: **Definsi (1)** “Proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. **Definisi ke (2)** “adalah suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan”. **Definisi ke (3)** “Suatu proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terdapat didalamnya”. **Definisi ke (4)** “Suatu proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan/ mengharmoniskan kepentingan antara berbagai *stakeholders*

(pemerintah, swasta, masyarakat local, dan LSM); dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun (memanfaatkan) dan melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumber daya alam yang terdapat didalamnya, bagi kemakmuran/ kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan.

2.4.2 Potensi Ekonomi Wilayah

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu parameter yang menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat perkembangan perekonomian. Pada hakikatnya, PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Melalui PDRB maka akan banyak didapatkan berbagai informasi mengenai perkembangan ekonomi sektoral.

Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan maka diperlukan beberapa alat yang dapat membantu memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut. Terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan suatu wilayah regional salah satunya adalah Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang

dititikberatkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. Dengan menggunakan analisis LQ ini dapat dilihat kegiatan basis Kota Pangkalpinang dalam konteks Propinsi Kep. Bangka Belitung.

2.4.3 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Perubahan kondisi politik, membawa dampak pada perubahan sistem tata pemerintahan dan kebijakan pembangunan di daerah. Indikator dari perubahan-perubahan tersebut terasa pasca adanya undang-undang otonomi daerah yang memaksa daerah, melakukan inisiasi untuk melakukan *resourcing* dalam membiayai pembangunan daerah, untuk tidak tergantung pada pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, meskipun dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendanaan utama, mengingat setiap arah memiliki sumber daya yang berbeda dalam mengembangkan sumber daya tersebut bagi pembangunan di daerahnya.

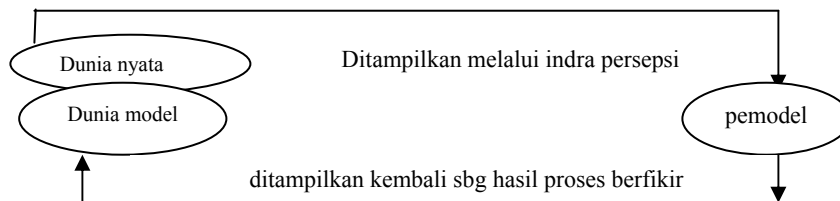
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Model pengembangan ekonomi lokal dibangun dari 5 indikator penting, yaitu (1) faktor lokasi, (2) kesinergian dan faktor kebijakan, (3) pembangunan berkelanjutan, (4) tata pemerintahan, dan (5) proses manajemen (Bappenas,2006).

2.5 Pemodelan Sumber Daya

2.5.1 Pengertian Pemodelan

Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan” permodelan yang kata dasarnya adalah model representasi suatu realitas dari seorang pemodel, dengan kata lain model adalah jembatan antara dunia nyata (*real word*) dengan dunia berpikir (*thinking*) untuk memecahkan suatu masalah. Proses penjabaran atau mempresentasikan ini disebut sebagai modeling atau pemodelan yang tidak lain merupakan proses berfikir melalui sekuen yang logis. (Akhmad Fauzi, 2004)

Gambar di bawah memperlihatkan bahwa model dibangun atas proses berpikir (melalui indra fisik) dari dunia nyata yang kemudian diinterpretasikan melalui proses berpikir sehingga menghasilkan pengertian dan pemahaman mengenai dunia nyata. (daerah irisan antara dunia nyata dengan dunia model), sehingga di dalam pemodelan dikenal istilah ”tidak ada peta satu banding satu”. Model dirancang bukan untuk memecahkan semua masalah.



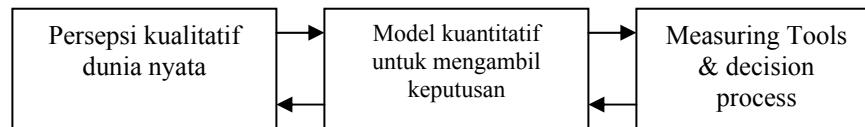
(Sumber A.Fauzi, 2005)

GAMBAR 2.5
INTERSEPSI DUNIA MODEL DENGAN DUNIA NYATA

Di dalam model tidak ada istilah ”yang menjadi kunci dari semua masalah, sehingga dalam pemodelan penting untuk merevisi dan

meng-*upgrade* strategi. Jadi pemodelan sebagai proses menerima, memformulasikan, memproses dan menampilkan kembali persepsi dunia luar.

Untuk menjembatani dunia nyata yang dalam persepsi manusia bersifat kualitatif menjadi model yang bersifat kuantitatif diperlukan proses transformasi berupa alat pengukuran dan proses pengambilan keputusan. Tanpa pengukuran yang jelas tidak mungkin dibangun model kuantitatif yang kokoh. Gambar berikut menampilkan proses transformasi tersebut:



(Sumber ;A.Fauzi, 2004)

GAMBAR 2.6
Transformasi kualitatif-kuantitatif

2.6. Interaksi sistem Kegiatan dengan Sistem Jaringan

Struktur tata ruang kota pada dasarnya dibentuk dari dua elemen utama yaitu *link* dan *node*. Kedua elemen ini sekaligus menjadi elemen transportasi jalur (*link*) adalah suatu garis yang melewati panjang tertentu dari suatu jalan, rel, atau rute kendaraan. Sedangkan node akan membentuk suatu pola jaringan jalan transportasi. Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan menghasilkan pergerakan manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan atau orang (pejalan kaki). Pergerakan yang terjadi dalam suatu kota sebagian besar merupakan pergerakan yang rutin dilakukan, misalnya dari tempat tinggal ke tempat kerja maupun ke tempat pendidikan, ke pasar dan lain sebagainya. Untuk anak sekolah pergerakan rutin

mereka adalah dari tempat tinggal ke tempat dimana mereka menuntut ilmu. Semakin lancar sistem transportasi maka semakin mudah bagi para siswa ini untuk mencapai tempat dimana mereka menimba ilmu (Edward Morlok, 1998).

2.6.1 Aksesibilitas dan Mobilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui suatu sistem jaringan (Tamin O.Z, 2000). Besaran yang dapat menyatakan tingkat aksesibilitas adalah waktu tempuh, meskipun ada juga yang dinyatakan dengan faktor jarak. Suatu tempat sekolah yang berjarak jauh belum tentu dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas rendah, begitu pula sebaliknya. Faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh

Mobilitas adalah ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang biasanya dinyatakan dari kemampuannya membayar biaya transportasi. Mobilitas dapat diukur dari banyak perjalanan atau pergerakan dari suatu tempat (lokasi) ke tempat lain sebagai akibatnya tingginya akses antara tempat (lokasi) tersebut.

2.6.2 Jaringan Jalan

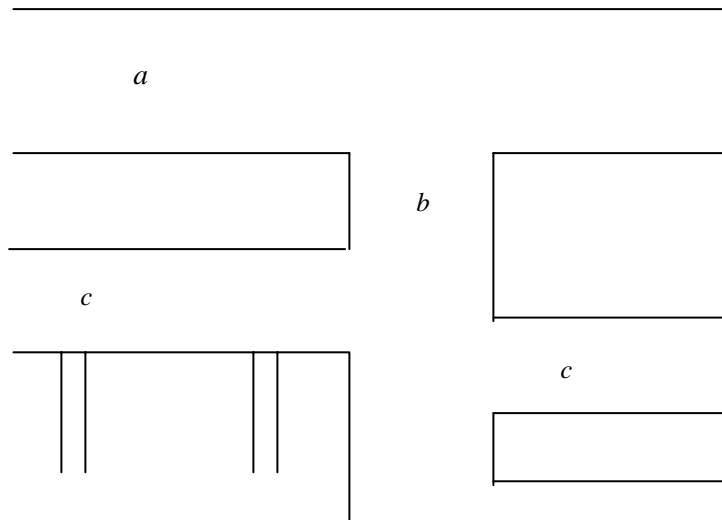
Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu

lintas. Jaringan jalan terdiri dari ruas-ruas jalan yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang lain pada titik pertemuan yang merupakan simpul-simpul transportasi. Pola jaringan jalan sangat membantu mempermudah peserta didik untuk sampai ke tempat dimana sekolahnya berada.

Secara umum sistem jaringan jalan dapat dibedakan berdasarkan sistem pelayanan penghubung yakni; sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota/ wilayah tingkat nasional; Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan zona-zona, kawasan-kawasan (titik simpul dalam kota) atau pusat kegiatan masyarakat di dalam kota.

Menurut Fidel Miro (1997) jaringan jalan berdasarkan peran dan fungsinya yaitu:

- a. Jalan arteri; jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara efisien
- b. Jalan kolektor; jalan yang melayani angkutan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk yang masih dibatasi
- c. Jalan lokal; jalan yang melayani angkutan jarak dekat (angkutan setempat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk yang tidak dibatasi



Keterangan:

- a. jalan arteri
- b. jalan kolektor
- c. jalan lokal

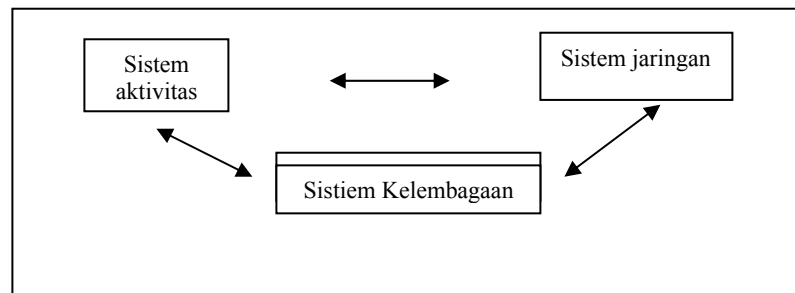
(Sumber: Miro, 1997)

GAMBAR 2.7
HIRARKI JALAN BERDASARKAN PERAN

2.6.3 Sistem Transportasi Kota

Sistem transportasi kota diartikan sebagai suatu kesatuan dari pada elemen-elemen, komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama dalam pengadaan transportasi yang dapat melayani wilayah perkotaan. Transportasi di perkotaan sangat penting bagi keberadaan dan keberlangsung kehidupan perkotaan. Sistem transportasi kota merupakan komponen utama struktur sosial, ekonomi, dan fisik suatu kota (Meyer et al, 1984).

Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan agar tercipta pergerakan yang lancar, yang pada akhirnya juga mempengaruhi kembali sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas



(Sumber; Tamin, O.Z, 1998)

GAMBAR 2.8
SISTEM TRANSFORMASI MAKRO

Menurut Kusbiantoro, (1999) Sistem aktivitas meliputi penambahan penduduk, urbanisasi, tata guna lahan, perkembangan wilayah, kegiatan ekonomi dan sosial, sedangkan sistem jaringan meliputi elemen jalan, terminal, kendaraan, dan sistem pengelolaan. Sistem pergerakan meliputi asal-tujuan perjalanan, rute tempuh, volume lalu lintas barang dan orang. Elemen-elemen transportasi tersebut berlaku sistematis sehingga perubahan pada salah satu sistem akan berpengaruh pada sistem yang lain. Sistem tersebut dipengaruhi oleh sistem kelembagaan yang dalam pengelolaan dan pembiayaan dapat mempengaruhi kinerja sistem transportasi baik pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif bahwa, dewasa ini orang, benda, pesan dapat

disalurkan dalam orbit jaringan aktivitas yang bergerak dari suatu node (titik sambungan dalam suatu jaringan) ke dalam node lainnya. Konfigurasi pergerakan ini tampak juga dalam pergerakan lingkungan perkotaan, namun individu masih berupaya mempersepsi bahwa lingkungan tersebut sifatnya konstan dan stabil. Pergerakan penuh seperti dengan pengalaman orang-orang diperkotaan. Setiap hari siswa memulai pengalaman belajar siswa dengan pergerakan untuk pergi ke pusat pembelajaran, namun pengalaman ini tidak dijadikan bagian dari program perencanaan pendidikan. Akibatnya individu tidak peduli terhadap kekacauan, kemacetan, dan bahaya

Kajian pergerakan ini sangat diabaikan, akibatnya perencanaan juga mengabaikan kecuali untuk perencanaan transportasi atau rute bis sekolah. Menurut Udin Syaefuddin Su'ud (2006), terdapat 9 prinsip yang berkaitan dengan pergerakan dan yang berhubungan dengan pendidikan antara lain prinsip (1) komponen utama sistem transportasi ; orang atau benda yang ditransportasikan, alat yang mengangkutnya, jaringan tempat alat itu bergerak, prinsip (5) variabel utama dalam sistem transportasi adalah waktu, keamanan, kenyamanan, dan biaya (ongkos) dan prinsip (8) transportasi harus terpadu dengan sistem perkotaan.

2.7. Motivasi dan Motif

Motivasi ialah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan (*need*), dorongan (*devire*) atau *impuls* (Husaini Usman, 2008). Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk

melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi bersekolah atau bekerja (misalnya mengajar) dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bersekolah ataupun bekerja. Motivasi merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Bagi seorang menejer misalnya kepala sekolah ada dua jenis motivasi yang dapat dilakukan, yaitu (1) memotivasi para siswa agar bersemangat untuk belajar dengan baik, melatih kompetensi dengan tekun, (2) memotivasi para guru untuk mengajar dengan baik dan benar, menunjukkan keprofesionalisme yang tinggi. Menurut Husaini Usman, 2006 usia di atas 40 tahun lebih sulit untuk termotivasi dibandingkan dengan usia belasan sampai dengan 30-an tahun. Hal ini berarti memotivasi siswa lebih mudah dari pada memotivasi guru di suatu sekolah.

Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi seseorang pasti didasari motif-motif tertentu.(Handoko,2000). Motif adalah sesuatu dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat atau melakukan tindakan tertentu. Motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang mendorong dia untuk bertindak. (Terry GR,1960)

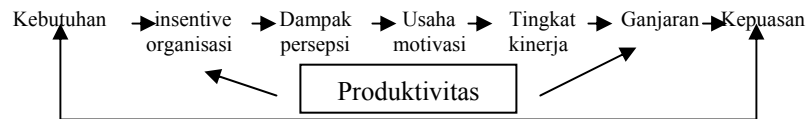
Teori motivasi sendiri dapat digambarkan menjadi teori isi dan teori proses. teori ini memusatkan perhatiannya pada pertanyaan “apa penyebab perilaku terjadi dan berhenti, sedang

proses memusatkan perhatian pada bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan. Model teori ini digambarkan oleh Stoner et.al (1992) dan proses motivasi di gambarkan Chung dan Megginson I (1981) di bawah ini:



(Sumber ; Stoner,1992)

GAMBAR 2.9
MODEL TEORI ISI DAN MOTIVASI



(Sumber; Chung & Megginson I,

GAMBAR 2.10
PROSES MOTIVASI MODEL CHIUNG DAN MEGGISON

Handoko (2000), menjelaskan faktor-faktor pembentuk motivasi:

1. teori kognitif, setiap perbuatan yang akan dilakukan sudah dipikirkan alasan-alasannya
2. teori Hedonistik, segala perbuatan bertujuan mencari hal yang menyenangkan dan menghindari yang menyakitkan
3. teori Insting, tingkah laku seseorang didasarkan atas kekuatan biologis setiap manusia
4. teori Psikoanalitis, tingkah laku didasarkan atas kekuatan bawaan dalam diri setiap manusia
5. teori keseimbangan, tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan dan mengarah pada pencapaian

tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan itu, hingga terjadi suatu lingkaran motivasi (*motivational cycle*)

Menurut Maslow dalam Husaini Usman (2006) yang menggambarkan tingkat kebutuhan bagi manusia. Tingkatan kebutuhan menurut Maslow terdiri atas lima tingkatan, yaitu:



(Sumber H. Usman 2006)

GAMBAR 2.11
DIAGRAM HIRARKI KEBUTUHAN A. MOSLOW

TABEL II.1
RANGKUMAN KAJIAN TEORI / LITERATUR

No	Sumber	Uraian	Kaitan Dalam Penelitian
1.	Spencer & Thomas dalam Jaya Dinata, 2006	<p>* Sumber daya adalah setiap benda hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses dan penggunaannya dapat dipahami</p> <p>* Sumber Daya terbagi dua Sumber daya manusia dan sumber daya alam</p>	Pentingnya SDM yang mempunyai kualitas akademik dan kualitas kompetensi dalam pengelolaan SDA dan pentingnya pendidikan kejuruan untuk meningkatkan mutu SDM
2.	Nachroni dan Suhandoyo dalam Alkadri et al, 1999	<p>* Sumber daya manusia memiliki kemampuan yang cukup menggerakkan seluruh sumber daya wilayah yang ada</p> <p>* Peran SDM sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan/ pengembangan wilayah</p> <p>* SDM yang berkualitas bisa didapat melalui proses pendidikan</p>	SDA yang harus diolah agar menjadi sesuatu yang bernilai SDM sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai pengguna utama dalam pemanfaatan SDA
3.	H.W Singer, dalam Alkadri et.al, 1999	<p>* Faktor SDM faktor utama dalam pembangunan ekonomi</p> <p>* kaitan yang erat antara pendidikan dan penghasilan</p>	
4.	Subroto Ary dalam Alkadri et.al, 1999	Upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas dan peran sumber daya manusia dalam pembangunan wilayah yaitu meningkatkan pendidikan keahlian, meningkatkan penguasaan teknologi dan meningkatkan kualitas pendidikan diploma/ politeknik/ PT bidang kejuruan dan manajemen	
5.	Burhanuddin 1999	<p>Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis, analisis yg rasional mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat</p> <p>Empat pokok yang ada dalam perencanaan pendidikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> beorientasi ke masa depan serangkaian aktivitas atau kegiatan melalui proses yang sistematis dan terarah mempunyai tujuan antara dan tujuan akhir 	Arah/ model Perencanaan Pendidikan Kejuruan

lanjutan

6	Husaini Usman,2006	<p>Empat pendekatan dalam perencanaan pendidikan :</p> <p>a.pendekatan kebutuhan sosial</p> <p>b.pendekatan tenaga kerja</p> <p>c. pendekatan untung rugi</p> <p>d. pendekatan keefektifan biaya</p> <p>tiga kelemahan pendekatan sosial ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengabaikan masalah alokasi dalam masalah nasional dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan • mengabaikan kebutuhan perencanaan tenaga kerja yang diperlukan masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat • cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kualitas lulusan lebih diutamakan ketimbang kualitasnya <p>tiga kelemahan pendekatan tenaga kerja ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan karena perencanaan ini mengabaikan sekolah menengah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja • menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan • tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, disisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya 	<p>Pendekatan sosial dan pendekatan tenaga kerja merupakan alternatif dalam pembangunan pendidikan kejuruan</p> <p>Pertimbangan tuntutan Dunia Usaha dan Industri dalam merekrut tenaga kerja lulusan SMK harus menjadi perhatian dunia pendidikan</p>
7.	Lasswell & Kaplan dalam M.Irfan, 1988	<p>* Kebijakan sebagai suatu program pencapaian,tujuan,nilai-nilai dan tindakan yang terarah</p> <p>* Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu</p>	<p>Arah Kebijakan pendidikan yang harus dikembangkan di daerah</p>

8.	Renstra Depdiknas, 2004-2009	<p>Kebijakan Pendidikan Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerataan dan Perluasan Akses • Program Peningkatan mutu, relevansi & daya saing • Program Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra Publio <p>Model-model pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Re-Engineering: penataan ulang program keahlian • SMK Bertaraf Internasional • Pendidikan Sistem Ganda • Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal • Life Skill 	Kebijakan pemngembangan SMK yang sesuai dengan potensi daerah
9	M. Sobry Sutikno, 2006	<p>Selama Otonomi daerah diterapkan semakin leluasa daerah untuk menentukan sistem pendidikan yang akan diterapkan di daerahnya. Sistem di daerah tetap mengacu pada program nasional yang tercermin dalam empat strategi dasar pendidikan nasional ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemerataan pendidikan • peningkatan mutu • efisiensi • relevansi 	Peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kurikulum sangat di mungkinkan tetapi tetap mengacu pada program pokok nasional
10.	H.A.R Tilaar, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan di masa yang akan datang harus merupakan industri, sehingga pendidikan harus dikelola secara profesional. • Pendidikan harus menghasilkan SDM yang profesional untuk mengisi sektor-sektor ekonomi dan industri • Suatu sistem pendidikan yang berhasil dapat diukur dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan • Tidak relevannya pendidikan bukan saja disebabkan oleh kesenjangan antara <i>supply</i> dan <i>demand</i> tenaga yang diperlukan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga disebabkan isi 	<p>Keselasaran sistem Demand dan supply antara pendidikan dan sektor lainnya</p> <p>Pentingnya relevansi lulusan SMK dengan permintaan tenaga kerja dalam pembangunan</p> <p>Strategisnya kuriukulm akan menjadi bahan acuan tingginya relevansi lulusan dengan</p>

lanjutan

		kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	permintaan tenaga kerja
11.	Rokhim Dahuri, 2001	<p>Beberapa pengertian pengolahan wilayah pesisir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengolahan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan manusia yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam yang secara potensi terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. • Proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan 	<p>Pentingnya penataan kurikulum SMK yang sesuai dengan potensi wilayah</p> <p>Mengidentifikasi ciri wilayah pesisir dan cara pengelolaannya</p>
12.	BAPENAS, 2006	<p>PDRB merupakan salah satu parameter yang menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat perkembangan perekonomian suatu wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yg melibatkan pemerintah, dunia usaha & masya • rakyat lokal serta organisasi masyarakat untuk mengembangkan eko pd suatu wil. Model PEL dengan 5 indikator Faktor lokasi, kesinergian & Fokus kebijaksanaan, pemb. berkelanjutan, Tata Pemerintahan, Proses. Manajemen 	<p>Menggunakan salah satu analisis, yaitu LQ untuk menentukan sector basis kota Pangkalpinang</p> <p>Adanya keterkaitan dan kepentingan bersama antar <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan potensi lokal</p>
13.	Tarmin, O.Z, 1998	Sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan, yang akan mempengaruhi sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas	Faktor yang menentukan kemudahan akses ke SMK Perikanan yang ada
14	Udin Syaefuddin Su'ud, 2006	9 prinsip yang berkaitan dengan pergerakan dan yang berhubungan dengan pendidikan, antara lain;	Jalan dan angkot sangat berperan dalam mendukung keberadaan suatu sekolah

lanjutan

15	Handoko,2000	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen utama sistem transportasi, orang/benda yang diangkut, alat angkutnya, jaringan tempat alat itu bergerak • Variabel utama dalam sistem transportasi adalah waktu, keamanan, kenyamanan dan biaya • Sistem transportasi harus terpadu dengan sistem perkotaan <p>Motivasi seseorang didasari oleh motif-motif tertentu. Motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat atau melakukan tindakan tertentu. Motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang mendorong dia untuk bertindak</p>	Pedoman masyarakat untuk memilih kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi local
----	--------------	--	--

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1 Kondisi Umum Wilayah Studi

Kota Pangkalpinang merupakan daerah otonomi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di bagian timur pulau Bangka dengan posisi $106^{\circ} 4' - 106^{\circ} 7'$ Bujur Timur, dan $2^{\circ} 4' - 2^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dengan posisi geografis yang strategis yaitu berada di antara Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa yang dihubungkan dengan selat Bangka, selat Karimata, dan selat Gaspar.

Berdasarkan PP nomor 79 tahun 2007, luas keseluruhan Kota Pangkalpinang adalah 118,408 Km². Secara geografi Kota Pangkalpinang dikelilingi oleh beberapa kabupaten yang ada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kota Pangkalpinang terbagi atas 5 wilayah Kecamatan , yang terdiri dari;

1. Kecamatan Taman Sari dengan luas 1,33 km² yang terbagi atas 4 kelurahan.
2. Kecamatan Rangkui dengan luas 7,78 km² yang terbagi atas 9 kelurahan.

3. Kecamatan Bukit Intan dengan luas 36,54 km² yang terbagi atas 7 kelurahan.
4. Kecamatan Pangkalbalam dengan luas 35,56 km² yang terbagi atas 9 kelurahan.
5. Kecamatan Gerunggang dengan luas 37,10 km² yang terbagi atas 6 kelurahan.

Dari ke lima Kecamatan di atas maka Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam merupakan Kecamatan yang termasuk mempunyai daerah yang luas.

Berdasarkan luas wilayah Kota Pangkalpinang, pola penggunaan lahan terbentuk oleh aktifitas kota atau dalam pengertian lain dominasi kegiatan akan membentuk pola pemanfaatan ruangnya. Penggunaannya lahan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat seperti TABEL III.1 berikut:

TABEL III.1
PENGUNAAN LAHAN
KOTA PANGKALPINANG

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
1.	Pemukiman	3.196,97	36%
2.	Industri	17,28	0,2%
3	Kebun/Pertanian	3.543,99	40%
4.	Hutan/Semak-semak	2.127,42	24%
5.	Perikanan darat	48,70	0,5%
6.	Tanah kosong	5,54	0,06%

(Sumber: Bapeda Kota Pangkalpinang, 2006)

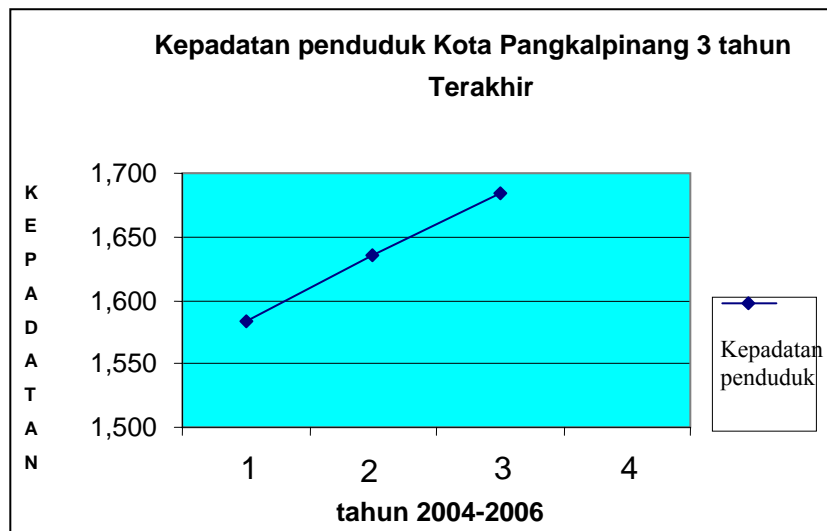
Dilihat dari aspek pengguna lahan maka sektor perikanan, dan sektor industri merupakan sektor-sektor yang masih bisa dikembangkan untuk pembangunan Kota Pangkalpinang.

[hiperlink\PETA POSISI KOTA PKP TESIS VER B.5.doc](#)

[hiperlink\peta sebaran industri tesis ver b.5.doc](#)

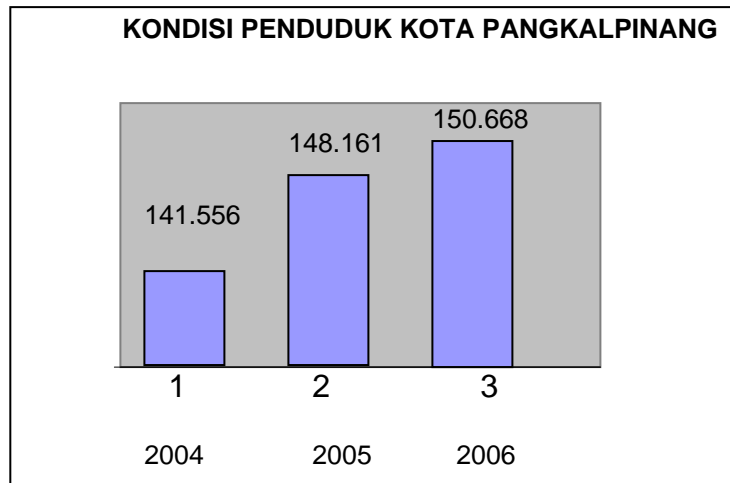
3.2 Aspek Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang tahun 2006 jumlah penduduknya adalah 150.668 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.685 tiap km^2 . Pada tahun 2004, dan 2005 jumlah penduduk yang menempati lima wilayah Kecamatan di Kota Pangkalpinang adalah masing-masing 141.556 jiwa, dan 146.161 jiwa, artinya dalam 3 tahun terakhir penduduk Kota Pangkalpinang yang luas wilayahnya 118.408 km^2 naik rata-rata 4.556 jiwa setiap tahun. Adapun kepadatan penduduk per km^2 pada tahun 2004, dan 2005 masing-masing adalah 1.584, dan 1.635 jiwa. Jadi kepadatan rata-rata penduduk dalam 3 tahun terakhir bertambah sebesar 1.610 jiwa per km^2



(Sumber BPS Kota Pangkalpinang, 2007)

GAMBAR 3.3
KEPADATAN PENDUDUK KOTA PANGKALPINANG



Sumber BPS Kota Pangkalpinang, 2007

GAMBAR 3.4
KEADAAN PENDUDUK KOTA PANGKALPINANG

Pertambahan penduduk Kota Pangkalpinang tergolong kecil selama 3 tahun terakhir tidak sampai 5% namun terjadi disparitas tingkat kepadatan penduduk antara satu Kecamatan dengan Kecamatan yang lain seperti dapat dilihat pada TABEL III.2 berikut;

TABEL III.2
SEBARAN PENDUDUK KOTA PANGKALPINANG DI LIMA KECAMATAN
TAHUN 2006

No	Kecamatan	Luas Wil (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / (km ²)	% tase Kepadatan
1	Taman Sari	1,33	15.441	11.609,77	60,8
2	Gerunggang	37,10	22.860	661,17	3,19
3	Pangkalbalam	35,57	33.656	946,19	4,90
4	Rangkui	7,78	39.205	5.039,20	26,12
5	Bukit Intan	36,54	39.506	1.081,17	5,6
	Jumah	118,32	150.668	1.273,39	

(Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2007)

Dari data di atas maka penduduk terpadat adaalah Kecamatan Taman Sari (60,80%), dan penduduk terenggang pada Kecamatan Gerunggung (3,19%), Sedangkan sebaran penduduk menurut usia adalah sebagai berikut:

TABEL III.3
KONDISI PENDUDUK KOTA PANGKALPINANG BERDASARKAN USIA
TAHUN 2006

Kel. Umur	Jumlah Penduduk			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%tase
0-4	6.454	6.574	13.028	8,65
5-9	7.540	6.393	13.933	9,25
10-14	7.117	7.238	14.355	9,53
15-19	7.841	7.600	15.441	10,25
20-24	8.022	7.962	15.984	10,61
25-29	6.936	7.781	14.717	9,77
30-34	5.428	6.152	11.580	7,69
35-39	6.212	5.489	11.701	7,77
40-44	4.343	5.488	9.831	6,52
45-49	5.609	4.524	10.133	6,73
50-54	3.318	2.714	6.032	4,00
55-59	1.990	2.594	4.584	3,04
60 +	4.343	5.006	9.349	6,21
Total	75.153	75.515	150.668	100

Sumber; Pkpinang dlm angka 2007

Jumlah penduduk laki-laki, dan perempuan dapat dikatakan seimbang, sedangkan jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok usia 20-24 tahun (10,61%) , yaitu penduduk usia kerja, sedangkan penduduk pada usia di atas 50 tahun jumlahnya di bawah 10.000 jiwa (4,00%). Secara keseluruhan keadaan penduduk di Kota Pangkalpinang pada 2006 merupakan

penduduk usia sekolah dimana 5 sampai dengan 20 tahun jumlah penduduk tidak kurang dari 59.713 jiwa atau 39,65% yang tersebar di lima Kecamatan .

3.3 Aspek Ekonomi

Secara ekonomi wilayah Kota Pangkalpinang terbagi atas beberapa wilayah sentra produksi, dan wilayah pusat pengembangan, diantaranya adalah:

- di Kecamatan Gerunggang terdapat: pusat pengembangan sentra produksi, dan industri pengolahan nanas, dan kelapa yang di usahakan oleh masyarakat setempat, dan beberapa sentra produksi industri kecil lainnya
- di Kecamatan Taman Sari, merupakan pusat perdagangan, dan jasa serta pusat lembaga keuangan regional, dan sentra produksi kecil lainnya
- di Kecamatan Pangkalbalam, merupakan pusat jasa pelabuhan regional, pusat distribusi regional, pusat pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perikanan, dan sentra produksi kecil lainnya, khususnya yang berkaitan dengan perikanan
- di Kecamatan Rangkui, merupakan pusat perdagangan, dan jasa, pusat distribusi garmen, serta industri kecil lainnya
- di Kecamatan Bukit intan, merupakan pusat pemerintahan, dan layanan publik lainnya, pusat pengembangan kawasan wisata pantai, dan industri kecil

lainnya terutama yang berhubungan dengan hasil laut, dan hutan

Berdasarkan Rencana Strategi Kota Pangkalpinang 2004-2009, komposisi penduduk Kota Pangkalpinang dilihat dari aspek mata pencaharian seperti yang dapat di lihat pada TABEL III.4 berikut:

TABEL III.4
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA PANGKALPINANG
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2006

No	Mata Pencaharian	% Tase
1	S. Jasa	56,60
2	S. Perdagangan & Keuangan	22,80
3	S.Pertanian	11,59
4	S.Pertambangan	3,62
5	S.Listrik,Gas Alam & Air	3,09
6.	S.Pengangkutan & Komunikasi	2,30

(Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2007)

Sebagian besar mencari nafkah dari sektor jasa yaitu 56,60 %, sedangkan yang terkecil pada sektor pengangkutan, dan komunikasi 2,3%. Sektor pertanian 11,59 menempati urutan ke tiga yaitu sebesar 11,59%, tentu di dalamnya terdapat sub sektor perikanan, apakah sebagai nelayan atau sebagai pengusaha pengolahan hasil perikanan.

Pada tahun 2006, berdasarkan data Pangkalpinang Dalam Angka tahun 2007 besar pendapatan dari beberapa sumber pendapatan adalah Rp. 53.788.457.808,- dimana pajak bagi hasil memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp. 20.313.499.717,- atau sebesar 37,77% dari keseluruhan pendapatan. Sedangkan kontribusi terkecil adalah sektor bagian

laba BUMD yaitu Rp. 215.994.261,- atau sebesar 0,4%.. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) berdasarkan dasar harga berlaku tahun berjalan 2006 adalah Rp. 1,709 trilyun, dan meningkat sebesar 18,69% pada tahun 2007 yaitu Rp. 18,69 trilyun. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2007 sebesar 5,46% meningkat jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 5,27%. Pendapatan perkapita dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 rata-rata naik sebesar Rp.267.488,- Sedangkan PDRB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2006, lapangan usaha bidang pertanian yang di dalamnya terdapat sub sektor perikanan sebesar 16%, merupakan urutan ke-3 setelah perdagangan (22,8%), dan jasa 18,1%.

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam ukuran kesejahteraan ini adalah pendapatan perkapita. Dalam kenyataan, pendapatan perkapita masyarakat diukur dengan banyak proksi salah satunya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per jumlah penduduk. PDRB sendiri merupakan suatu ukuran aktivitas perekonomian di suatu daerah, yaitu penjumlahan dari produk, dan jasa final di suatu daerah. Pengukuran PDRB dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pendekatan pengeluaran, serta pendekatan pendapatan. Namun untuk kasus Indonesia, tidak dicatat PDRB berdasarkan pendapatan. Untuk kasus Pangkalpinang, seperti halnya kabupaten/ Kota lain di Indonesia, PDRB hanya dicatat dengan pendekatan produksi. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka PDRB dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor

perekonomian di suatu daerah. TABEL III.5 menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam tahun 2005, dan 2006 terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang dari 6 sektor lapangan usaha.

TABEL III.5
DISTRIBUSI KEGIATAN EKONOMI
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006

No	Lapangan Usaha	2005	2006
1.	Pertanian:	16,82 %	15,96
	a. tanaman bahan makanan	0,71%	0,69
	b. tanaman perkebunan	0,05%	0,04
	c. peternakan	0,86%	0,81
	d. perikanan	15,20%	14,41
2.	Pertambangan & Penggalian	0,00%	0,00
3.	Industri Pengolahan	10,81%	11,10
4.	Listrik, gas, dan air bersih	2,03%	2,15
5.	Bangunan	7,07%	7,28
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	21,98%	22,93

(Sumber: *Bagian Perekonomian Setda Kota Pangkalpinang, 2007*)

Berdasarkan data ini menunjukkan sub sektor perikanan menjadi sektor unggulan dalam bidang pertanian jauh di atas 4 sub sektor yang lainnya. Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki distribusi ekonomi tertinggi dari lima sektor lainnya.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang relatif meningkat sejak periode 2004 – 2006. Peningkatan kontribusi sektor industri menjadi penting mengingat sektor industri akan memberikan *multiplier* dalam perekonomian yang cukup besar

termasuk pada sektor tersier yang merupakan perekonomian perkotaan. Kota Pangkalpinang juga memperlihatkan peningkatan porsi kegiatan sektor tersier seperti sektor perdagangan, dan subsektor komunikasi. Detail perkembangan dalam empat tahun terakhir berkaitan dengan distribusi PDRB Kota Pangkalpinang menurut lapangan usaha

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang jika dilihat dalam kategori sektor produksi yang terlalu agregat memperlihatkan keunggulan meskipun hanya terdapat sedikit sub sektor saja yang memperlihatkan keunggulannya. Sebagai ilustrasi, jika dilihat dari sektor pertanian dalam kategori agregat merupakan sektor basis di Kota Pangkalpinang. Padahal, hanya sub sektor perikanan saja yang merupakan sektor basis di Kota Pangkalpinang relatif dibandingkan dengan perekonomian nasional. Berdasarkan temuan di atas, maka yang menjadi analisis sektor unggulan di Kota Pangkalpinang dilakukan pada level sub sektor produksi untuk menghindari kesalahan kategorisasi yang terlalu agregat.

Jika perekonomian Kota Pangkalpinang dilihat nilai *Location Quotient* (LQ) maka suatu sektor dikatakan sektor basis (sektor unggulan) jika nilai indeks LQ sektor tersebut lebih besar daripada satu,, dan disebut sektor non basis jika lebih kecil daripada satu. Hasil perhitungan indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan perbandingan nasional. Dari data yang di dapat dari bagian perekonomian Setda Kota Pangkalpinang bahwa dalam 2 tahun yaitu tahun 2005, dan 2006 sektor pertanian merupakan sektor basis dengan nilai LQ-nya 1,27 pada tahun 2005, dan 1,25

pada tahun 2006 dimana sub sektor perikanan merupakan sub sektor yang mempunyai nilai LQ di atas satu, yaitu tahun 2005; 7,82, dan tahun 2006; 7,56.

3.4 Aspek Kependidikan

Sampai dengan tahun awal tahun 2007 ini di Kota Pangkalpinang pembangunan pendidikannya tetap meliputi pembangunan pendidikan dengan jenjang pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah masing-masing sekolah tiap jenjang, dan keadaan murid serta fasilitas lain dapat dilihat pada TABEL berikut

TABEL III.6
JUMLAH SEKOLAH DI KOTA PANGKALPINANG
DI TIAP KECAMATAN TAHUN 2007

No	Kecamatan	Jlh. SD	Jlh SMP	Jlh. SMA	Jlh SMK	Jlh
1	Taman Sari	6	0	0	1	7
2	Pangkalbalam	22	4	2	0	30
3	Rangkui	20	7	3	3	33
4	Bukit Intan	20	4	3	4	30
5	Gerunggang	12	6	2	1	21
	Jumlah	80	21	10	9	

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2007

Pada TABEL III.6, memperlihatkan bahwa pada Kecamatan Taman Sari tidak terdapat sekolah jenjang SMP, dan SMA. Penduduk usia sekolah SMP, dan SMA di wilayah ini bersekolah di Kecamatan sekitarnya yaitu Kecamatan Rangkui, dan Gerunggang. Dari segi luas wilayah memang Kecamatan

Taman Sari ini yang terkecil, dan kawasan ini telah menjadi pusat perdagangan, dan jasa Kota Pangkalpinang.

SMK Negeri 4 Perikanan berada di Kecamatan Bukit Intan, tepatnya di perbatasan antara Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam. Lokasi sekolah berada di sekitar pabrik pengolahan hasil perikanan, dan dekat dengan muara sungai yang menjadi penghubung Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam. Di belakang sekolah tersebut terdapat pelabuhan terbesar di Kota Pangkalpinang, yaitu pelabuhan Pangkalbalam yang merupakan pintu masuk perdagangan Kota Pangkalpinang. Untuk mencapai lokasi sekolah tersebut dapat ditempuh dari Kecamatan Pangkalbalam sejauh lebih kurang 1,5 km, dan dari pusat Kecamatan Bukit Intan sejauh 8 km. Jalan yang dapat dilalui adalah jalan arteri skunder. Sampai dengan tahun 2007 tidak tersedia alat transportasi umum (angkot) yang melalui lokasi SMK tersebut. Mungkin ini salah satu sebab optimalisasi SMK ini rendah. Lebih lanjut keadaan SMK ini seperti pada TABEL III.7 berikut;

TABEL III.7
KONDISI SMK DI KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2006

No	Kecamatan	Jlh. SMK N+S	Bidang Keahlian	Jlh Jurs	Jlh. Rombel	Daya Tampung ideal	Jlh.siswa Yang ada
1	Taman Sari	1	B & M	5	18	648	652
2	Gerunggang	1	Teknologi	8	27	972	1.050
3	Pangkalbalam	0	-	-	-	-	-
4	Rangkui	3	B & M	3	15	600	636
5	Bukit Intan	2	B & M	3	12	480	492
		1	Parawisata	2	12	480	476
		1	Perikanan	2	8	320	179

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2007

Kecamatan Bukit Intan memiliki 4 sekolah menengah kejuruan dengan 3 program keahlian, salah satunya adalah SMK dengan program keahlian Perikanan. Jumlah siswa yang seharusnya dapat di tampung pada tahun 2006 tersebut 320 siswa tapi yang terserap hanya 179 siswa atau 55,94%, Sedangkan untuk Kecamatan Pangkalbalam tidak memiliki sama sekali sekolah menengah kejuruan. Dua Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti sebab potensi perikanan di kedua Kecamatan ini sangat besar.

Untuk lebih mendapatkan identifikasi tentang pendidikan di kedua Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam, maka TABEL berikut akan memperlihatkan data APK (angka partisipasi kasar) dari jenjang SD, SMP, dan SMA/ SMK pada tahun 2006

TABEL III.8
DATA APK KOTA PANGKALPIANG TAHUN 2006

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA/ SMK
1	Bukit Intan	106,29	102,14	92.16
2	Pangkalbalam	107.10	100,28	78,05

(Sumber I Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang. 2007)

APK untuk setiap jenjang SD, dan SMP telah melampaui melebihi 100%, berarti tidak anak usia SD, dan SMP yang tidak bersekolah di kedua Kecamatan tersebut, sedangkan untuk anak usia sekolah jenjang sekolah menengah (SMA, dan atau SMK) dengan APK di bawah 100% masih ada yang tidak bersekolah. Pada hal di kedua Kecamatan ini terdapat sejumlah SMA, dan atau SMK. Hal ini memperkuat adanya ketidakmaksimalan keberadaan SMK Perikanan di perbatasan Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pendidikan kejuruan yang sesuai dengan potensi lokal perikanan yang telah ada di Kecamatan Bukit Intan, yaitu SMK Negeri 4 Perikanan. Data pada TABEL III.9 memperlihatkan bahwa jumlah siswa yang ada kurang dari 60% dari kapasitas yang tersedia. Secara umum keadaan Guru, dan fasilitas yang ada di SMK tersebut adalah:

TABEL III.9
KONDISI PERSONIL GURU, DAN TENAGA
ADMINISTRASI DI SMK NEGERI 4

No	Kualifikasi Pend.	jlh	Keterangan
1	DIII Pendidikan / Umum	9 org	Mengajar pada MP umum Dan Penunjang
2.	ANT sertifikat (ahli madya neutika)	2 org	MP Khusus keahlian Pelayaran, dan perikanan(yg dibutuhkan 8 orang)
3.	S.1 Pendidikan /umum	15 org	Mengajar pada MP umum, penunjang, dan diperbantukan pada MP keahlian

(Sumber: SMK Negeri 4 Perikanan Pangkalpinang, 2007)

Jumlah guru yang diperlukan pada kompetensi kejuruan perikanan tidak memadai, karena hanya dapat memenuhi 25%, artinya masih kekurangan tenaga guru yang terampil dalam bidang perikanan.

TABEL III.10
KONDISI FASILITAS BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 4
PANGKALPINANG TAHUN 2006

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	R. Belajar	9 bh	Jlh. Kursi 32x9 = 288
2	R. Praktek	3 unit	Bengkel THP, dan NPL
3.	Lab. Bhs	1 unit	
4.	R. Perpustakaan	1 unit	
5.	R. Komputer / MM	1 unit	40 bh komputer – online –sistim
6.	R. Gambar	1 unit	jaringan
7.	R. Serbaguna	1 bh	
8.	Kapal Tangkap	1 bh	Beserta kelengkapannya

Sumber: SMK Negeri 4 Perikanan Pangkalpinang, 2007

Ditinjau dari fasilitas yang tersedia, untuk jumlah siswa yang ada sudah sangat memadai. Artinya fasilitas ini tidak dipergunakan secara optimal mengingat jumlah siswa yang minim.

3.5. Aspek Potensi Lokal

Berdasarkan database Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2007 jumlah armada tangkap di kedua Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam terdiri dari perahu tanpa motor (PTM), motor tempel (MT), dan Kapal Moto (KM) dengan jumlah nelayan seperti TABEL III.11 berikut;

TABEL III.11
JUMLAH ARMADA, dan NELAYAN DI KECAMATAN
BUKIT INTAN, dan PANGKALBALAM

No	Tahun	Jumlah nelayan	Jlh Armada Tangkap
1	2005	3.447	378
2	2006	3.459	484
3	2007	3.461	633

(Sumber database Perikanan Tangkap, 2007)

Selain perairan laut, maka potensial di perairan umum (sungai) juga merupakan potensi yang tidak dapat diabaikan. Perairan umum di Kota Pangkalpinang terdiri dari sungai muara Baturusa, sungai Rangkui, sungai Selindung, sungai Air Mawar, dan kolong-kolong (semacam, danau kecil-bekas galian pasir timah konvensional) yang semuanya seluas 285 Ha. Penangkapan ikan di perairan umum dilakukan oleh nelayan tidak tetap atau hanya sebatas hobi belaka.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2007 sebesar 19.714,2 ton/ tahun dengan nilai Rp.285.132.462.000,- dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a. konsumsi lokal = 8.944 ton
- b. pengolahan = 2.731 ton
- c. ekspor antar pulau via bandara = 568,3 ton
- d. ekspor antar pulau via pelabuhan = 7.471 ton

Berdasarkan jumlah hasil perikanan yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Pangkalpinang sebesar 8.944 ton pada tahun 2007 dimana jumlah penduduk pada saat itu tidak kurang dari 160.000 jiwa, berarti total konsumsi hasil perikanan laut perkapita pada tahun 2007 adalah 55,9 kg.

Dalam tiga tahun terakhir perkembangan produksi ikan di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut;

TABEL III.12
PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN DALAM 3 TAHUN
DI KOTA PANGKALPINANG

No	Tahun	Volume (ton)	Nilai Rp. (X.Rp.1.000)
1	2005	19.708	282.315.445
2	2006	19.712	284.813.631
3	2007	19.714	285.132.462

(Sumber database Perikanan Tangkap, 2007)

Jenis perikanan laut yang populer ditangkap adalah ikan manyung, ikan biji nangka, ikan merah, ikan kakap, ikan ekor kuning, ikan tenggiri, cumi, kepiting, kerang, dan lain-lain. sebanyak 24 macam.

Fasilitas-fasilitas yang mendukung pembangunan perikanan laut, dan perikanan umum yang telah dibangun antara lain:

- a. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut oleh BUMN, BUMD, BHI, dan perorangan.
- b. Fasilitas Penunjang, adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum.

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain Gedung TPI (Tempat pelelangan ikan), fasilitas BBM: SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) fasilitas pengolahan PPI, kios bahan perbekalan, dan alat perikanan, tempat ibadah, dan lain-lainnya.

**[hiperlink\PETA KEC. PANGKALBALAM TESIS
B.5.doc](#)**

[hiperlink\PETA LEK BK.INTAN TESIS B.5.doc](#)

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN KEJURUAN

4.1 Analisis Identifikasi Wilayah, Potensi Lokal, dan SDM

4.1.1 Kecamatan Bukit Intan

Kecamatan Bukit Intan mempunyai ketinggian 16 m dari permukaan laut. Daerah ini merupakan wilayah pertanian, serta mempunyai lokasi pantai yang menjadi daerah wisata. Selain itu lokasi fasilitas perdagangan yang berupa petak pasar, dan toko sebagian besar berada di Kecamatan ini.

Secara administrasi Kecamatan Bukit Intan terdiri dari 7 kelurahan yang terdiri dari 21 rukun warga dengan 85 rukun tetangga, dan kepala keluarga yang berjumlah 7.731 kepala keluarga dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 berjumlah 39.506 jiwa. TABEL berikut yang dihimpun dari Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, dan Data Kecamatan dalam angka, keadaan penduduk, dan lain-lain yang akan menjadi pertimbangan dalam analisis ini dapat dilihat pada TABEL IV.1 berikut;

TABEL IV.1
KEADAAN PEKERJAAN PENDUDUK
DI KECAMATAN BUKIT INTAN

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Belum/ tidak bekerja	10.895	27,58 %
2.	Pelajar	6.140	15,54 %
3	Nelayan	1.134	2,88 %
4.	Buruh harian	4.159	10,53 %
5.	Buruh nelayan	1.180	2,99 %
6.	Lain-lain 24 katagori	15.998	35,48 %
	Jumlah	39.506	

(Sumbe: Hasil olahan sendidri, 2009)

Dalam perkembangan pembangunan di Kecamatan ini, untuk sub sektor perikanan cukup berkembang terutama pada perikanan laut. Jumlah rumah tangga nelayan 264, dengan jumlah armada 371 buah dari 1100 armada penangkapan ikan di Kota Pangkalpinang atau sekitar 33,73%. Dari segi peningkatan kesejahteraan sosial, ditandai salah satunya dengan meningkatnya jumlah sarana sosial tingkat pendidikan. Jumlah usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang ikan olahan hasil laut sebanyak 27 industri yang tersebar seperti yang ditunjukkan oleh TABEL 1 pada lampiran. Berdasarkan 27 industri ini tersebar di 5 kelurahan yang di Kecamatan Bukit Intan. Jika Kecamatan ini terdiri dari 7 kelurahan, maka keberadaan industri ini telah mencapai 71,43%. Dapat dikatakan penyebaran keberadaan industri ini sangat tinggi. Menurut Camat Kecamatan Bukit Intan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (1) bahan baku mudah didapat, (2) masyarakat di Kecamatan ini penggemar makanan olahan dari ikan.

Kapasitas produksi dari 27 industri tersebut sebesar 316.725 kg/ th adalah jumlah kebutuhan ikan. Sementara itu jumlah perikanan tangkap di Kecamatan Bukit Intan tahun 2006 sebesar 4.264.450 kg/ thn. dari total sebesar 19.208.500 kg/ thn, berarti pemanfaatan ikan untuk industri ikan olahan hasil laut hanya 7,43% atau 1,65% dibandingkan dengan jumlah perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang tahun 2006.

Untuk lebih memahami potensi perikanan di Kecamatan Bukit Intan ini, maka peneliti melakukan beberapa kunjungan (observasi) di sebagian besar industri olahan makanan yang

berasal dari ikan maupun industri pembekuan ikan atau ekspor ikan yang berada di sekitar SMK N.4 Perikanan dengan mendapatkan jumlah karyawan. Hasil survei yang ditunjukkan pada TABEL 2 lampiran ini memberikan GAMBAR an bahwa dari 131 karyawan yang bekerja di 18 perusahaan, 16,78% atau 22 orang karyawan yang berasal dari tamatan SMK Negeri 4 Perikanan. Tentunya angka ini masih relatif kecil yang menunjukkan kontribusi tamatan SMK Negeri 4 ini di dunia usaha dan industri bidang perikanan.

Di dalam mendukung potensi alam di kecamatan ini, rumah tangga nelayan yang memiliki sarana untuk penangkapan ikan, dan hugungannya dengan kemampuan pemanfaatan ikan untuk industri bidang perikanan.

Jika dilihat dari kemampuan pemanfaatan ikan untuk industri pengolahan yang hanya 7,43%, maka pada TABEL IV.2 dapat mengindikasi bahwa fasilitas nelayan untuk melaut masih sangat sederhana ini yang merupakan salah satu penyebabnya. Jumlah motor tempel yang lebih besar dari pada kapal motor dapat menyebabkan keefektifan penangkapan tidak maksimal.

TABEL IV. 2
JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI SARANA
PENANGKAPAN IKAN

No	Uraian	Jlh RT	Persentase
1	Kapal motor	105	28,30%
2	Motor tempel	191	51,48%
3	Perahu tampa. motor tempel	75	20,22%
4	Tambak	2	
5	Kolam	3	

(Sumber; Kecamatan Dalam Angka, 2006)

Tantangan yang dihadapi di kecamatan ini antara lain adalah upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pemanfaatan lahan pertanian yang belum diusahakan untuk kepentingan, dan pengembangan wilayah, sebagai wilayah industri, dan wisata, serta kegiatan ekonomi di sektor perdagangan, dan industri kecil.

Selaras dengan konteks penelitian ini, maka peneliti juga telah merangkum dari berbagai sumber data sekunder untuk mencari tahu penduduk usia 16-18 tahun yang berada di Kecamatan Bukit Intan ini, Jumlah mereka adalah 2140 orang. Jumlah SMA, dan SMK di Kecamatan ini 7 buah yang terdiri dari 3 SMA, dan 4 SMK, yang salah satunya SMK Negeri 4 Perikanan Rincian keadaan penduduk usia 16-18 tahun seperti yang ditampilkan dalam TABEL IV.3 berikut:

TABEL IV. 3
KEADAAN PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN
DI KECAMATAN BUKIT INTAN

No	Kelurahan	Jumlah Seluruhnya
1	Sriwijaya	249
2	Buit Besar	311
3	Bukit Intan	197
4	Semabung Baru	282
5	Semabung Lama	296
6	Bacang	333
7	Air Itam	472
	Jumlah	2.140

(Sumber; Kecamatan Bukit Intan Dalam Angka, 2006)

Kendala yang timbul dalam menghadapi tantangan yang ada, antara lain:

- masih cukup banyak kawasan yang kurang tertata dengan baik
- prasarana, dan sistem, serta kualitas data registrasi yang belum sempurna
- belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, dan industri rumah tangga, termasuk di dalamnya industri pengolahan hasil perikanan

Arah pembangunan daerah ini adalah untuk memacu pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa peran, serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui peningkatan peranan sektor industri rumah tangga, serta sektor pariwisata. Peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur, dan perbaikan kondisi prasarana perhubungan jalan raya diarahkan pada peningkatan antar kota. peningkatan jalan yang menghubungkan antar dua desa, peningkatan produksi, dan jaringan listrik. Penggunaan sumber daya alam diupayakan dilakukan dengan terencana, rasional, optimal, dan bertanggungjawab sesuai dengan daya dukungnya. Sasaran pembangunannya antara lain:

- meningkatnya pertumbuhan ekonomi

- meningkatnya ketersediaan praarana, dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antar kota yang berlaku
- berkembangnya daerah wisata pantai
- meningkatkan APK SD sampai dengan SMA/ SMK
- meningkatkan daya dukung sumber daya alam
- mengembangkan sektor unggulan/ sektor basis
- meningkatkan pengembangan industri kecil
- meningkatkan kondisi jalan, mulai jalan lokal primer sampai dengan lokal sekunder
- meningkatkan fasilitas pendidikan, dan tenaga kependidikan

4.1.2 Kecamatan Pangkalbalam

Ketinggian daerah ini lebih kurang 50 m di atas permukaan laut. Kecamatan Pangkalbalam merupakan daerah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perekonomiannya melibatkan seluruh sektor antara lain; pertanian, perdagangan bangunan, industri, dan lain-lain. Kecamatan ini terdiri dari 9 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 33.656 jiwa atau 8.075 kepala keluarga. Pertumbuhan penduduk dalam tiga tahun terakhir rata-rata 4,62 persen Sub sektor peternakan, dan perikanan mengalami peningkatan terutama pada perikanan laut. Jumlah rumah tangga nelayan sebanyak 217 dengan jumlah armada penangkapan 262 buah atau 23,82% dari total 1100 armada penangkapan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2006.

TABEL IV.4
KONDISI PEKERJAAN PENDUDUK
DI KECAMATAN PANGKALBALAM

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Belum/ tidak bekerja	9.475	23,10 %
2.	Pelajar	7.382	21,94 %
3.	Nelayan	1 374	4,08 %
4	Buruh harian	3.217	9,56 %
5.	Buruh nelayan	1.128	3,35 %
6.	Lain-lain 24 katagori	11.080	32,92 %
	Jumlah	33.656	

(Sumber; Dinas Dukcapil Kota Pkpinang, 2007)

Jumlah usaha kecil, dan menengah yang bergerak dibidang ikan olahan hasil laut sebanyak 28 industri yang tersebar seperti yang ditunjukkan oleh TABEL 3 pada lampiran. Berdasarkan 28 industri tersebut ternyata tersebar di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkalbalam. Jika jumlah kelurahan yang ada di kecamatan ini 9 buah, maka 66,67% wilayah di Kecamatan Pangkalbalam ini terdapat industri yang berkaitan dengan perikanan.

Kapasitas produksi sebesar 1.285.572 kg/ tahun adalah jumlah kebutuhan ikan. Sementara itu jumlah perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang tahun 2006 sebesar 19.208.500 kg/ tahun. Berarti pemanfaatan ikan untuk industri ikan olahan hasil laut hanya 6,6%.

Potensi perikanan di Kecamatan Pangkalbalam ini dilakukan beberapa kunjungan (observasi) di sebagian besar industri olahan makanan yang berasal dari ikan maupun industri pembekuan ikan atau ekspor ikan dengan mendapatkan jumlah karyawan seperti TABEL 4 pada lampiran. Data tersebut

memberikan GAMBAR an bahwa dari 423 karyawan yang bekerja di 16 perusahaan hanya 9,92% atau 42 orang karyawan yang berasal dari tamatan SMK Negeri 4 Perikanan. Sama seperti halnya di Kecamatan Pangkalbalam, angka ini masih relatif kecil yang menunjukkan kontribusi tamatan ini di dunia usaha, dan industri.

Menurut Sekretaris Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kota Pangkalpinang, dan hasil wawancara dengan beberapa para pengusaha bidang perikanan, alasan mereka membuka usaha dalam bidang perikanan ini antara lain (1) bahan baku mudah di dapat, (2) pemasarannya cukup luas, dan mudah, dan (3) masyarakat Pangkalpinang penggemar makanan olahan yang berasal dari ikan.

Di dalam mendukung potensi alam di kecamatan ini, rumah tangga nelayan yang memiliki sarana untuk penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

TABEL IV.5
JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI
SARANA PENANGKAPAN IKAN DI KECAMATAN
PANGKALBALAM

No	Uraian	Jlh RT	Persentase
1	Kapal motor	50	19,08%
2	Motor tempel	10	3,82%
3	Perahu tanpa. motor tempel	202	77,10%
4	Tambak	3	
5	Kolam	2	

(Sumber; *Kecamatan Dalam Angka*, -2006)

TABEL IV.5 memberikan GAMBAR an yang memprihatinkan dimana 202 rumah tangga nelayan hanya memiliki perahu tanpa

motor mencapai 77,01%. Jadi wajar jika pemanfaatan ikan untuk industri pengolahan tidak mencapai 10%. Hal ini yang menyebabkan nelayan tersebut sukar untuk membiayai kehidupan secara wajar, dan ini akan berpengaruh pada kemampuan mereka menyekolahkan anak-anaknya.

Penduduk usia 16-18 tahun yang berada di Kecamatan Pangkalbalam ini, seperti yang ditampilkan dalam TABEL IV.6 berikut;

TABEL IV. 6
KEADAAN PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN
DI KECAMATAN PANGKALBALAM

No	Kelurahan	Jumlah Seluruhnya
1	Ampui	478
2	Lontong Pancur	594
3	Pasir Garam	461
4	Gabek II	141
5	Gabek I	753
6	Selindung Baru	358
7	Air Salemba	722
8	Rejosari	277
9	Ketapang	242
	Jumlah	4.026

(Sumber: Kecamatan Pangkalbalam Dalam Angka, 2006)

Jumlah sekolah menengah di daerah ini terdapat dua buah, yaitu SMA Negeri 4, dan SMA Depati Amir tanpa memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tantangan yang dihadapi di Kecamatan Pangkalbalam ini antara lain upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekonomi disektor perdagangan yang kurang tertata rapi. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan

program prioritas untuk pengendalian penggunaan lahan yang terbatas di kecamatan ini.

Kendala yang dihadapi di Kecamatan Pangkalbalam ini antara lain;

- kepadatan penduduk yang tinggi
- penataan pemukiman penduduk yang kurang teratur
- kawasan perdagangan belum tertata rapi
- pendidikan kejuruan yang belum ada, terutama yang berkaitan dengan perikanan

Untuk melihat wilayah Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Bukit Intan sebagai suatu wilayah yang mempunyai potensi lokal yang mempunyai nilai ekonomis dari pandangan penduduk di kedua kecamatan ini maka kepada responden diberikan beberapa pernyataan tentang potensi lokal perikanan di dua Kecamatan tersebut, dan pendapat mereka tentang fasilitas perikanan yang telah tersedia di wilayah tersebut. Variabel yang digunakan untuk melihat besarnya potensi perikanan di kedua Kecamatan ini antara lain (1) pengelolaan SDA, (2) pengadaan Fasilitas, (3) Keberadaan Industri Pendukung, (4) Akses ke lokasi sentra produksi,, dan (5) tingkat konsumsi produk olahan ikan.

Untuk dapat melihat GAMBAR an beberapa variabel tersebut maka melalui 100 responden yang telah mengisi kuesioner ini dapat dilakukan analisisnya. Dari TABEL IV.7 di bawah ini, median (nilai tengah) dari seluruh variabel yang diukur mempunyai nilai tiga artinya setiap pernyataan mereka memberikan penilaian pada skala 3, yaitu tingkat “setuju” dari pernyataan positif pernyataan tersebut. Standar deviasinya

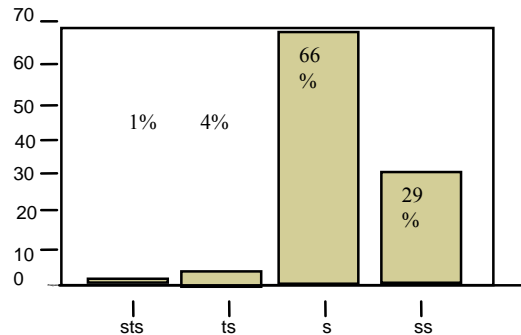
berkisar 0,551 sampai dengan 0,695, yang memberikan pengertian bahwa pendapat para responden sebagian besar (lebih dari 75%) pada skala 3, dan 4, setuju, dan sangat setuju.

TABEL IV.7
STATISTIK POTENSI WILAYAH, DAN SDM

		pot.perik anan	belum maksil -pot	asilita s perika nan	ind perika nan	akses	Suka produk olahan ikan
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.23	2.96	3.16	3.17	3.14	3.27
Std. Error of Mean		.057	.070	.056	.051	.055	.062
Median		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mode		3	3	3	3	3	3
Std. Deviation		.566	.695	.564	.514	.551	.617
Variance		.320	.483	.318	.264	.303	.381
Range		3	3	3	3	3	3
Minimum		1	1	1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4	4	4
Sum		323	296	316	317	314	327
Percentil	25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
es	50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	75	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00

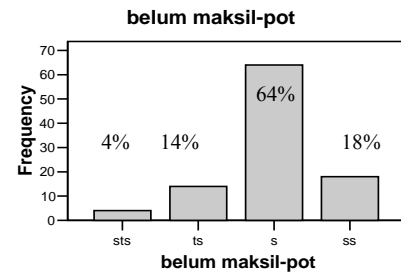
(Sumber: hasil olahan SPSS, 2009)

1. tanggapan terhadap potensi perikanan



(Sumber: hasil survey, 2009)

2. tanggapan terhadap pengelolaan potensi perikanan



(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

GAMBAR 4.1
GRAFIK TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
POTENSI PERIKANAN, dan PENGELOLAANNYA

Sebanyak 66% responden menjawab setuju, dan 29% menjawab sangat setuju bahwa potensi perikanan di Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan untuk ditingkatkan. Hal ini diperkuat lagi ketika para responden memberikan pendapat 64% setuju, dan 18% sangat setuju ketika dikatakan bahwa potensi ikan di kedua Kecamatan daerah penelitian ini belum dikelola secara maksimal.

TABEL IV.8
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
FASILITAS PERIKANAN DI WILAYAH STUDI

		Frequency	Perce nt	Valid Perce nt	Cumulative Percent
Valid	Sts	2	2.0	2.0	2.0
	Ts	3	3.0	3.0	5.0
	S	72	72.0	72.0	77.0
	Ss	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Para responden memberikan pernyataan positif bahwa adanya fasilitas perikanan seperti Pusat Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pusat Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan penelitian ini adalah salah satu bukti kuat bahwa di daerah ini mempunyai potensi lokal perikanan. Angka setuju 72% didukung oleh angka sangat setuju 23% suatu bukti dari hal tersebut. Fasilitas yang cukup memadai ini tentunya akan mendukung sentra-sentra produksi hasil perikanan yang berada di dua Kecamatan ini

Para responden memberikan pendapat 74% setuju, dan 22% sangat setuju bahwa adanya industri pengolahan hasil laut baik industri kecil maupun home industri, dan industri sedang semisal industri pembekuan ikan (*cold stroge*). Pernyataan ini memperkuat indikasi bahwa di kawasan ini merupakan kawasan industri perikanan dalam skala kecil sampai dengan skala sedang. Dalam artian yang lebih luas bahwa tersebarnya industri perikanan ini mengidentifikasikan potensi lokal perikanan di kedua Kecamatan ini (lihat TABEL 3 lampiran)

Selain mempersiapkan fasilitas, pemerintah Kota Pangkalpinang juga mempermudah akses ke, dan dari sentra-sentra produksi seperti pembuatan jalan arteri sekunder, dan jalan kolektor agar pergerakan transportasi dapat dengan mudah menjangkau lokasi-lokasi tersebut sehingga pemasaran produk-produk industri tersebut tidak menjadi kendala.

Berdasarkan pernyataan responden 71% setuju, dan 22% sangat setuju, bahwa mempermudah akses di kedua Kecamatan

ini merupakan indikasi kuat tekad pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memaksimalkan potensi local perikanan di dua Kecamatan tersebut. TABEL , dan diagram pie berikut mengGAMBAR kan hal tersebut:

TABEL IV.9
PENDAPAT RESOPONDEN TERHADAP KEMUDAHAN
AKSES MENUNJUKKAN INDIKASI KUAT USAHA
PEMERINTAH KOTA UNTUK MEMAKSIMALKAN
POTENSI LOKAL PERIKANAN

		Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumul ative Perce nt
Valid	sts	1	1.0	1.0	1.0
	Ts	6	6.0	6.0	7.0
	S	71	71.0	71.0	78.0
	ss	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009



Sumber ' Hasil olahan sendiri,,2009

GAMBAR 4.2
PENDAPAT RESOPONDEN TERHADAP KEMUDAHAN
AKSES

Hal lain yang tidak dapat dianggap enteng adalah pola konsumsi masyarakat terhadap ikan, dan produk-produk turunannya. Semakin besar masyarakat di dua Kecamatan ini mengkonsumsi ikan, atau makanan olahan yang berasal dari ikan, dan sejenisnya maka hal tersebut akan membawa angin segar bagi dunia usaha, dan industri dalam bidang perikanan untuk mengembangkan usahanya. GAMBAR an yang diberikan responden dalam ini seperti pada TABEL IV.10 berikut:

TABEL IV.10
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KONSUMSI
IKAN MASYARAKAT

	Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid sts	1	1.0	1.0	1.0
ts	6	6.0	6.0	7.0
s	58	58.0	58.0	65.0
ss	35	35.0	35.0	100.0
Tot al	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Sebanyak 35% responden sangat setuju bahwa mereka menyukai ikan, dan produk turunannya,, dan 58% lainnya responden menyatakan setuju untuk hal ini. Berarti lebih dari 90% menyukai ikan, dan produk turunannya. Pendapat ini penting untuk memperkuat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap ikan, dan produk turunannya.

4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam pengelolaan sumber daya alam tentunya diperlukan sumber daya manusia. Masyarakat yang ada di suatu wilayah akan lebih berarti jika ia merupakan bagian dari SDM yang handal yang mampu mengelola SDA untuk lebih menjadi nilai ekonomi yang lebih bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan merupakan masyarakat sebagai pelaku, dan sekaligus pengguna hasil dari pembangunan di wilayah tersebut. Untuk mengetahui seberapa penting SDM yang diperlukan, dan atau SDM yang telah berkiprah di dua kecamatan ini, maka 100 responden telah memberikan jawaban terhadap 5 variabel yang diharapkan dapat memberikan GAMBAR an SDM di kedua Kecamatan ini. Variabel tersebut antara lain:

- a. Pengaruh SDM
- b. Kualitas SDM, dan Ketersediaannya
- c. Peningkatan *life skill* SDM melalui pendidikan kejuruan
- d. Pendidikan berbasis potensi lokal
- e. SDM industri rumah tangga

TABEL IV.11
PENDAPAT RESPONDEN PENGARUH
SDM, dan KUALITASNYA TERHADAP SDA

a. pengaruh SDM

	Frequ ency	Perc ent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid ss	5	5.0	5.0	5.0
S	16	16.0	16.0	21.0
cb	59	59.0	59.0	80.0
B	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100. 0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

b. Kualitas SDM, dan Ketersediaannya

	Frequ ency	Percent	Valid Percent	Cumula tive Percent
Valid sts	2	2.0	2.0	2.0
ts	15	15.0	15.0	17.0
s	71	71.0	71.0	88.0
ss	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Responden memberikan 59% jawaban cukup besar (cb), dan 20% besar (b) ketika kepada mereka diberikan pernyataan pengaruh SDM terhadap pengelolaan SDA. Sedangkan untuk terbatasnya ketersediaannya SDM yang handal para responden menyatakan 71%-nya setuju diperkuat 12% sangat setuju, dan hanya 15% tidak setuju, sedangkan sisanya 2% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Sebaran pendapat ini mengindikasikan bahwa

menurut para responden SDM bidang perikanan memang masih **kurang sampai dengan memadai.**

TABEL IV.12
PENDAPAT RESPONDEN SMK N.4 DAPAT
MENINGKATKAN LIFE SKILL SISWANYA

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	Ts	3	3.0	3.0	3.0
	S	68	68.0	68.0	71.0
	Ss	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber : Hasil olahan SPSS, 2009)

Salah satu untuk meningkatkan mutu SDM dalam bidang perikanan ini adalah dengan cara meningkatkan life skill (ketrampilan hidup) yang salah satunya didapat melalui pendidikan kejuruan yang berbasis perikanan. Sebanyak 58 responden (58%) menyatakan setuju, dan 18 responden (18%) menyatakan sangat setuju. Dari pendapat para responden ini memberikan pengertian bahwa pendidikan kejuruan seperti SMK Negeri 4 Perikanan ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan *life skill* SDM yang terlibat langsung dalam bidang perikanan. Baik sebagai pengusaha bidang perikanan maupun sebagai nelayan yang merupakan ujung tombak yang mengeksplor hasil laut ini.

TABEL IV.13
SMK N.4 MUTLAK DIPERLUKAN UNTUK
MENINGKATAN KETRAMPILAN YANG BERBASIS LOKAL

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sts	3	3.0	3.0	3.0
	ts	21	21.0	21.0	24.0
	s	58	58.0	58.0	82.0
	ss	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Untuk lebih melihat keberadaan sumber daya manusia dalam bidang perikanan, khususnya nelayan, dan pelaku usaha dalam bidang perikanan maka 2 instrumen berikut kiranya dapat menggambarkan tingkat keberadaan tersebut.

Berdasarkan 100 responden, sebanyak 69% menyatakan setuju, dan didukung oleh 14% menyatakan sangat setuju bahwa para nelayan yang berada di Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalpinang tidak dibekali dengan ketrampilan yang memadai di dalam melakukan profesinya sebagai nelayan. Hal ini tentunya akan berpengaruh dengan besarnya pendapatan yang mereka miliki, karena mereka tidak menggunakan kemampuannya secara maksimal di dalam menggali potensi perikanan di kedua wilayah ini. (lihat TABEL 5 lampiran)

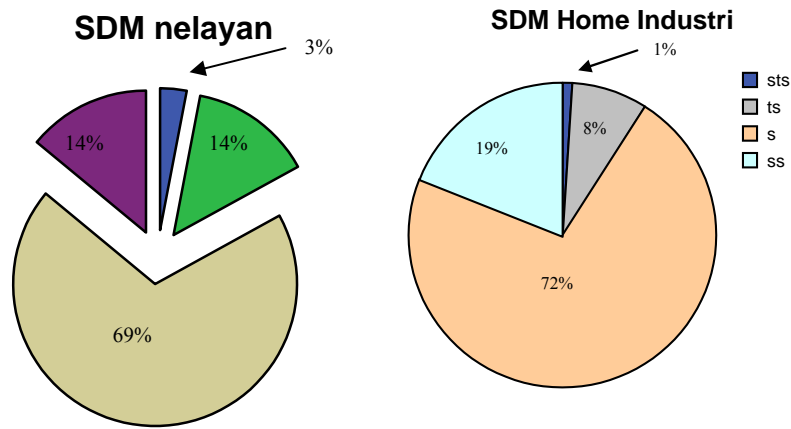
TABEL IV.14
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGARUH KETRAMPILAN
PENGUSAHA PERIKANAN TERHADAP PRODUKSI
DI 2 KECAMATAN PENELITIAN INI

		Frequen cy	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sts	1	1.0	1.0	1.0
	ts	8	8.0	8.0	9.0
	s	72	72.0	72.0	81.0
	ss	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Begitu juga dengan pelaku usaha dalam bidang perikanan baik skala industri rumah tangga maupun skala kecil sampai menengah bagi dunia industri seperti pembekuan ikan (*Cold Storage*) memerlukan SDM yang handal baik dalam manajemennya maupun dalam pemasarannya. Jadi kemajuan usahanya sangat dapat dipengaruhi oleh keberadaan SDM dalam sistim pengelolaannya. Sebanyak 72 responden (72%) menyatakan setuju dengan dukungan 19 responden (19%) menyatakan sangat setuju dimana keterbatasan produksi, dan pemasaran dalam industri pengelolaan perikanan dikarenakan kurang SDM yang profesional dalam bidang perikanan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK), indikasinya semakin besar APK tersebut semakin banyak anak pada usia 16-18 tahun (khusus untuk SMA/ MA, dan SMK) yang bersekolah di wilayah tersebut. Jika APK untuk SMK/ SMA/ MA mencapai 100% berarti semua penduduk yang berusia 16-18 tahun di

wilayah tersebut telah bersekolah. Dari 100 responden yang dimintakan pendapatnya untuk masalah ini.



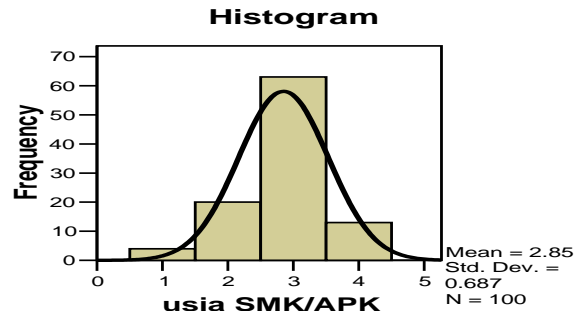
(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

GAMBAR 4.3
DIAGRAM PIE KEADAAN SDM NELAYAN
DAN HOME INDUSTRI

Jika dilihat dari APK yang terjadi saat ini di Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam, sebanyak 63 responden (63%) menyatakan setuju bahwa masih ada anak usia 16-18 tahun di dua Kecamatan ini yang belum menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah seperti SMA/ SMK atau MA. Hal ini didukung oleh 13% menyatakan sangat setuju. Sebanyak 20 responden (20%) menyatakan tidak setuju, dan sisanya 4% menyatakan sangat tidak setuju.

Jadi dari satu sisi SMK Negeri 4 Perikanan yang berada di Kecamatan Bukit Intan, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pangkalbalam masih kekurangan siswa, tetapi dari sisi lain masih ada penduduk usia 16-18 tahun di daerah ini yang

tidak bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah, SMA/ SMK atau MA



(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

GAMBAR 4.4
GRAFIK PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP
PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN YANG TIDAK BERSEKOLAH
DI WILAYAH PENELITIAN

4.2. Analisis Keadaan Pendidikan, dan Kebijakannya

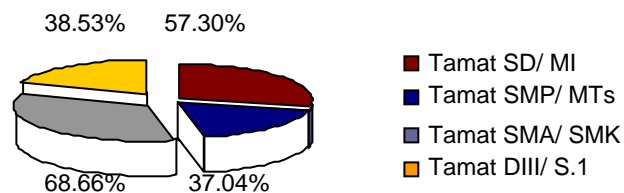
Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang salah satunya adalah kebijakan Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing maka ada tiga hal yang harus dilakukan dalam satu kebijakan yaitu (1) pendidikan itu harus menghasilkan adanya peningkatan mutu lulusannya, (2) setiap lulusan tersebut harus mempunyai kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, seperti yang diisyaratkan dalam perencanaan pendidikan dengan pendekatan ketenagakerjaan dimana standar kompetensi merupakan salah satu kriteria unjuk kerja yang harus diperlihatkan dalam dunia industri, (3) tingkat relevansi yang tinggi akan mampu meningkatkan daya saing lulusan sehingga nilai keekonomiannya makin tinggi, dan akan meningkatkan daya serap setiap lulusan di dunia industri khususnya bagi lulusan

SMK. Kerangka kebijakan tersebut dapat dilihat pada GAMBAR 1 pada lampiran

4.2.1 Tenaga Kerja Tamatan SMA/ SMK

Menurut data yang penulis dapatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, ternyata tamatan SMA/ SMK merupakan pencari kerja terbesar 68,66%, sedangkan tamatan SMP/ MTs merupakan pencari kerja yang paling kecil. Data di bawah ini mengindikasikan bahwa lulusan SMA/ SMK merupakan penyumbang terbesar dari cikal bakal pengangguran di Kota Pangkalpinang. Secara implisit data tersebut memberikan gambaran bahwa ketidakberdayaan tamatan SMA/ SMK yang di dalamnya terdapat SMK Negeri 4 Perikanan untuk membuka peluang kerja.

Data Pencari Kerja



(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2009)

GAMBAR 4.5
DATA PENCARI KERJA TAHUN 2007
DI KOTA PANGKALPINANG

Hal ini menunjukkan kompetensi, dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh tamatan SMK ini masih rendah.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk menekan angkatan kerja ini antara lain menyelenggarakan pendidikan ketrampilan, dan program wira usaha mandiri khususnya home industri. Pendidikan ketrampilan yang selama ini telah dilakukan adalah untuk usaha menjahit, tata rias, elektronika, dan industri listrik. Artinya untuk ketrampilan bidang perikanan belum termasuk ketrampilan yang dipersiapkan.

4.2.2 Keadaan SDM (Guru, dan Siswa) di SMK Negeri 4

Guru merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan Propil Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, di Kecamatan Bukit Intan yang memiliki 4 SMK, perbandingan guru SMK yang layak mengajar 52,51%; semi layak 30,22%, dan tidak layak mengajar 17,27% di Kecamatan Bukit Intan tahun 2007 artinya masih cukup tinggi guru yang tidak layak, dan guru yang semi layak mengajar untuk SMK termasuk di dalamnya terdapat SMK Negeri 4 Perikanan.

Khusus untuk guru mata pelajaran produktif, masih ada guru yang kompetensinya kurang tepat dengan bidang keahliannya. Jalan keluarnya adalah guru tersebut ditngkatkan kompetensinya sesuai dengan bidang keahlian mata pelajaran yang diajarkannya diklat, magang, pelatihan di DUDI, maupun di P4TK Cianjur, dan instansi terkait (hasil wawancara dengan kepala SMK Negeri 4 Perikanan). Secara umum keadaan guru, dan fasilitas yang ada di SMK Negeri 4 dapat dilihat melalui TABEL IV.15 di bawah ini. Jumlah guru yang diperlukan **pada**

kompetensi kejuruan perikanan tidak memadai, karena hanya dapat memenuhi 25%, (dua dari delapan) guru yang butuhkan artinya masih kekurangan tenaga guru yang terampil dalam bidang perikanan.

TABEL IV.15
KEADAAN KUALIFIKASI GURU DI SMK NEGERI 4

No	Kualifikasi Pend.	Jlh	Keterangan
1.	DIII Pendidikan / Umum	9 org	Mengajar pada MP umum Dan Penunjang
2.	ANT sertifikat (ahli madya neutika)	2 org	MP Khusus keahlian Pelayaran, dan perikanan (yg dibutuhkan 8 orang)
3.	S.1 Pendidikan / umum	15 org	Mengajar pada MP umum, penunjang, dan diperbantukan pada MP keahlian

(Sumber: SMK Negeri 4 Perikanan. 2007)

Berdasarkan data pada tahun pelajaran 2007-2008 jumlah siswa yang lulus di SMK Negeri 4 Perikanan hanya 10 orang dengan jumlah siswa seluruh 135 siswa dengan jumlah siswa kelas III saat itu adalah 27 orang atau hanya 37,04% siswa yang lulus.

Rasio siswa per guru untuk SMK di Kecamatan Bukit Intan adalah 10, artinya untuk 1 guru dapat melayani 10 orang siswa. angka ini menunjukkan, dimana jumlah guru sudah memadai untuk melayani siswa-siswa yang belajar di SMK. Rasio siswa per kelas menurut jenis pendidikan khusus untuk SMK di Kecamatan Bukit Intan adalah 33, artinya rata-rata dalam 1 kelas SMK di kecamatan ini terdapat 33 siswa. Jika dirujuk pada kebijakan pendidikan sekolah menengah kejuruan, angka

ini cukup ideal dimana angka yang ideal untuk sebuah SMK dalam satu kelas paling banyak adalah 32 siswa.

Angka indikator pendidikan seperti yang ditunjukkan pada TABEL 6 pada lampiran, terlihat bahwa persentase pendidikan penduduk SMK lebih kecil (0,76) jika dibandingkan dengan persentase pendidikan penduduk SMA (0,93). Inilah gambaran bahwa minat masyarakat usia 16-18 tahun masih lebih besar berorientasi pada sekolah menengah umum dari sekolah menengah kejuruan. Sedangkan angka kepadatan penduduk terbesar pada usia pendidikan SMA/ SMK 16-18 tahun. Artinya diperlukan sejumlah sekolah menengah umum atau kejuruan untuk dapat menampung mereka. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa keberadaan SMK Negeri 4 perlu di optimalkan agar tidak terjadi angka putus sekolah pada usia tersebut.

Dalam tiga tahun terakhir jumlah siswa kelas 3, dan kelulusan 3 tahun terakhir di SMK Negeri 4 Perikanan dapat dilihat pada TABEL IV.16 berikut:

TABEL IV.16
DATA KELULUSAN SISWA SMK NEGERI 4 PERIKANAN
DALAM TIGA TAHUN

No	Uraian	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1.	Jumlah Siswa kls 3	88	41	27
2.	Lulus	62	30	13
3.	Jumlah NEM rata2	7,47	6,05	5,86

(Sumber Propil Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2008)

cenderung menurun, baik peserta ujian, jumlah kelulusan, dan jumlah nem rata-rata. Jumlah peserta ujian yang selalu menurun dapat menunjukkan jumlah siswa yang masuk pada setiap tahun

ajaran baru selalu berkurang, sedangkan jumlah siswa yang lulus, dan nem rata-rata yang selalu turun menunjukkan kualitas sekolah ini yang tidak mengembirakan. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- kurangnya sosialisasi tentang keberadaan SMK Negeri 4
- tidak adanya prestasi akademik maupun non akademik untuk tingkat kota
- lokasi yang terlalu jauh dari pusat kota, dan tidak adanya angkot yang melewati sekolah tersebut

4.2.3 APK dan APM

APK SMK adalah angka partisipasi kasar SMK yang didapatkan dari jumlah siswa SMK keseluruhan di suatu wilayah di bagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah tersebut di kali 100%, sedangkan APM SMK adalah angka partisipasi murni SMK dengan cara jumlah siswa SMK usia 16-18 tahun di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk usia SMK 16-18 tahun di wilayah yang sama di kali 100%. Semakin tinggi APK dan APM SMK/ SMA menunjukkan semakin banyak siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Jika nilai APK, dan APM melebihi 100% maka dapat dikatakan tidak ada lagi penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

TABEL IV.17
ANGKA APK, dan APM SMA, dan SMK
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007

No	Kecamatan / kota	APK SMA	APK SMK	APM SMA	APM SMK
1.	Pangkalbalam	52,35%	37,12%	24,34%	29,17%
2.	Bukit Intan	56,32%	67,01%	42,23%	52,50%
3.	Rangkui	111,29%	42,30%	79,26%	27,76%
4.	Taman Sari	32,12%	97,35%	28,72%	65,07%
5.	Gerunggang	67,84%	75,40%	43,49%	52,23%

(Sumber Propil Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 200)

Tabel di atas mengindikasikan bahwa untuk Kecamatan Pangkalbalam APK SMK-nya rendah jika dibandingkan dengan APM SMA-nya, hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya SMK di Kecamatan tersebut. Sedangkan untuk Kecamatan Bukit Intan, dan Pangkalbalam APK, dan APM-nya di bawah 100%, berarti masih ada penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik di SMA maupun di SMK, tapi disisi lain SMK Negeri 4 Perikanan yang terletak di Kecamatan Bukit Intan ini selalu kekurangan siswa pada setiap tahun pelajarannya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak usia 16-18 tahun lebih banyak memilih SMA atau SMK yang bukan jurusan perikanan di Kecamatan ini. Data yang mendukung hal ini dapat dilihat dari angka melanjutkan ke sekolah menengah di bawah ini.

Angka melanjutkan (AM) ke SMA bagi lulusan SMP/MTs yang melanjutkan pendidikannya untuk kedua Kecamatan ini selalu lebih tinggi dari angka melanjutkan ke SMK. Begitu juga untuk Kota Pangkalpinang secara keseluruhan. AM ke

SMA Kecamatan Pangkalbalam lebih tinggi dari AM ke SMA di Kecamatan Bukit Intan.

TABEL IV.18
ANGKA MELANJUTKAN (AM) KE SMA/ SMK
KOTA PANGKALPINANG

No	Kecamatan / kota	AM ke SMA	AM ke SMK
1.	Pangkalbalam	78,35 %	21,65%
2.	Bukit Intan	69,50 %	30,50%
3.	Kota Pkpinang	65,22 %	34,78%

(Sumber Propil Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2008)

Salah satu faktornya adalah ketidakberadaan SMK di Kecamatan ini. Jadi siswa tamatan SMP/ MTs di kedua kecamatan ini atau di Kota Pangkalpinang lebih tertarik pada sekolah menengah umum jika dibandingkan dengan sekolah menengah kejuruan. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, untuk meningkatkan minat siswa ke SMK Negeri 4 Perikanan adalah dengan cara memperluas *net working* (jaringan kerjasama) dengan dunia usaha, dan dunia industri bidang perikanan, pimpinan sekolahnya harus mempunyai jiwa kewirausahaan untuk menjalin kerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kota Pangkalpinang, khususnya di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan.

4.2.4 Fasilitas Penunjang Pembelajaran

Dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar, fasilitas penunjang pembelajaran yang ada dalam suatu sekolah tentunya sangat mempengaruhi mutu proses belajar mengajar. Menurut kepala SMK Negeri 4 Perikanan fasilitas di sekolahnya

pada umumnya sudah relevan, dan memadai, tapi secara bertahap fasilitas tersebut terus dilakukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitasnya terutama untuk kapal tangkap, dan alat-alat praktek THP. Fasilitas alat praktek ini diharapkan sesuai dengan standar dunia industri khususnya industri perikanan. Dari TABEL 7 pada lampiran dapat diketahui fasilitas yang telah tersedia seperti ruang praktek, lab, ruang komputer, dan kelengkapannya, dan lain-lain telah tersedia, namun perlu peningkatan dari segi kualitas. Pernyataan ini disampaikan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Dilihat dari macamnya maka untuk jumlah siswa yang tidak terlalu besar, fasilitas di atas sudah dapat dikatakan cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar.

4.2.5 Program Pengembangannya Kurikulum SMK

Salah satu pengembangan kurikulum SMK yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan SMK (Dit PSMK) adalah menerapkan konsep *Teaching* Industri, yaitu suatu konsep *share* sumber daya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia demi mencapai kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh banyak pihak dalam berbagai sektor. *Teaching* Industri SMK, mengajak kepada semua industri membantu Direktorat Pendidikan SMK (Dit PSMK) menciptakan SDM SMK yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif, dengan membuat proses industri berlangsung di SMK, melibatkan unsur SDM SMK (terutama siswa) sebagai sarana praktek real bagi siswa, menggunakan sarana-lahan-anggaran praktek SMK untuk membuat produk

industri real (motor, komputer, laptop, perikanan, *engine*, ukiran, batik dll) yang siap dipasarkan. dengan Pengembangan Program *Teaching* Industri ini. Manfaat (*benefit*) yang dapat diambil adalah:

1. Bagi SMK: Dapat diperoleh lulusan SMK yang benar-benar sudah pengalaman industrireal, sehingga benar-benar siap kerja, cerdas,, dan kompetitif.
2. Bagi industri: dapat biaya ongkos produksi murah dengan tetap terjaga kualitas karena proses produksinya merupakan bagian dari pembelajaran yang terawasi kualitasnya.
3. Dengan pemanfaatan bersama antara fungsi pendidikan dengan fungsi industri, terjadi efisiensi sumber daya yang cukup besar, yang salah satu keuntungan besarnya adalah dapat menciptakan produk dengan harga murah.

Dit. PSMK bahkan siap mengalokasikan anggaran untuk memenuhi standar peralatan, dan ruang yang dibutuhkan oleh industri untuk memanufaktur suatu produk,, dan juga alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sesuai yang dipersyaratkan industri. Tentunya industri minta guru, dan siswanya yang kualitas agar bisa terjadi proses produksi yang efektif, dan efisien untuk menciptakan produk yang berkualitas sesuai yang dipersyaratkan. Tugas institusi SMK untuk membuat SDM menjadi berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan industri walaupun tidak bisa sampai 100%. Pihak industri tentunya punya kualifikasi/ kriteria SDM yang bisa menjalankan proses produksi/ industrinya terkait produk yang akan dihasilkan. Dari kualifikasi

itu, diturunkan (*breakdown*) kedalam Kurikulum yang ada sebagai konsentrasi pengayaan keahlian untuk peningkatan kualitas siswa SMK. Kurikulum sekarang adalah kurikulum berbasis satuan pendidikan dimana masing-masing SMK bisa menambahkan penekanan/ konsentrasi sesuai yang diperlukan.

Salah satu program untuk melatih kompetensi siswa SMK adalah PSG (Pendidikan Sistim Ganda) Data berikut memberikan gambaran bahwa jumlah yang lulus dari siswa SMK Negeri 4 yang mengikuti PSG sangat rendah. Hal ini akan berdampak pada minat DUDI untuk merekrut tamatan SMK ini.

TABEL IV.19
DATA PERSENTASE KEGIATAN PSG SMK
KOTA PANGKALPINANG

No	Nama SMK	Kecamatan	% Yang Lulus
1.	SMK N.1 BM	Taman Sari	98,02
2.	SMK N2 TEKNOLOGI	Gerunggang	91,10
3.	SMK N3 PARAWISATA	Bukit Intan	96,48
4	SMK N.4 PERIKANAN	Bukit Intan	83,26

(Sumber hasil olahan sendiri dari berbagai sumber, 2009)

Menurut Kepala SMK Negeri 4 Pangkalpinang, Pendidikan Sistim Ganda (PSG) bertujuan untuk melatih sekaligus menguji kompetensi siswa secara langsung ditempat industri yang relevan dengan jurusan siswa tersebut (hasil wawancara dengan Kepala SMK Negeri 4). Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut di atas antara lain:

- kurikulum pengembangannya yang kurang sesuai dengan permintaan pasar kerja di DUDI pada bidang tertentu termasuk jurusan NPL, dan THP

- fasilitas penunjang praktek yang kurang sesuai dengan kebutuhan DUDI
- minat kewirausahaan siswa yang rendah

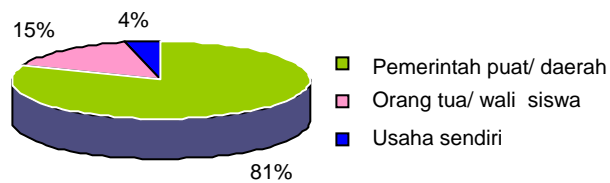
4.2.6 Pembiayaan Pendidikan

Unsur yang sangat penting dalam menjalankan suatu proses belajar mengajar pada suatu sekolah adalah pembiayaannya. Dalam banyak hal, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka semakin baik mutu/ proses yang dihasilkan. SMK Negeri 4. Perikanan ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolahnya, maka sumber pembiayaan sekolah ini berasal dari (1) pemerintah pusat/ daerah, (2) orang tua siswa, dan (3) usaha sendiri.

Jika mengacu pada jiwa kemandirian usaha yang harus dirintis oleh sebuah SMK untuk membentuk jiwa kewirausahaannya, maka SMK Negeri 4 ini belum dapat dikatakan menjalankan misi tersebut. Hal ini terlihat bahwa pembiayaan sekolah ini sangat tergantung dari pemerintah pusat, dan daerah. Kontribusi biaya yang dibebankan pada orang tua siswa cukup rendah yaitu hanya 15%, kondisi ini dapat saja mempengaruhi mutu sekolah, karena sekolah tidak merasa bertanggungjawab terhadap orang tua siswa yang memang kontribusi dalam hal pembiayaan tergolong rendah. Jiwa kewirausahaan sekolah ini juga perlu dikembangkan, soalnya hanya 4%, dana yang masuk yang bersumber dari usaha sendiri, yaitu hasil dari pengolahan hasil perikanan menjadi makanan jadi seperti pempek, kemplang, dan lain-lain. Inilah yang harus

disikapi oleh kepala sekolah untuk meningkatkan semangat kewirausahaan agar mereka merasa tuan rumah dirumahnya sendiri..

Sumber Pembiayaan di SMK Negeri 4



(Sumber SMK Negeri 4 Perikanan, 2009)

GAMBAR 4.6
SUMBER PEMBIAYAAN
SMK NEGERI 4 PERIKANAN

Pengaruh penghasilan orang tua/ wali siswa cukup mendukung dari segi kemampuan pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 4 Perikanan. Lebih dari 73% orang tua siswa bermatapencapaian buruh atau pekerjaan serabutan lainnya, 5,49% bermata perncaharian nelayan atau pelaku usaha perikanan, dan selebihnya 21,43% sebagai PNS/ TNI/ Pegawai swasta. Jika dilihat dari latar belakang pekerjaan/ profesi orang tua siswa, maka angka 5,49% yang bermatapencapaian sebagai nelayan atau pelaku usaha dalam bidang perikanan mengindikasikan kecilnya kontribusi yang dapat mendukung potensi perikanan yang bersifat penguatan sektor ekonomi keluarga. Artinya jika jumlah rumah tangga nelayan, dan pelaku

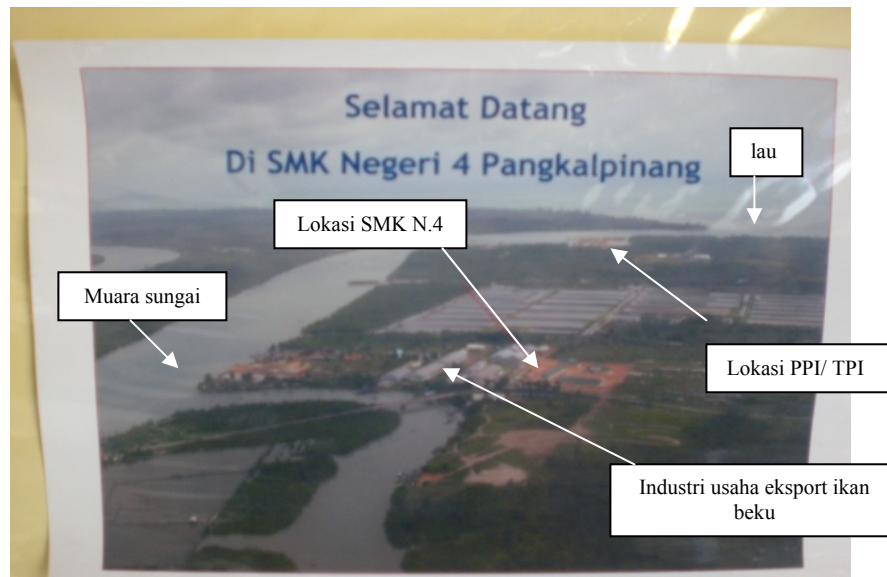
usaha bidang perikanan di dua kecamatan ini adalah 541 keluarga (database Perikanan Tangkap, 2007), maka hanya 30 keluarga yang menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 4 Perikanan.

TABEL IV.20
KEADAAN PEKERJAAN ORANG TUA SISWA
SMK NEGERI 4 PERIKANAN

No	Pekerjaan	%tase
1.	PNS/ TNI/ Peg. Swasta	21,43 %
2.	Nelayan atau pelaku usaha perikanan	5,49 %
3.	Buruh atau pekerjaan serabutan lainnya	73,08 %

(Sumber SMK Negeri 4 Perikanan, 2009)

4.2.7. Lokasi SMK Negeri 4 Perikanan



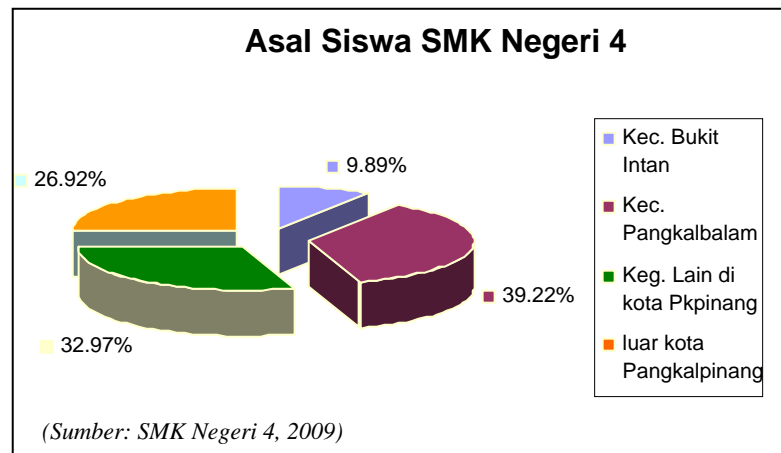
(Sumber: Dok. SMK N.4)

GAMBAR 4.7
POSISI SMK N.4 DISEKITAR MUARA SUNGAI, dan
KAWASAN INDUSTRI KETAPANG

Jika ditinjau dari segi keruangan, lokasi SMK Negeri 4 Perikanan sangat sesuai, dan cocok dengan keadaan potensi lokal di kedua Kecamatan yang menjadi

daerah penelitian, karena berada di sekitar muara sungai Batu Rusa, dekat dengan kawasan industri ketapang, bersebelahan dengan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tambak budi daya perikanan, dan induastri pengolahan hasil perikanan (GAMBAR 4.7 di atas) didukung dengan jalan arteri sekunder yang sangat memadai (hasil wawancara dengan kepala sekolah).

Lain halnya dengan kondisi *real* asal siswa yang bersekolah di SMK tersebut. Ditinjau dari asal kota/ daerah siswa yang bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan, sebagian besar malah berasal dari Kecamatan Pangkalbalam, 39,22%. Sedangkan yang berasal dari Kecamatan Bukit Intan 9,89% lebih kecil siswa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang, 26,92%. sisanya, 32,97% siswa berasal dari kecamatan lain di Kota Pangkalpinang



GAMBAR 4.8
KEADAAN ASAL USUSL SISWA
SMK NEGERI 4 PERIKANAN

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun lokasi SMK Negeri 4 Perikanan ini di Kecamatan Bukit Intan tetapi minat siswa tamatan SMP/ MTs di Kecamatan ini untuk bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan itu sangat minim, namun sebaliknya siswa-siswa tamatan SMP/ MTs yang berasal dari Kecamatan Pangkalbalam merupakan jumlah terbesar sebagai siswa SMK Negeri 4 Perikanan. Hal ini terjadi karena lokasi sekolah ini walaupun berada di Kecamatan Bukit Intan tepatnya di Kelurahan Air Itam, tetapi lebih dekat dengan pemukiman masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam, yaitu sekitar 1,5 km dari pemukiman penduduk. Sedangkan jika diukur dari pusat pemukiman terdekat kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan lokasi sekolah ini berjarak 7,5 km.

4.2.8 Kerja Sama SMK N 4 dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

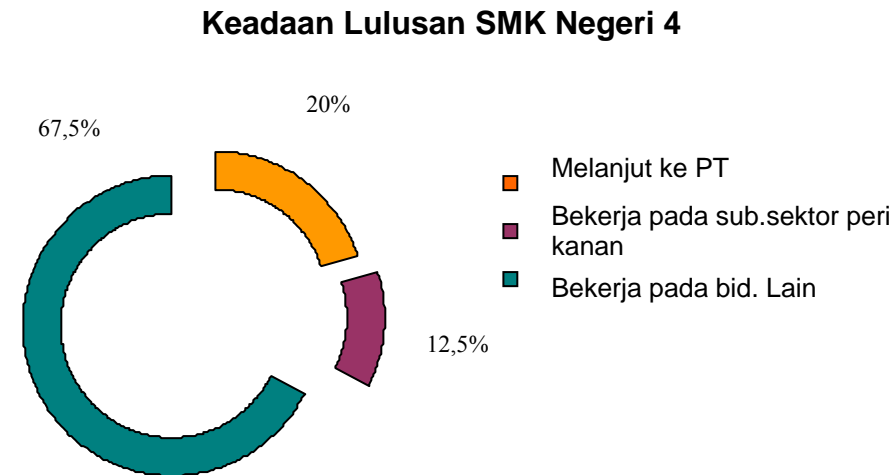
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh tingkat manajemen SMK Negeri 4 Perikanan adalah mutu lulusannya. Orientasi lulusan siswa SMK ini adalah lebih ditekankan untuk siap kerja sebagai tenaga ahli madya (arah kebijakan Direktorat SMK), oleh karena itu program-program yang melekat pada SMK ini seperti PSG, Prakerin, vokasional, dan lain-lain selalu di arahkan pada peningkatan kompetensi siswa untuk memasuki dunia kerja pada bidangnya masing-masing. Semakin tinggi tingkat ketrampilan siswa tersebut, dan sesuai dengan permintaan pasar kerja maka semakin tinggi daya serap lulusan SMK ini untuk diterima sebagai tenaga kerja ahli madya. Untuk mengembangkan pencitraan sekolah ini, dan sekaligus ”menjual” kompetensi peserta didiknya, maka pihak sekolah telah melakukan kerja sama dengan DUDI. Sampai dengan tahun 2007 sudah terdapat 18 mitra kerja sama dalam bidang Neutika Perikanan Laut (NPL) yang berasal dari:

- a. Propinsi Jawa Tengah; KUD ”Sarono Mino Pati”, DKP Kab. Batang, Pangujuban Pursaine, Kab. Pati;
- b. Prop. Kep Riau; PT Pulau Mas Moro Mulia
- c. Prov. DKI Jakarta; PT. Khom Food, PT Harian Jaya
- d. Prov. Bali; PT Bali Nusa Window Mas, dan PPTK Perikanan ”Kintamani”
- e. Prov. Sumsel; UPTD LPPMHP DKP
- f. Prov. Jawa Barat; PT Mina Jaya Bahari

g. Prop. Kep. Babel; PT Cahaya Laut Bintang Abadi Pkpinang, TPI kab. Bangka, TPI/ PPU Kab. Bangka Tengah, CV. Sri Rodens Kota Pkpinang, PT Sukamindo Indo Jaya. BBI DKP Kota Pangkalpinang

Hal ini menunjukkan bahwa SMK ini telah membangun jejaring kerja sama dengan pihak DUDI bidang perikanan di 6 propvinsi.

4.2.9 Keadaan Lulusan SMK Negeri 4



(Sumber SMK Negeri 4 Perikanan,

GAMBAR 4.9
KEADAAN LULUSAN SMK N.4

Pendidikan kejuruan seperti SMK Negeri 4 Perikanan ini pada prinsipnya adalah pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja baik sebagai pengisi lowongan kerja yang ada, dan sesuai maupun yang menciptakan lapangan pekerjaan. Sesuai dengan kebijakan mutu, relevansi, dan daya saing maka lembaga pendidikan seperti SMK Negeri 4 ini mempunyai peran ganda,

yaitu (1) menjalankan pendidikan dengan pendekatan sosial , dan (2) menjadikan lulusannya berorientasi pada pendekatan ketenagakerjaan. Artinya setiap siswa lulusannya harus mampu mempunyai ketrampilan menengah dalam bidang perikanan.

Pada kenyataannya saat ini lulusan SMK Negeri 4 Perikanan terbesar bekerja pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan bidang perikanan (THP dan NPL) yaitu sebesar 67,5%. Hanya 12,5% saja yang bekerja pada bidang perikanan, dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebesar 20%. Dilihat dari segi misi pendirian SMK ini maka dapat di katakan bahwa SMK Negeri 4 Perikanan ini belum mampu menghasilkan SDM–SDM yang dapat meningkatkan nilai keekonomian potensi lokal di daerahnya.

4.3. Analisis Kebijakan Dalam Bidang Perikana dan Keadaan SDM-nya

4.3.1 Indikasi Potensi Lokal Perikanan

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang, sektor perikanan, dan kelautan masih merupakan sektor unggulan, hal ini di karenakan sebagian wilayah Kota Pangkalpinang merupakan wilayah pesisir dengan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan. Kecamatan Pangkalbalam, Bukit Intan, dan Rangkui merupakan 3 Kecamatan dari 5 Kecamatan yang merupakan wilayah pesisir terbesar di Kota Pangkalpinang.

Hal-hal yang dapat menguatkan fakta tersebut di atas adalah dari data PDRB berdasarkan lapangan usaha pada tahun

2006 seperti yang ditunjukkan pada TABEL 8 lampiran. Lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai PDRB 22,8%, sedangkan sektor pertanian berada pada urutan ke tiga dengan kontribusi PDRB 16,0%. Hal ini dapat dikatakan adanya peluang untuk mengembangkan sektor pertanian yang di dalamnya terdapat sub sektor perikanan.

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam ukuran kesejahteraan ini adalah pendapatan perkapita. Dalam kenyataan, pendapatan perkapita masyarakat diukur dengan banyak produksi, salah satunya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per jumlah penduduk. PDRB sendiri merupakan suatu ukuran aktivitas perekonomian di suatu daerah, yaitu penjumlahan dari produk, dan jasa final di suatu daerah. Pengukuran PDRB dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu **(1) pendekatan produksi (nilai tambah), (2) pendekatan pengeluaran, serta (3) pendekatan pendapatan**. Untuk kasus Pangkalpinang, seperti halnya kabupaten/ kota lain di Indonesia, PDRB hanya dicatat dengan **pendekatan produksi**. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka PDRB dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

TABEL 9 pada lampiran, menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam periode 4 tahun terakhir menunjukkan gejala penurunan sumbangan terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang. Kondisi ini mendukung teori tentang transformasi struktural dimana dengan terjadinya perkembangan perekonomian diikuti dengan ciri penurunan kontribusi sektor

pertanian. Karena sifat dari sektor pertanian yang (merupakan sektor primer, gejala penurunan ini pun diikuti dengan konversi lahan pertanian yang berubah peruntukkannya misalnya untuk perumahan, dan perkantoran.

Selain itu, sumbangan sektor industri terhadap perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang relatif meningkat sejak periode 2004–2006. Peningkatan kontribusi sektor industri menjadi penting mengingat sektor industri akan memberikan efek ganda (*multiplier*) dalam perekonomian yang cukup besar termasuk pada sektor tersier yang merupakan perekonomian perkotaan. Kota Pangkalpinang juga memperlihatkan peningkatan porsi kegiatan sektor tersier seperti sektor perdagangan, dan subsektor komunikasi. Untuk sub sektor perikanan distribusi kegiatan perekonomian Pangkalpinang selama tahun 2003 sampai dengan 2006 merupakan angka yang terbesar di antara sub. Sektor yang lainnya pada sektor perikanan bahkan lebih besar dari sektor-sektor lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada TABEL 11 pada lampiran.

kecil daripada satu. Hasil perhitungan indeks LQ Kota Pangkalpinang dengan perbandingan nasional, dapat ditunjukkan pada TABEL IV.21 berikut. Dari nilai L-Q pada tabel berikut jelas untuk sub sektor perikanan jauh lebih dari satu, sedangkan untuk sub sektor lainnya (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, dan hasil-hasilnya, dan kehutanan) jauh di bawah satu. Sub sektor perikanan ini menjadikan sektor pertanian merupakan sektor basis. Menurut Kepala Dinas

Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan PDRB Sektoral, pada sub sektor perikanan tahun 2007 turun dari 1,13% menjadi 1,01% pada hal produksi perikanan selain sebagai konsumsi utama masyarakat juga merupakan bahan baku utama industri pengolahan seperti kricu, getas, kemplang, pempek, cumi beku yang merupakan kualitas ekspor.

TABEL IV.21
PERHITUNGAN INDEKS LQ KOTA PANGKALPINANG DENGAN
PERBANDINGAN NASIONAL, TAHUN 2004 – 2006

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	KETERANGAN
1. PERTANIAN	1.34	1.27	1.25	Basis
a. Tanaman Bahan Makanan	0.12	0.10	0.10	Non Basis
b. Tanaman Perkebunan	0.03	0.03	0.03	Non Basis
c. Peternakan, dan Hasil-hasilnya	0.51	0.49	0.49	Non Basis
d. Kehutanan	-	-	-	Non Basis
e. Perikanan	8.53	7.82	7.56	Basis
2. PERTAMBANGAN & PENGGAJIAN	-	-	-	Non Basis
a. Minyak, dan Gas Bumi	-	-	-	Non Basis
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	Non Basis
c. Penggalian	-	-	-	Non Basis
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	0.37	0.44	0.45	Non Basis
a. Industri Migas	-	-	-	Non Basis
b. Industri tanpa Migas	0.42	0.50	0.51	Non Basis
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2.00	1.94	1.97	Basis
5. BANGUNAN	1.41	1.38	1.38	Basis
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1.29	1.22	1.20	Basis

(Sumber; LPEM UI, 2007)

Hal ini disebabkan antara lain:

1. tingginya biaya operasional menyangkut pembelian bahan bakar, dan es balok

2. kurangnya daya beli masyarakat karena pada saat itu komoditi utama masyarakat Bangka berupa lada dan timah menurun di pasaran dunia
3. kurangnya sarana alat tangkap nelayan, dan minimnya pengetahuan mereka

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan sub sektor perikanan ini menjadi sektor basis oleh Dinas Perikanan, dan Kelautan Kota Pangkalpinang antara lain:

- a.memprogram peningkatan sarana, dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan melengkapi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang
- b.melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan, pemanfaatan pengawasan, dan pengambilan sumber daya pesisir, baik sumber daya hayati maupun non hayati
- c.melaksanakan program pemberdayaan nelayan, dan masyarakat pesisir
- d.melaksanakan program peningkatan mutu, dan nilai tambah hasil perikanan
- e.melaksanakan program pengembangan usaha perikanan tangkap.

Untuk meningkatkan ketrampilan nelayan, telah dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

- a. pelatihan budi daya ikan air tawar
- b. pelatihan pembenihan, dan pemijahan ikan
- c. pelatihan pengelolaan hasil perikanan
- d. melaksanakan studi banding keluar daerah

- e. melaksanakan penyuluhan
- f. melaksanakan bimbingan penggunaan teknologi penangkapan



GAMBAR 4.10
PERSIAPAN ES BALOK UNTUK NELAYAN MELAUT DI PPI
KETAPANG KEC. PANGKALBALAM

Dalam bidang usaha perikanan, dan pengelolaan hasil tangkapan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan antara lain:

- a. terbatasnya sarana penangkapan ikan , dan belum maksimalnya fungsi Laboratorium Pembinaan, dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- b. kesadaran nelayan untuk menjaga mutu ikan masih sangat kurang
- c. terbatasnya pemodalan nelayan

- d. kapal yang digunakan nelayan masih kecil-kecil sehingga tidak mampu menangkap ikan lebih ke tengah daerah penangkapan



GAMBAR 4.11
GEDUNG LPPMHP BANTUAN PROV. KEP. BABEL
DI PPI KETAPANG

4.3.2 Sarana, dan Prasarana Perikanan

Fasilitas-fasilitas yang mendukung pembangunan perikanan laut, dan perikanan umum yang telah dibangun antara lain:

- a. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut oleh BUMN, BUMD, BHI, dan perorangan yang terdiri dari:
 - fasilitas pemasaran: Gedung TPI (Tempat pelelangan ikan), dan peralatannya

- fasilitas BBM: SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) PPI
muara sungai Baturusa kelurahan Ketapang
- fasilitas pengolahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- fasilitas lahan untuk kawasan industri perikanan seluas 70 Ha disekitar pantai pasir padi Kecamatan Bukit Intan, dan Pelabuhan Pangkalbalam di Kecamatan Pangkalbalam
- fasilitas listrik genset, dan jaringannya
- fasilitas pendingin, cold stroge, gedung SHI Pabrik es
- fasilitas lainnya seperti: dok/ slipwa, dan *processing/* pengolahan

b. Fasilitas Penunjang, adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum yang terdiri dari:

- kios bahan perbekalan, dan alat perikanan
- tempat ibadah
- warung makan/ kopi di sekitar PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

Selain hal di atas, jumlah armada nelayan yang menyangkut kapal motor, perahu dengan kapal motor, dan perahu tanpa kapal motor sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 meningkat cukup tajam walaupun jumlah nelayannya relatif tetap.

TABEL IV.22
JUMLAH ARMADA, dan NELAYAN DI KECAMATAN
BUKIT INTAN, dan PANGKALBALAM

No	Tahun	Jumlah nelayan	Jlh Armada
1	2005	3.447	378
2	2006	3.459	484
3	2007	3.461	633

(Sumber Data base Perikanan Tangkap, 2007)

Hal ini berarti bahwa baik pemerintah maupun nelayan secara pribadi berusaha untuk menambah armada penangkapan dengan harapan dapat meningkatkan hasil tangkapan.

4.3.3 Sumber Daya Manusia; Keadaan Nelayan

Untuk melihat lebih jauh sumber daya manusia dalam hal ini nelayan, maka penulis melakukan wawancara dengan para nelayan di lokasi PPI Ketapang. Secara umum pendidikan mereka hanya tamat SD, ada beberapa yang sempat mengenyam pendidikan di SMA/ SMK tetapi tidak selesai karena tidak ada biaya, dan akhirnya membantu orang tuanya melaut. Modal mereka sekali melaut berkisar Rp.700.000 s/ d Rp.1.000.000,- yang menyangkut biaya bahan bakar, es balok, dan rangsum untuk 4-6 hari di tengah laut. Rata-rata mereka menggunakan perahu bermotor yang rata-rata bukan milik sendiri, sehingga hasil melautnya harus diserahkan ke pemilik kapal.

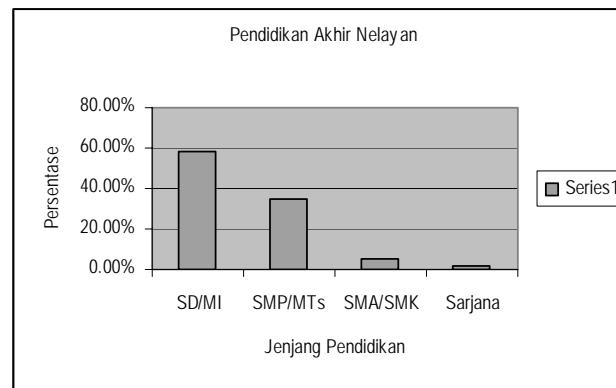
Dalam satu perahu motor berisikan 2-3 yang rata-rata merupakan satu keluarga ayah, dan anak sehingga dapat ditebak anak-anak tersebut tidak bersekolah. Ketika ditanya soal keinginan untuk menyekolahkan anaknya, mereka sangat berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya tetapi terbentur soal

biaya. Dalam sekali melaut para nelayan ini mendapatkan hasil rata-rata Rp. 300.000. Pada bulan-bulan tertentu November sampai dengan Februari terjadi musim angin barat, dimana mereka tidak dapat melaut yang berarti mereka tidak dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, disatu sisi mereka tidak mempunyai ketrampilan lain selain melaut.

Dalam usaha untuk memberdayakan keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan, usaha kerjasama antar instansi telah dilaksanakan antara lain, pengamanan BBIL (bibit benih ikan laut) beberapa MoU untuk saling kerja sama. Menurut evaluasi yang dilakukan Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang peranan SMK Negeri 4 Perikanan dalam menyiapkan SDM dalam bidang perikanan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Lulusan sekolah ini pada umumnya belum bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya dikarenakan kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- Kurangnya kreatifitas lulusan itu sendiri untuk menciptakan lapangan kerja bidang perikanan
- Terbatasnya tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya.

Profesionalisme nelayan yang ada di Kota Pangkalpinang memang sangat rendah. Dari 3.451 orang nelayan, latar belakang pendidikan mereka sebagian besar setingkat SD/ MI, dan setingkat SMP/ MTs. Seperti tergambar pada diagram berikut:



(Sumber: Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang, 2009)

GAMBAR 4.12
PENDIDIKAN NELAYAN DI KOTA PANGKALPINANG

SD/ MI hampir mendekati angka 60%, yaitu sebesar 58,56%, pendidikan SMP/ MTs 34,77 %, sedangkan SMA dan SMK 5,23%, dan sisanya sarjana 1,43%. Jika usia nelayan ini rata-rata 30-50 tahun berarti sebelum adanya SMK ini mereka telah menggeluti profesi sebagai nelayan. Harapannya dengan adanya SMK Perikanan ini para orang tua peserta didik yang berprofesi sebagai nelayan mendapatkan masukan ilmu terapan yang melekat pada kompetensi putra putrinya sehingga nilai ekonomi usaha terus meningkat.

Dari beberapa hal yang digambarkan di atas terlihat bahwa adanya usaha yang serius dari pihak pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus meningkatkan potensi unggulan perikanan ini. Keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan ini belum lah memberikan kontribusi yang banyak, tetapi peranan lembaga ini terus diupayakan untuk dapat meningkatkan nilai ekonomis perikanan di Kota Bangkalpinang.

4.4. Analisis Kebutuhan Stake Holder Terhadap Pendidikan Kejuruan

Di dalam melakukan analisis kuantitatif kebutuhan *stake holder* terhadap pendidikan kejuruan penulis memanfaatkan fasilitas SPSS versi 11.

4.4.1. Kondisi Responden Secara Umum

Dari 100 responden yang dibagikan kuesioner terdiri 69 orang laki-laki, dan 31 orang perempuan.

TABEL IV.23
JENIS KELAMIN RESPONDEN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perempuan	31	31.0	31.0	31.0
laki-laki	69	69.0	69.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber hasil olahan SPSS, 2009)

Usia mereka sebagian besar 31-40 tahun yaitu 37% sedangkan usia di atas 50 tahun. merupakan responden paling sedikit yaitu 15%. Hal ini dilakukan agar berharap pada usia 31-40 tahun dapat memahami koesioner secara tepat, dan mereka mempunyai anak usia SMP/ MTs (13-15 tahun) yang nantinya akan masuk jenjang pendidikan sekolah menengah.

Sedangkan untuk usia responden 41-50 tahun diharapkan mereka mempunyai anak usia 16-18 tahun yang sedang duduk di sekolah menengah, terutama sekolah menengah kejuruan. Untuk usia di atas 50 tahun diharapkan responden ini lebih banyak

pengetahuuan tentang potensi lokal maupun pendidikan kejuruan perikanan di dua Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan.

TABEL IV.24
USIA RESPONDEN

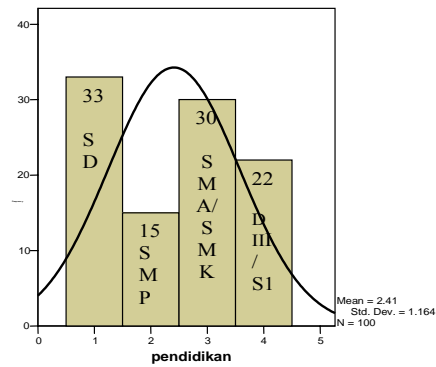
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid >50 th	15	15.0	15.0	15.0
<=30 thn	19	19.0	19.0	34.0
31-40 th	37	37.0	37.0	71.0
41-50 th	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber hasil olahan SPSS, 2009)

Sesuai dengan komposisi penduduk di dua kecamatan ini, dan merujuk pada rumus pententuan jumlah sampel maka responden di Kecamatan Bukit Intan sebanyak 54 jiwa sedangkan di Kecamatan Pangkalbalam 46 jiwa (GAMBAR 1 pada lampiran)

4.4.2 Pendidikan, Pekerjaan, dan Penghasilan Responden

Keadaan pendidikan responden dapat dikatakan menyebar rata antara tamatan SD, SMA/ SMA dengan tamatan DIII/ S.1/ S.2 yaitu bekisar 22 s/d 33% (22 s/d 33 orang) sedangkan responden tamatan SMP/ sederajat 15% (15 orang). Standar deviasi untuk pendidikan responden ini 1,164.



Sumber: hasil olahan SPSS, 2009

GAMBAR 4.13
KEADAAN PENDIDIKAN RESPONDEN

Jika dilihat dari pekerjaan para responden dimana yang berprofesi sebagai PNS/ TNI/ Pegawai lainnya paling tinggi yaitu 32 orang (32%), dan yang paling sedikit adalah yang berprofesi sebagai pengusaha bidang perikanan 15 orang (15%), yang berprofesi sebagai nelayan 24 orang (24%), dan sisanya sebagai buruh harian 29 orang (29%) berkaitan erat dengan penghasilan mereka dimana yang berpenghasilan di atas.

TABEL IV.25
PEKERJAAN RESPONDEN

		Frequ ency	Perce nt	Valid Perce nt	Cumulativ e Percent
Valid	buruh harian	29	29.0	29.0	29.0
	pns/ tni/ karydll	32	32.0	32.0	61.0
	Nelayan	24	24.0	24.0	85.0
	pengusaha bid perikanan	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber hasil olahan SPSS, 2009)

TABEL IV.26
PENDAPATAN RESPONDEN

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <1.000.000	25	25.0	25.0	25.0
1jt-2jt	41	41.0	41.0	66.0
>2jt-3jt	27	27.0	27.0	93.0
>3jt	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber hasil olahan SPSS, 2009)

3 juta hanya 7 responden (7%), dan sebagian besar berpenghasilan 1 s/d 2 juta rupiah sebesar 41% atau 41 responden. Penghasilan dibawah 1 juta rupiah masih cukup besar yaitu 25 responden (25%) terutama yang berprofesi sebagai nelayan, dan buruh harian/ buruh nelayan.

Nilai rata-rata (*mean*) antara pekerjaan, dan penghasilan sangat dekat yaitu 2,25, dan 2,16, hanya berselisih 0,09, dengan standar deviasi masing-masing 1,038, dan 0,884. (lihat TABEL 10 pada lampiran)

TABEL IV.27 berikut, *Crosstab* antara pekerjaan, dan penghasilan, dan pendapatan di bawah 1 juta rupiah didominasi oleh nelayan, yaitu sebesar 48% atau 12 responden dari 24 yang berprofesi sebagai nelayan, dan buruh harian sebesar 44% atau 11 responden dari 29 responden yang berprofesi sebagai buruh harian. Pendapatan nelayan yang lainnya adalah 1 s/ d 2 juta rupiah 12 responden, artinya pendapat para nelayan, dan buruh harian ini relatif masih sangat rendah untuk kondisi ekonomi saat

ini. Bagi pengusaha bidang perikanan pendapat mereka cukup baik, tetapi 8% pendapatan para pengusaha ini masih di bawah 1 juta rupiah, sedangkan 12,2% para pengusaha ini berpendapatan antara 1 s/d 2 juta rupiah. Jumlah Anak, dan Pendidikan anak responden

TABEL IV.27
STATISTIK CROSTAB PENGHASILAN, dan PEKERJAAN RESPONDEN

			Penghasilan				Total
			<1.000. 000	1jt-2jt	>2jt-3jt	>3jt	
Pekerjaan	Buruh harian	Count	11	13	2	3	29
		% within penghasilan	44.0%	31.7%	7.4%	42.9%	29.0%
		Std. Residual	1.4	.3	-2.1	.7	
		pns/ tni/ karydll	Count	0	11	21	0
	% within penghasilan		.0%	26.8%	77.8%	.0%	32.0%
	Std. Residual		-2.8	-.6	4.2	-1.5	
	Nelayan		Count	12	12	0	0
		% within penghasilan	48.0%	29.3%	.0%	.0%	24.0%
		Std. Residual	2.4	.7	-2.5	-1.3	
		pengusaha bid perikanan	Count	2	5	4	4
	% within penghasilan		8.0%	12.2%	14.8%	57.1%	15.0%
	Std. Residual		-.9	-.5	.0	2.9	
Total	Count		25	41	27	7	100
	% within penghasilan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
						%	

(Sumber; hasil analisis SPSS, 2009)

Dari TABEL 11 pada lampiran, terlihat bahwa 31% (31 responden) menyatakan anak-anaknya sedang mengenyam pendidikan di SMA/ SMK/ Perguruan tinggi, 29% (29 responden) sedang belajar di SD/ SMP/ SMA-SMK, dan 28% (28 responden) sedang berada di SD. Besarnya angka yang menyatakan anak para responden ini masih bersekolah pada tingkat sekolah menengah yang di dalamnya ada SMA atau SMK maka jawaban para responden tentang pendidikan menengah, dan kejuruan akan lebih valid, sedangkan yang anaknya berada di SMP akan memberikan pendapat tentang sekolah kejuruan yang ada di wilayah tersebut.

4.4.3 Kategori Biaya Pendidikan

Para responden juga memberikan yang menyatakan besar biaya pendidikan yang mereka keluarkan dalam setiap bulan seperti tabel berikut;

sebanyak 66 responden atau 66% menyatakan biaya yang mereka keluarkan termasuk cukup besar, sedangkan yang lainnya di bawah 20%. Secara jelas hubungan antara indikasi pengeluaran biaya pendidikan dengan pekerjaan responden adalah sebagai berikut;

TABEL 12 pada lampiran, memperlihatkan 55,6%, dan 33,3% responden yang berprofesi sebagai buruh harian, dan nelayan mengatakan biaya pendidikan yang mereka keluarkan selama ini sangat besar, sedangkan bagi pengusaha bidang perikanan 18,2% mengatakan biaya pendidikan relatif kecil, dan angka ini

merupakan angka terbesar untuk katagori biaya pendidikan bagi pengusaha bidang perikanan.

TABEL IV.28
KEADAAN BIAYA PENDIDIKAN RESPONDEN

		Frequen cy	Perce nt	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	Sangat besar	9	9.0	9.0	9.0
	cukup besar	66	66.0	66.0	75.0
	Kecil	11	11.0	11.0	86.0
	sangat kecil	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: hasil olahan SPSS, 2009)

Bagi PNS/ TNI/ Pegawai lainnya memberikan jawaban terbesar pada katagori biaya pendidikan cukup besar yaitu sebesar 37,9%. Secara keseluruhan factor profesi responden sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan anak-anaknya.

4.4.4 Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Lokasi Sekolah, dan Jarak Sekolah

Ketika responden ditanya tentang pendirian suatu sekolah kejuruan yang berbasis keunggulan lokal di wilayah mereka berdomisili, 65% menjawab setuju, dan 27% menjawab sangat setuju dengan nilai rata-rata (mean) 3,18 yang berarti apresiasi masyarakat terhadap keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan sangat positif. (GAMBAR 3 lampiran)

Untuk lokasi, dan jarak yang diukur dari pemukiman penduduk yang ada di dua Kecamatan ini dapat di lihat dari TABEL IV.29

Untuk lokasi hanya 5% (5 responden) yang menjawab sangat tidak tepat (stt) sedangkan sisanya menjawab cukup tepat 28%, tepat 44%, dan sangat tepat 23% dengan nilai mean-nya 2,85 yang menunjukkan lebih dari 90% memberikan apresiasi positif terhadap lokasi dibangunnya SMK Negeri 4 ini. Ketika jarak dipersoalkan apakah SMK Negeri 4 Perikanan ini terlalu jauh dari pemukiman penduduk, responden memberikan respon hampir berimbang antara kelompok setuju (termasuk sangat setuju).

TABEL IV.29
PENDAPAT RESOPONDEN TENTANG LOKASI, dan JARAK SM N.4

a. Lokasi

		Frequ ency	Perc ent	Valid Perce nt	Cumulat ive Percent
Valid	Stt	5	5.0	5.0	5.0
	Ct	28	28.0	28.0	33.0
	T	44	44.0	44.0	77.0
	St	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100. 0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

b. Jarak

		Freque ncy	Perce nt	Valid Perce nt	Cumulati ve Percent
Valid	ss	6	6.0	6.0	6.0
	s	45	45.0	45.0	51.0
	ts	40	40.0	40.0	91.0
	sts	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

dengan kelompok tidak setuju (termasuk sangat tidak setuju) yaitu dengan perbandingan 51% : 49%. *Mean* dari variabel ini adalah 2,52 yang menunjukkan pernyataan jarak SMK Negeri 4 terlalu jauh dari pemukiman penduduk tersebut berimbang.

4.4.5. Minat untuk bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan

Untuk melihat pandangan para responden mengenai keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan maka ada 7 instrument (yaitu nomor 14 s/d 17b) dimana ada beberapa pertanyaan yang memerlukan syarat kriteria khusus untuk menjawabnya, misalnya instrumen nomor 16a, hanya untuk responden yang menjawab “ya” untuk nomor 14, dan “tidak” untuk nomor 15. Hal ini berarti jumlah responden yang menjawab nomor 16a tidak mutlak 100%, tetapi jawaban mereka akan tersebar di nomor 16a, 16b, dan 16c. Demikian juga untuk nomor 17a, dan 17b. Variabel minat bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan ini, penulis urai atas beberapa sub variabel yang terdiri dari (1) usia putra/ putri responden berjenjang SMA/ SMK, (2) anak para responden yang

bersekolah di SMK Negeri 4, (3) alternatif sekolah jika tidak di SMK Negeri 4, (4) alternatif melanjutkan setelah lulus dari SMA/ SMK, dan (5) alasan untuk tidak memilih SMK N.4, serta (5) alasan memilih SMK N.4 (lihat TABEL 13 sampai dengan 19 pada lampiran).

Dari 100 responden hanya 32% (TABEL 14 lampiran) yang mempunyai anak usia 15-18 tahun, sedangkan dari 32 responden tersebut hanya 10% yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di SMK Negeri 4 tersebut (TABEL 15 lampiran), 13% bersekolah di SMA/ MA (TABEL 16 lampiran), dan 6% bersekolah di SMK yang lain. bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan ini.

Para responden yang anaknya bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan berharap anak tersebut melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sebesar 40% atau 4 orang dari 10 responden yang mempunyai anak di SMK Negeri 4 Perikanan (Perguruan Tinggi umum/ Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan perikanan), dan 40% (TABEL 17 lampiran) yang berencana untuk mencari kerja. Hal ini mengidentifikasi bahwa keinginan para responden untuk anaknya dapat bekerja setelah menamatkan pendidikan anak-anaknya di SMK Negeri 4 sangat besar. Artinya para orang tua menaruh harapan terhadap mutu SMK N.4 ini.

Untuk responden yang tidak mempunyai anak usia SMK/ SMA memberikan tanggapan 43% sangat/ sangat setuju untuk suatu saat menyekolahkan anak mereka di SMK N.4 Perikanan, dan 25% menyatakan tidak sangat setuju. Alasan untuk memilih

SMK Negeri 4 karena sekolah tersebut sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan alasan utama para responden untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya yang memberikan pendapat 43 orang, antara lain adalah tidak sesuai dengan kompetensi 15%, diterima disekolah lain 11%, jauh dari lokasi 7%, dan sisanya menjawab lain-lain 10% (TABEL 18 lampiran).

Dari 57 responden mengemukakan alasan untuk memilih SMK Negeri 4 adalah 34% dengan alasan sesuai dengan kompetensi, 14% dekat dengan kediaman, dan 6% tidak diterima di sekolah lain (TABEL 19 lampiran). Jika dihubungkan antara alasan utama tidak, dan ke SMK Negeri 4 Perikanan, alasan terbesar adalah mereka menyadari bahwa kompetensi SMK tersebut cukup sesuai 34%, daripada yang memberikan tidak sesuai yang hanya 15%. Untuk alasan jarak 14% menyatakan dekat, sedangkan 7% menyatakan jauh. Artinya alasan kompetensi, dan jarak merupakan pertimbangan utama masyarakat didalam menentukan minat ke SMK Negeri 4 ini.

Dari 100 responden yang memberikan pendapat tentang fasilitas pendidikan di SMK Negeri 4 Perikanan ini, 46% mengatakan sesuai, dan perlu ditambah, 20% sangat sesuai, dan 22% memberikan penilaian cukup berarti 86% memberikan penilaian positif. Tingginya apresiasi positif tentang fasilitas pendidikan di SMK Negeri 4 ini dapat menunjukkan tingkat fasilitas yang memadai dari yang sudah ada untuk melayani kebutuhan pembelajaran di sekolah tersebut.

TABEL IV.30
STATISTIK PERNYATAAN RESPONDEN TERHADAP
FASILITAS PENDIDIKAN DI SMK N.4

		Frequ ency	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	tidak sesuai	12	12.0	12.0	12.0
	Cukup	22	22.0	22.0	34.0
	Sesuai	46	46.0	46.0	80.0
	Sangat sesuai	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

4.4.6 Biaya, Kurikulum, dan Kebijakan Pendidikan SMK Perikanan

Untuk ketiga variabel ini pendapat responden sangat beragam, hal ini disebabkan oleh perbedaan pengalaman para responden yang anaknya bersekolah atau tidak bersekolah di SMK Negeri 4 Perikanan tersebut. Jika diperhatikan TABEL berikut Untuk biaya pendidikan di SMK Negeri 4 Perikanan 43%, dan 6% memberikan komentar bahwa biaya pendidikannya tergolong mahal, dan sangat mahal. Sedangkan yang menyebutnya murah, dan sangat murah masing-masing 44%, dan 7%, artinya pendapat mereka berimbang antara katagori murah, dan mahal.

TABEL IV.31
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN DI SMK N.4

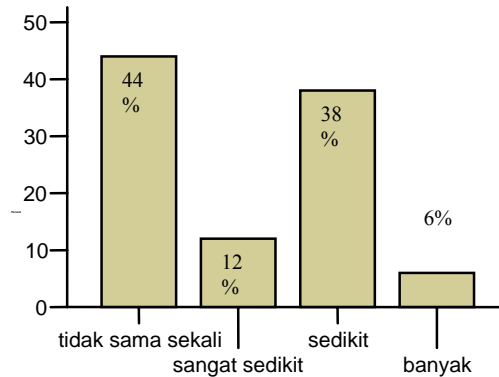
	Freque ncy	Perc ent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid sangat murah	7	7.0	7.0	7.0
Murah	44	44.0	44.0	51.0
Mahal	43	43.0	43.0	94.0
sangat mahal	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *mean* (rata-rata) untuk variabel ini adalah 2,48 yang sangat dekat dengan rata-rata ideal 2,50. Mengenai kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 4 Perikanan, nampaknya perlu dilakukan sosialisasi besar-besaran oleh pihak sekolah, hal ini terlihat bahwa hanya 6% yang mengetahui banyak tentang kurikulum ini, selebihnya masuk dalam kategori tidak tahu, paling tidak tahu dengan kadar yang sedikit. Ujung tombak dari suatu lembaga pendidikan seperti SMK ini adalah kurikulum. Karena pendirian sekolah ini berdasarkan potensi lokal di kedua Kecamatan ini, maka kurikulum yang digunakan harus mampu untuk dapat mengampu kepentingan dalam pengembangan potensi lokal perikanan di kedua kecamatan ini.

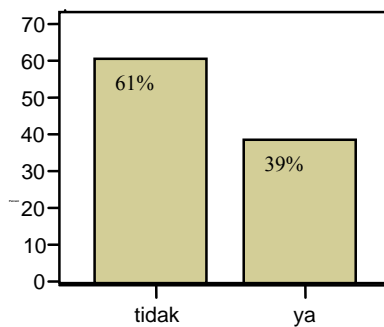
Para responden juga kiranya masih banyak yang belum mengetahui bahwa arah kebijakan pengelolaan, dan pengembangan SMA, dan SMK telah bergerak ke arah

percepatan pengembangan SMK dengan porsi SMA:SMK = 40:60. Respon itu terlihat dimana hanya 39% yang telah mengetahui kebijakan Departemen Pendidikan Nasional ini. Arah kebijakan ini akan memperkuat pencitraan pendidikan kejuruan dimana diharapkan pendidikan yang berbasis kompetensi seperti di SMK ini akan berkembang kearah mutu yang lebih baik.



Sumber: Hasil olahan SPSS,2009

GAMBAR 4.14
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KURIKULUM



Sumber: Hasil olahan SPSS,2009

GAMBAR 4.15
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEBIJAKAN SMK N 4

Nilai rata-rata untuk variabel ini adalah 1,39 yang memperlihatkan tanggapan responden condong ke arah tidak mengetahui kurikulum yang digunakan oleh sekolah ini.

TABEL IV.32
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGARUH
TIDAK ADANYA ANGKOT KE SMK N.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	12.0	12.0	12.0
sts	22	22.0	22.0	34.0
s	56	56.0	56.0	90.0
ss	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Jika dilihat dari pendapat para responden mengenai pengaruh tidak adanya angkutan kota yang melalui SMK Negeri 4 Perikanan dapat **menurunkan minat siswa** untuk bersekolah ke sana, 56%, dan 10% menyatakan setuju, dan sangat setuju. Jadi menurut responden alat transportasi sangat signifikan mempengaruhi minat seseorang untuk menuju ke tempat mereka belajar, walaupun telah tersedia jalan arteri sekunder menuju ke sekolah tersebut. Hal ini hendaknya menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mempertimbangkan tersedianya angkot pada jam-jam khusus yang melalui sekolah tersebut disiapkan/ diadakan. Terjadinya suatu pergerakan jika adanya aksesibilitas yang memadai, dan adanya alat transportasi sebagai alat angkutnya.

Keberadaan lembaga pendidikan, misalnya suatu SMK sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang selaku pen-suply kebijakan pendidikan telah berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi, seperti SMK Negeri 4 Perikanan. Harapannya tentu masyarakat dapat menyambut secara positif keberadaan SMK ini. Kenyataannya jumlah siswa yang belajar di sana selalu kurang dari kapasitas yang tersedia.

Ketika responden di tawarkan untuk menutup SMK Negeri 4 ini dengan alasan bahwa sekolah ini selalu kekurangan siswa dalam setiap tahun pelajarannya, sebanyak 58% mengatakan tidak setuju didukung lagi 27% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dengan nilai mean (rata-rata) 3,10 jauh dari nilai *mean* normal 2,50. Asumsinya masyarakat masih berharap pada sekolah ini untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap keunggulan potensi lokal diwilayah ini. (lihat GAMBAR 4 pada lampiran)

4.4.7. Motivasi Masyarakat akan Pendidikan

Untuk melihat tingkat motivasi masyarakat akan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal maka pada bagian akhir ini penulis menentukan beberapa variabel yang akan dijadikan ukuran untuk mengukur motivasinya, variabel tersebut antara lain:

- a. motivasi pendidikan kejuruan
- b. motivasi untuk meningkatkan taraf hidup
- c. harapan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan

- d. motiv akan keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan
- e. motiv kebijakan peningkatan pengelolaan, dan akses pendidikan kejuruan
- f. program pada SMK kejuruan akan mampu meningkatkan motivasi masyarakat

Untuk variabel a; para responden menjawab 36% tidak setuju dengan pendapat bahwa pendidikan kejuruan tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan pendidikan umum seperti SMA, sedangkan 15% menjawab sangat tidak setuju, jawaban ini diimbangi 41%, dan 8% setuju, dan sangat setuju dengan pendapat tersebut. Dari jawaban ini tampak bahwa bagi masyarakat pendidikan SMA, dan SMK sama pentingnya. Hal ini diperkuat oleh nilai meannya 2,42. Pendapat ini memberikan gambaran bahwa masyarakat belum banyak mengetahui bahwa pendidikan kejuruan, khususnya SMK saat ini sedang di kedepankan oleh pemerintah.

TABEL IV.33
PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP PENDIDIKAN
SMA, dan SMK

		Frequ ency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sts	15	15.0	15.0	15.0
	Ts	36	36.0	36.0	51.0
	S	41	41.0	41.0	92.0
	Ss	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

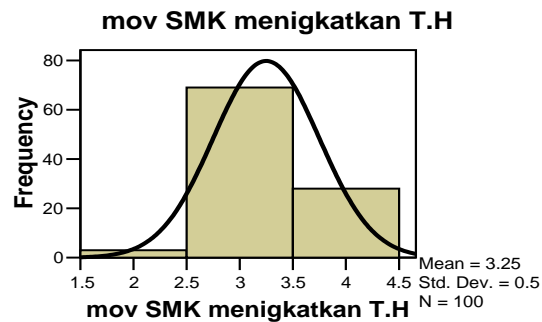
Ketika kepada responden disodorkan dengan pernyataan bahwa pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan, maka 96% menjawab setuju, dan sangat setuju berarti hanya 4 responden (4%) yang menjawab sangat tidak setuju, dan tidak setuju, nilai rata-ratanya sangat jauh dari nilai rata-rata normal yaitu 3,25 untuk skala 4. Masyarakat merasa yakin bahwa pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan mereka. (lihat TABEL 22 pada lampiran, dan TABEL IV.34 berikut)

Untuk melihat apakah pendidikan kejuruan itu, khususnya SMK Negeri 4 Perikanan dapat memberikan motivasi bagi orang tua/ wali di kedua Kecamatan yang menjadi daerah penelitian ini untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka khususnya pada bidang perikanan, maka responden memberikan 69% menyatakan setuju, dan diperkuat dengan 28% menyatakan sangat setuju tentang hal tersebut. Hal ini ditunjukkan pada GAMBAR grafik 4.15 di bawah ini. Masyarakat juga menaruh harapan pada SMK N.4 Perikanan bahwa sekolah ini dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi atau kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh DUDI. Hal ini tergambar dari 60 responden (60%) menjawab setuju, dan 34 responden (34%) menjawab sangat setuju bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya, terutama pendidikan yang mempunyai basis potensi lokal.

TABEL IV.34
PENDAPAT RESPONDEN PENTINGNYA KETRAMPILAN
UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sts	1	1.0	1.0	1.0
	Ts	3	3.0	3.0	4.0
	S	62	62.0	62.0	66.0
	Ss	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)



(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

GAMBAR 4.16
GRAFIK PENDAPAT RESPONDEN KEBERADAAN
SMK N.4 DAPAT MEMBERIKAN MOTIVASI
UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP

Sebagai sekuensi bahwa masyarakat di kedua Kecamatan ini sangat apresiatif terhadap keberadaan SMK Negeri 4 ini, maka mereka langsung dapat menilai bahwa SMK ini akan berkembang. Dari 100 responden hanya 2 responden (2%) yang menjawab tidak setuju, dan 98 responden (98%) menjawab setuju, dan sangat setuju. Nilai *mean*-nya pun sangat tinggi yaitu 3,23 untuk sekala 4 dengan standar deviasi 0,4.

TABEL IV.35
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG
SMK N.4 DAPAT BERKEMBANG

		Frequ ency	Percen t	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ts	2	2.0	2.0	2.0
	S	73	73.0	73.0	75.0
	Ss	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Bagi para responden keberadaan SMK Negeri 4 perikanan dapat meningkatkan motivasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena mereka menaruh harapan dengan ketrampilan yang dimiliki siswanya dalam bidang perikanan yang merupakan sektor basis di kecamatan tersebut.

Untuk melihat tingkat konsistensi dari masyarakat dalam hal ini responden dalam hal memberikan pendapat tentang motivasi life skill yang dapat di hasilkan oleh SMK Negeri 4 Perikanan, dan harapan untuk berkembangnya SMK ini maka dari tabel crosstab berikut:

TABEL IV.36
STATISTIK CROSSTAB MOTIVASI LIFE SKILL DENGAN
POTENSI SMK UNTUK BERKEMBANG

			mov life skill				Total
			Sts	ts	S	ss	
Poten	Ts	Count					
si							
SMK			0	0	1	1	2
N.4							
berkm							
ng							
		% within potensi					
		SMK N.4	.0%	.0%	50.0%	50.0%	100.0
		berkmng					%
		% within mov life					
		skill	.0%	.0%	1.7%	2.9%	2.0%
		Std. Residual	-.2	-.3	-.2	.4	
	S	Count	2	2	52	17	73
		% within potensi					
		SMK N.4	2.7%	2.7	71.2%	23.3%	100.0
		berkmng		%			%
		% within mov life					
		skill	100.0	50.0	86.7%	50.0%	73.0%
		%	%	%			
		Std. Residual	.4	-.5	1.2	-1.6	
	Ss	Count	0	2	7	16	25
		% within potensi					
		SMK N.4	.0%	8.0	28.0%	64.0%	100.0
		berkmng		%			%
		% within mov life					
		skill	.0%	50.0	11.7%	47.1%	25.0%
		%	%	%			
		Std. Residual	-.7	1.0	-2.1	2.6	
Total		Count	2	4	60	34	100
		% within potensi					
		SMK N.4	2.0%	4.0	60.0%	34.0%	100.0
		berkmng		%			%
		% within mov life					
		skill	100.0	100.	100.0	100.0	100.0
		%	%	0%	%	%	%

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Ketika responden menjawab pendidikan di SMK Negeri 4 diharapkan akan membangun kecakapan hidup/ *life skill* siswanya 71,2% setuju, dan 28,0% lainnya sangat setuju bahwa SMK Negeri 4 Perikanan ini akan berkembang.

Analisis berikut berkaitan dengan variabel:

- motif akan keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan
- motif kebijakan peningkatan pengelolaan, dan akses pendidikan kejuruan
- program pada SMK kejuruan akan mampu meningkatkan motivasi masyarakat

TABEL IV.37
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENYERAPAN
TENAGA KERJA LULUSAN SMK N.4 DAPAT
MENINGKATKAN APRESIASI TERHADAP SMK N.4

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	1	1.0	1.0	1.0
ts	2	2.0	2.0	3.0
s	65	65.0	65.0	68.0
ss	32	32.0	32.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

Masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan berharap pada SMK Negeri 4 Perikanan yang lulusannya mampu menjadi tenaga kerja atau bekerja pada bidang usaha yang berkaitan dengan potensi lokal di Kecamatan tersebut. Sebanyak 65%, dan 32% dari 100 responden mengatakan setuju, dan sangat setuju dengan hal itu. Untuk mendukung SMK Negeri 4 ini, maka para responden memberikan dukungan untuk meningkatkan

fasilitas pendidikan di sekolah tersebut agar lulusannya betul-betul mempunyai ketrampilan yang professional. Hal ini dapat dibuktikan dengan 76% menyatakan setuju, dan 16% menyatakan sangat setuju, dan hanya 2% menyatakan sangat tidak setuju, dan 6% menyatakan tidak setuju. Standar deviasinya 0,547.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan, dan perluasan akses pendidikan kejuruan yang di prioritas untuk siswa yang tidak akan melanjutkan pendidikan mereka, memberikan motivasi yang kuat untuk memilih SMK yang sudah ada.

TABEL IV.38
MOTIVASI UNTUK MENINGKATKAN FASILITAS
PENDIDIKAN DI SMK N.4

	Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	2	2.0	2.0	2.0
sts	6	6.0	6.0	8.0
s	76	76.0	76.0	84.0
ss	16	16.0	16.0	100.0
To				
tal	100	100.0	100.0	

Pendapat masyarakat yang diwakili oleh 100 responden setuju 61%, dan sangat setuju 29%, sedangkan 9% memberikan pendapat tidak setuju, serta 1% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Nilai meannya 3,18 berarti jauh di atas nilai rata-rata 2,5 untuk skala 4.

Sumber 'Hasil olahan SPSS.

Selain itu adanya kebijakan program yang dikembangkan oleh Depdiknas melalui Direktorat Pendidikan Kejuruan yang harus dikembangkan oleh setiap SMK seperti PSG, Prakerin,, dan lain-lain yang harus diikuti oleh semua siswa dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar anaknya dapat bersekolah di SMK yang sudah ada ternyata masyarakat menyambut baik dengan 61% memberikan jawaban setuju jawaban setuju, 37% dengan memberikan jawab sangat setuju dengan SD 0,520, dan nilai rata-rata (mean) 3,35 di atas *median* 3 untuk skala 4 seperti yang digambarkan kan pada TABEL IV.40 di atas, dan TABEL 20 pada lampiran.

TABEL IV.39
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERLUASAN
AKSES SMK N.4 DAPAT MENAIKKAN MOTIVASI
UNTUK MEMILIH SMK N.4

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	1	1.0	1.0	1.0
ts	9	9.0	9.0	10.0
s	61	61.0	61.0	71.0
ss	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

TABEL IV.40
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PSG
DAN PRAKERIN DAPAT MENAIKKAN APRESIASI
MASYARAKAT TERHADAP SMK N.4

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Ts	2	2.0	2.0	2.0
	S	61	61.0	61.0	63.0
	Ss	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

(Sumber: Hasil olahan SPSS, 2009)

4.5 Analisis Strategi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan

Sebelum menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal di Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Bukit Intan, maka harus dilihat potensi, dan hambatan yang ada di wilayah studi yaitu sebagai faktor eksternal, dan faktor internal. Hal-hal yang menjadi perhatian penulis sebagai acuan data untuk menganalisis strategi ini antara lain adalah:

- a. keadaan sumber daya manusia, dan sumber daya alam
- b. fasilitas pendidikan, prasarana, dan sarana wilayah
- c. kebijakan dalam pendidikan atau dalam pengembangan potensi lokal

untuk point a, dan b lingkup wilayahnya hanya di Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan, sedangkan untuk point c lingkup wilayahnya Kota Pangkalpinang.

Pokok persoalan (*issue*) yang digunakan diperoleh melalui hasil wawancara, dan studi dokumentasi selama penelitian dilakukan. Adapun *issue-issue* tersebut antara lain:

a. Faktor internal;

- Potensi perikanan yang ada belum di manfaatkan secara maksimal.
- Jumlah karyawan yang berasal dari SMK N.4 pada usaha industri bidang perikanan masih rendah.
- Sarana armada nelayan untuk melaut masih sederhana.
- Laju pertumbuhan ekonomi diwilayah studi tergolong lambat.
- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun tergolong tinggi.
- Jiwa kewirausahaan siswa SMK N.4 rendah.
- Guru yang tidak layak, dan semi layak mengajar di SMK N.4 Perikanan masih tinggi.
- Tamatan SMA/ SMK merupakan tamatan terbesar pencari kerja di Kota Pangkalpinang.
- Guru produktif di SMK N.4 baru terpenuhi 25%.
- Fasilitas penunjang pembelajaran praktek di SMK N.4 memadai.
- Jumlah siswa kelas 3 pada SMK N.4 yang lulus pada tahun 2007 sangat rendah, 37%.

- Angka lulusan PSG SMK Negeri 4 Perikanan paling rendah jika dibandingkan dengan SMK yang lainnya.
- SMK Negeri 4 Pangkalpinang telah membangun kerja sama dengan pihak DUDI di 7 provinsi di Indonesia.
- Fasilitas yang mendukung produksi bidang perikanan di kedua Kecamatan wilayah studi sangat memadai.

b. Faktor eksternal;

- Banyaknya pengusaha/ industri bidang perikanan di sekitar SMK N.4 Perikanan.
- Besarnya, dana untuk pembiayaan pendidikan di SMK N.4 Perikanan yang berasal dari pemerintah pusat/ daerah.
- Peningkatan APK , fasilitas pendidikan, dan tenaga pendidikan masuk dalam sasaran pembangunan di wilayah studi.
- Rendahnya minat siswa tamatan SMP/ MTs untuk melanjutkan ke SMK Negeri 4 Perikanan.
- Angka APK, dan APM SMK rendah, mengindikasikan masih ada penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah pada SMA/ SMK.
- Rendahnya angka melanjutkan ke SMK di kedua Kecamatan wilayah studi.

- Adanya konsep pengembangsn kurikulum SMK seperti Teaching Industri yang mendukung peningkatan kompetensi siswa tamatan SMK.
- Orang tua/ wali siswa di SMK N.4 Perikanan 73% bermata pencaharian buruh, dan pekerja serabutan lainnya.
- Rendahnya tamatan SMK N.4 Perikanan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, mengindikasikan rendahnya minat DUDI untuk menarik tamatan SMK N.4 ini sebagai tenaga kerja.
- Dari data PDRB, dan LQ terdapat potensi perikanan yang besar di Kota Pangkalpinang.
- Pendapatan, dan pendidikan nelayan sangat rendah, hal ini dapat berpengaruh pada pemikiran mereka terhadap pentingnya arti pendidikan.

Dari daftar *issue* faktor eksternal, dan internal yang teridentifikasi berdasarkan data-data yang ada maka untuk membatasi lingkup analisis penulis hanya memilih dua (2) identifikasi masalah untuk setiap faktor internal, dan eksternal yang dianggap penting. Dua *issue* ini dipilih karena sangat erat kaitannya dengan kebijakan Depdiknas yang tertuang dalam resntra Pendidikan Nasional 2005-2009 yang salah satunya adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan penulis akan memilih 2 strategi prioritas sebagai hasilnya. Alat analisis yang akan digunakan adalah SWOT.

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strenght = S*):

- i. Tersedianya potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal (S1).
- ii. Adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 (S2).

b. Kelemahan (*Weakness = W*):

- i. masih tingginya keadaan guru yg tidak layak/ semi layak mengajar di SMK N.4 (W1).
- ii. jiwa kewirausahaan siswa rendah (W2)

2. Faktor Eksternal:

a. Peluang (*Opportunity = O*):

- i. Terkonsentrasinya pengusaha/ industri dalam bidang perikanan di sekitar SMK Negeri 4 Perikanan (O1).
- ii. Besarnya, dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah/ pusat untuk pembiayaan SMK N.4 (O2)

b. Ancaman (*Threats = T*):

- i. Minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK lebih rendah dari ke SMA (T1).
- ii. Rendahnya minat DUDI untuk menarik tamatan SMK N.4 sebagai tenaga kerja (T2).

Dari masing-masing isu faktor internal, dan eksternal di atas maka diperlukan strategi untuk dapat menentukan skala prioritas. Masing-masing isu dalam setiap faktor internal, dan eksternal penulis memberikan bobot dan skor. Pendekatan bobot dan skor ini dilakukan mengacu pada kondisi riil keadaan yang

penulis amati selama dalam penelitian dengan mempertimbangkan visi-misi Kota Pangkalpinang sebagai daerah perdagangan, jasa, dan industri, serta visi dan misi dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.

a. Faktor Internal terpilih:

TABEL 1V.41
FAKTOR INTERNAL *STRENGTH* TERPILIH ANALISA SWOT

<i>Strength</i> (S)	Bobot (B)	Skor (S)	B x S
S1 Tersedianya potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal (S1)	40	2	80
S2 Adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 (S2)	60	3	180
Jumlah	100		260

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

TABEL 1V.42
FAKTOR INTERNAL *WEAKNESS* TERPILIH ANALISA SWOT

<i>Weakness</i> (W)	Bobot (B)	Skor (S)	B x S
W1 masih tingginya keadaan guru yg tidak layak/ semi layak mengajar di SMK N.4 (W1)	65	2	130
W2 jiwa kewirausahaan siswa rendah (W2)	35	3	105
Jumlah	100		235

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

Karena nilai S (260) lebih besar dari nilai W (235) dengan selisih +25 maka faktor internal S lebih urgen (penting) dari faktor internal W

b. Faktor eksternal terpilih

TABEL 1V.43
FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITY TERPILIH ANALISA SWOT

<i>Opportunity (O)</i>	Bobot (B)	Skor (S)	B x S
O1 Terkonsentrasinya pengusaha/ industri dalam bidang perikanan di SMK Negeri 4	45	1	45
O2 Besarnya, dana pendidikan yang diberikan Oleh pemerintah daerah/ pusat untuk pembiayaan SMK N.4	55	2	110
Jumlah	100		155

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

TABEL 1V.44
FAKTOR EKSTERNAL THREATS TERPILIH ANALISA SWOT

Threats (T)	Bobot (B)	Skor (S)	B x S
T1 Minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK lebih rendah dari ke SMA (T1)	50	3	150
T2 Rendahnya minat DUDI untuk menarik tamatan SMKN.4 sebagai tenaga kerja	50	2	100
Jumlah	100		250

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

Karena nilai O (155) lebih kecil dari nilai T (250) dengan selisih -95 maka faktor eksternal T lebih urgen (penting) dari faktor eksternal O.

Dari hasil identifikasi faktor-faktor internal, dan eksternal di atas, maka strategi yang terpilih adalah strategi *Strength (S)* - *Threats (T)*, dimana akan digunakan kekuatan (S) dari faktor internal untuk mengantisipasi ancaman (T) yang datang dari faktor eksternal.

Untuk melihat strategi setiap pasang faktor kekuatan internal (S) dengan faktor peluang eksternal (O) peneliti memilih mengkaitkan dengan (1) keterkaitan dengan visi-misi pendidikan, (2) jangka waktu pencapaian, dan (3) manfaat ganda maka alternatif strategi S-T dapat dirumuskan sebagai berikut;

a. Strategi S1 – T1

TABEL 1V.45
STRATEGI S1-T1 ANALISA SWOT

Strategi	Bobot(b)	Skor (s)	b x s
S1 Tersedianya potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal (S1) T1 Minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK lebih rendah dari ke SMA (T1)			
1. Kontribusi terhadap visi-misi	50	2	100
2. Jangka waktu pencapaian	10	1	10
3. Manfaat ganda	40	3	120
Jumlah S1-T1	100		230

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

b. Strategi S1 – T2

TABEL 1V.46
STRATEGI S1-T2 ANALISA SWOT

Strategi	Bobot(b)	Skor (s)	B x s
S1 Tersedianya potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal (S1) T2 Rendahnya minat DUDI untuk menarik tamatan SMKN.4 sebagai tenaga kerja			
1. Kontribusi terhadap visi-misi	55	2	110
2. Jangka waktu pencapaian	10	1	10
3. Manfaat ganda	35	3	105
Jumlah S1-T2	100		225

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

c. Strategi S2 – T1

TABEL 1V.47
STRATEGI S2-T1 ANALISA SWOT

Strategi	Bobot(b)	Skor (s)	B x s
S2 Adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 (S2)			
T1 Minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK lebih rendah dari ke SMA (T1)			
1. Kontribusi terhadap visi-misi	30	2	60
2. Jangka waktu pencapaian	10	1	10
3. Manfaat ganda	60	3	180
Jumlah S2-T1	100		250

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

d. Strategi S2 – T2

TABEL 1V.48
STRATEGI S2-T2 ANALISA SWOT

Strategi S1 – T1	Bobot(b)	Skor (s)	b x s
S2 Adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 (S2)			
T2 Rendahnya minat DUDI untuk menarik tamatan SMK N.4 sebagai tenaga kerja			
1. Kontribusi terhadap visi-misi	35	2	70
2. Jangka waktu pencapaian	5	1	5
3. Manfaat ganda	60	3	180
Jumlah S1-T2	100		255

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

Dari ke empat model strategi S-T yang telah dilakukan di atas, ternyata strategi S2-T2 mempunyai nilai tertinggi (255) jika dibandingkan dengan model strategi yang lainnya.

TABEL 1V.49
MODEL STRATEGI ANALISA SWOT

No	Model Strategi	Jumlah b x s
1.	S1-T1	230
2.	S1-T2	225
3.	S2-T1	250
4.	S2-T2	255

(Sumber: Hasil olahan sendiri, 2009)

Jadi 2 prioritas strategi yang terpilih untuk meningkatkan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal adalah:

a.Strategi S2-T2; Dengan adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 maka dapat menaikkan mutu kompetensi siswa lulusannya sehingga minat DUDI terhadap lulusan SMK ini makin meningkat.

b.Strategi S2-T1; Dengan tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 T1 diharapkan dapat menaikkan minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK ini semakin meningkat

Dua strategi yang terpilih ini dapat dikatakan bahwa adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK Negeri 4 Perikanan ini diharapkan dapat menaikkan mutu kompetensi siswa lulusannya, dan dapat menarik minat siswa lulusan SMP/ MTs khususnya yang ada di Kecamatan Pangkalbalam, dan Bukit Intan, dan umumnya yang ada di Kota Pangkalpinang. Secara eksplisit dapat di katakan bahwa untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal maka hal-hal yang perlu di lakukan antara lain;

- a. meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran yang dapat meningkatkan life skill siswa
- b. melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya ke siswa SMP/MTs tentang keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan dengan segala keunaggulan fasilitasnya
- c. melakukan kerja sama dengan pihak DUDI terutama dalam hal program PSG, dan prakerin agar DUDI dapat yakin akan kompetensi siswa-siswa SMK Negeri 4 ini

4.6. Sintesa Hasil Studi

Setelah dilakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder yang menyangkut sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk merangkum dari analisis yang di dapat melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk mempermudah melihatnya maka, sintesis hasil studi dibuat dengan menggunakan TABEL berdasarkan sasaran-sasaran pada penelitian ini.

TABEL IV.50
SINTESA ANALISIS HASIL STUDI

Sasaran 1, dan 3	Sasaran 2	Sasaran 4	Sasaran 5
Analisis Identifikasi wilayah, potensi lokal, dan SDM-nya	Identifikasi kebijakan dalam bidang pendidikan, dan sub sektor perikanan, dan SDM-nya	Analisis kuantitatif kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal perikanan	Analisis Strategi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan
<p>a. Kecamatan Bukit Intan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan ikan untuk industri ikan olahan hasil masih rendah - Jumlah usaha kecil, dan menengah dalam bidang pengolahan hasil ikan yang tersebar mencapai 71,43% - Peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui peningkatan peranan sektor industri rumah tangga, serta termasuk di dalamnya industri pengolahan hasil perikanan - Sarana penangkapan ikan sangat sederhana, sebagian besar menggunakan perahu dengan motor tempel, 50,79% - Sasaran pembangunan di kecamatan ini telah mengakomodir 	<p>a. Kebijakan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kejuruan harus berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing - Pendekatan pengembangan kurikulum yang harus diterapkan untuk SMK harus kurikulum yang berbasis kewirausahaan, dan Teaching industri <p>b. Tenaga kerja Tamatan SMK</p> <ul style="list-style-type: none"> - masih tingginya angka pencari kerja dari tamatan SMA, dan SMK, 68,66% - belum adanya pelatihan 	<p>a. Lokasi, jarak, biaya, kurikulum, keberadaan angkot;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setuju dengan lokasi ▪ SMK N.4 saat ini ▪ Terhadap jarak, pendapat responden berimbang antara jauh, dan dekat ▪ Biaya pendidikan di SMK negeri 4 tergolong murah ▪ Kurikulum pengembangan SMK kurang di sosialisasikan ▪ Tidak adanya angkot dapat menurunkan minat siswa ke SMK N.4 	<p>Faktor internal, dan Eksternal;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Terdapat 3 usaha untuk melaksanakan 2 strategi yang terpilih: <p>a. Dengan adanya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 maka dapat menaikkan mutu kompetensi siswa lulusannya sehingga minat DUDI terhadap lulusan SMK ini makin meningkat.</p>

<p>sektor potensi lokal, dan pendidikan, antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> o meningkatkan APK SMA/ SMK o meningkatkan daya dukung SDA o meningkatkan sektor unggulan/ basis o meningkatkan fasilitas pendidikan, dan tenaga kependidikan <p>- Belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil dari industri rumah tangga termasuk di dalamnya industri pengolahan hasil perikanan</p> <p>- Rendahnya jumlah karyawan tamatan SMK N.4 di perusahaan makanan olahan, 16,78 %</p> <p>b. Kecamatan Pangkalbalam</p> <p>- Pemanfaatan ikan untuk industri ikan olahan baru mencapai 6,6% masih mempunyai peluang untuk di tingkatkan</p> <p>- Rendahnya karyawan tamatan SMK N.4 pada industri kecil bidang perikanan sebesar 9,92 %</p> <p>- Jumlah usaha kecil, dan menengah dalam</p>	<p>ketrampilan bidang perikanan oleh dinas tenaga kerja</p> <p>c. Keadaan SDM guru, dan siswa di SMK Negeri 4;</p> <p>- masih tingginya guru SMK Negeri 4 Perikanan yang berstatus tidak layak, dan semi layak mengajar yaitu 47,49%</p> <p>- SMK Negeri 4 masih kekurangan guru bidang keahlian perikanan, saat ini baru terpenuhi 25%</p> <p>- Terus menurunnya jumlah siswa kelas 3, jumlah siswa yang lulus, dan NEM rata-rata sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 di SMK N.4</p> <p>- Angka APK, dan APM di kedua Kecamatan itu dibawah 100%, berarti masih ada penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMA atau SMK</p> <p>- Masih rendahnya angka</p>	<p>b. Potensi perikanan, indikasi adanya industri, dan sarana yang tersedia;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi perikanan di kedua Kecamatan ini belum di kelola secara maksimal ▪ Adanya industri yang bergerak dalam bidang perikanan menunjukkan potensi perikanan di kedua Kecamatan ini ▪ Adanya usaha pemerintah yang kuat untuk meningkatkan keberadaan potensi lokal perikanan melalui peningkatan fasilitas bidang perikanan seperti PPI (pangkalan perikanan), TPI (tempat pelelangan ikan), dan lain-lain, dan memperlan 	<p>b. Dengan tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai di SMK N.4 diharapkan dapat menaikkan minat siswa lulusan SMP/ MTs ke SMK ini semakin meningkat kan usaha – usaha yang dapat dilakukan adalah</p> <p>i. meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran yang dapat meningkatkan life skill siswa</p> <p>ii. melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya ke siswa SMP/ MTs tentang keberadaan SMK Negeri 4 Perikanan dengan segala keunggulan fasilitasnya</p>
--	---	---	--

<p>bidang pengolah hasil ikan yang tersebar mencapai 66,67%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alasan banyak keberadaan usaha bidang perikanan: <ul style="list-style-type: none"> o bahan baku mudah di dapat o pemasaran cukup luas, dan mudah o masyarakat Pangkalpinang menyukai makanan olahan yang berasal dari ikan <p><u>lanjutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana penangkapan ikan masih rendah, sebagian besar menggunakan perahu tanpa motor - pendidikan menengah kejuruan belum ada di Kecamatan ini <p>c. Kota Pangkalpinang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari data PDRB (produk domestik regional bruto), dan indeks LQ (location Quotient) menunjukkan sub sektor perikanan merupakan sub sektor basis - Terjadinya penurunan produksi ikan pada tahun 2007 disebabkan oleh kurangnya sarana alat tangkap, dan minimnya pengetahuan nelayan 	<p>kelulusan PSG pada SMK Negeri 4 dibandungkan dengan SMK yang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya jiwa kewirausahaan siswa SMK N.4 ini, hal ini didukung oleh data 4% kontribusi, dana dari usaha THP siswa <p>Fasilitas penunjang pendidikan masih perlu ditingkatkan terutama dari segi kesesuaian dengan kompetensi kebutuhan dunia industri perikanan</p> <p>d. Asal siswa, fasilitas pendukung pembelajaran, mutu lulusan, kerja sama dengan DUDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keluarga nelayan yang menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 4 ini hanya 5,49% - Walaupun SMK N.4 terletak di Kecamatan Bukit Intan tapi jumlah siswanya terbesar berasal 	<p>car akses</p> <p>c. Pendidikan kejuruan, Pendidikan Nelayan, pendidikan SMA, dan SMK, Penduduk usia sekolah SMA/ SMK, harapan terhadap pendidikan, khusus nya pendidikan kejuruan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pendidikan kejuruan seperti di SMK N.4 diperlukan bagi nelayan, dan pelaku usaha perikanan, serta masyarakat lainnya di Kecamatan Pangkalpinang, dan Bukit Intan o Nelayan, dan pelaku usaha bidang perikanan tidak dibekali ketrampilan 	<p>iii. melakukan kerjasama dengan pihak DUDI terutama dalam hal program PSG, dan praktisi agar DUDI dapat yakin akan kompetensi siswa-siswa SMK ini</p>
---	--	--	--

<p>yan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan nelayan sebagian besar SD/ MI 58,56%, berpen didikan SMA/ SMK hanya 5,23% - Sarana, dan prasarana yang me nunjang sub sektor perikanan sa ngat memadai ditambah dengan adanya pusat penjualan hasil pro duksi makanan olahan ikan - Persentase penduduk berpen didikan SMA 0,93% lebih tinggi dibandingkan denga penduduk ber pendidikan SMK 0,76% 	<p>dari Kecamatan Pangkalbalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak SMK N.4 telah melaksanakan kerja sama dengan DUDI di 6 provinsi se Indonesia - Rendahnya lulusan SMK N.4 ini yang bekerja sesuai dengan bidang perikanan yaitu 12,5% <p>e. Kebijakan dalam bidang perikanan, dan keadaan umumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya penurunan produksi sub sektor perikanan pada tahun 2007 disebabkan oleh; <ul style="list-style-type: none"> a. tingginya biaya operasional, bahan bakar, dan es balok b. daya beli masyarakt berkurang c. kurang sarana kapal tangkap, dan minimnya pengetahuan mereka - pendidikan nelayan 58,56% SD/ MI, SMP/ 	<p>yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> o Masih ada penduduk usia 16-18 tahun belum berse kolah di kedua keca matan ini ini o Pendidikan SMK sama pentingnya dengan SMA o Pendidikan dapat mening katkan taraf hidup o SMK Negeri 4 dapar menghasilkan lulusan yang mempunyai kom petensi yang dibutuhkan oleh DUDI <p>d. Fasilitas pendidikan SMK N.4, motivasi, dan pengembangan kurikulum di SMK N.4;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan fasilitas pen 	
--	--	--	--

	<p>MTs 34,77%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kerja sama secara teknis antara SMK N.4 dengan Dinas Perikanan, baru sebatas MoU dalam hal pengamanan BBIL (bibit benih ikan laut) - Kelemahan SDM tamatan SMK N.4 antara lain; <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusannya tidak bekerja sesuai dengan kompetensi nya b. Lulusannya kurang kreatifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan c. Tenaga pengajar banyak yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya 	<p>didikan di SMK N.4</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lulusan SMK N.4 ini diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, maka untuk itu mereka yakin tamatan ini akan siap kerja o Setuju kegiatan program pengembangan kurikulum seperti PSG, dan Prakerin ditingkatkan lagi 	
--	---	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan judul penelitian "Studi Peningkatan Kebutuhan Pendidikan Kejuruan Untuk Mendukung Potensi Lokal Perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan" dan pertanyaan penelitian yaitu "bagaimana meningkatkan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dengan tujuan penelitian menganalisis tingkat kebutuhan pendidikan menengah kejuruan yang diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan, maka kesimpulan dari hasil analisis dalam penelitian ini bahwa pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal perikanan sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan di wilayah Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan yang mempunyai potensi lokal perikanan yang begitu besar dimana masyarakat di kedua wilayah ini memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya dengan bekal kompetensi pendidikan kejuruan anak-anaknya terutama untuk kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal wilayah pesisir dan pengolahan makanan dari hasil perikanan. Namun untuk ini di perlukan usaha-usaha berikut:

- a. melaksanakan pengembangan ekonomi lokal (PEL) di Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam dengan cara mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lokal dengan memperhatikan lokasi, kebijakan dan manajemen.
- b. mendesain/ model pengembangan pendidikan kejuruan yang berbasis pada potensi lokal yang tidak dapat berdiri sendiri. dalam lingkup dinas Pendidikan saja tetapi akan berkaitan erat dan tergantung dengan konteks pengembangan ekonomi wilayah (*sektor basis*) dan *demand* industri. derajat ketergantungan tersebut dapat dilihat dari tingginya dukungan program prakerin (praktek kerja industri). PSG (pendidikan sistim ganda) yang akan mengasah *skill* siswa SMK Negeri 4 ini di sektor industri dan *output* pendidikan SMK ini diharapkan dapat terserap di pasar tenaga kerja industri atau berwirausaha sesuai dengan bidangnya sehingga pengembangan kurikulum seperti *entrepreneurship* dan *teaching* industri merupakan bagian dari model kurikulum yang menjawab kebutuhan pasar sehingga peningkatan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal. seperti SMK Negeri 4 Perikanan ini tidak bisa semata-mata menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang. namun perlu kerja sama dengan dinas yang lain seperti Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dinas Perindustrian. Dinas Tenaga Kerja. dan *stake holder* seperti dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.

- c. Mendukung tingginya motivasi masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dalam hal akan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal yang dapat menghasilkan SDM dengan *life skill* yang dibutuhkan oleh DUDI.

5.2 Rekomendasi

Agar hasil tujuan penelitian ini dapat diwujudkan maka peneliti memberikan rekomendasi kepada:

5.2.1 Saran Pelaksana:

A. Kepada Walikota Pangkalpinang:

memerintahkan pihak organda melalui dinas Perhubungan agar angkot dapat melalui SMK Negeri 4 Perikanan pada jam-jam masuk sekolah dan pulang agar akses pergerakan ke sekolah tersebut menjadi lancar.

B. Dinas Perikanan dan Kelautan:

1. Memperkuat sektor *basis* sub sektor perikanan di Kecamatan Pangkalbalam dan Bukit Intan dengan cara:

- jumlah armada penangkapan ikan. dan fasilitas penunjang lainnya
- memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan ketrampilan pengolahan ikan bagi pelaku usaha dalam bidang perikanan

dan pencari kerja khususnya tamatan SMK bidang perikanan

2. Menganggarkan secara konsisten melalui APBD kota dan atau APBD Provinsi untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas armada penangkapan ikan bagi nelayan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam sub sektor perikanan.
3. Menjalin kerja sama (*net working*) dengan instansi lain yang relevan seperti. Dinas Perindustrian. Dinas Pendidikan. dan Dinas Tenaga Kerja dalam hal mengoptimalkan potensi lokal perikanan baik dari segi SDA. SDM. dan pemasaran produknya.

C. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang;

1. Memberikan dukungan yang kuat untuk SMK Negeri 4 Perikanan untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada potensi lokal dan berbasis pada jiwa kewirausahaan baik melalui peningkatan fasilitas penunjang pembelajaran. menyekolahkan para gurunya di dalam meningkatkan potensi akademiknya dari DIII/ DIV ke SI. dan S1 ke S2 dan menganggarkan dana untuk beasiswa bagi peserta didiknya Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:
 - menguatkan kerja yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang perikanan dalam mengembangkan kurikulum *teching* industri

- menjadikan program-program seperti PSG dan Prakerin untuk lebih dapat meningkatkan kompetensi dan *life skill* bagi siswanya
 - meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru-guru terutama guru dalam bidang mata pelajaran bidang keahlian
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada kepala-kepala SMP/ Mts yang ada di kota Pangkalpinang terhadap kebijakan penguatan 60:40 SMK terhadap SMA agar siswa-siswa SMP/ MTs memahami keberadaan SMK Negeri 4 ini

D. Pihak Kecamatan Bukit Intan dan Pangkalbalam

- mensosialisasikan pentingnya pendidikan untuk masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing agar dapat menaikkan nilai APK dan APM khususnya sekolah menengah kejuruan
- membangun kerja sama yang lebih intensif dengan pihak SMK Negeri 4 agar penduduk miskin yang berusia 16-18 tahun dapat bersekolah dengan biaya rendah atau gratis sama sekali.
- meningkatkan motivasi penduduk khususnya orang tua siswa yang mempunyai anak usia 16-18 tahun untuk bersekolah pada jenjang pendidikan menengah. khususnya pendidikan

kejuruan yang berbasis potensi lokal yang ada di wilayahnya

E. Kepala SMK Negeri 4 Perikanan

- membangun jiwa *enterpreneurship* kepada guru dan siswa untuk lebih memberdayakan semangat kemandirian peserta didiknya
- menguatkan manajemen dan tata kelola dalam memimpin sekolah ini agar dapat membangun kerja secara profesional dan proposional dengan pihak DUDI dalam bidang perikanan

F. Masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang perikanan:

- bagi para nelayan dan pengusaha dalam bidang perikanan untuk meningkatkan profesionalismenya dalam setiap kesempatan melalui pengembangan ketrampilan yang dilaksanakan oleh pemerintah
- bagi para nelayan untuk mengurangi bahkan meniadakan keikutsertaan anak-anaknya yang sedang usia sekolah untuk melalut agar mereka dapat bersekolah pada jenjangnya masing-masing
- bagi masyarakat secara keseluruhan khususnya yang berdomisili di kedua kecamatan daerah penelitian ini yang putra-putri sedang mengenyam pendidikan di SMP/ MTs untuk lebih memilih SMK kejuruan yang berbasis potensi lokal seperti SMK Negeri 4 Perikanan terlebih lagi bagi mereka yang secara ekonomis tidak dapat melanjutkan

pendidikan anaknya setelah tamat pendidikan menengah dan berorientasi pada dunia kerja

5.2.2 Saran Studi

Studi yang penulis lakukan ini tentu masih perlu di sempurnakan pada penelitian lanjutan bagi pihak yang memerlukan. Penulis menyarankan untuk dilakukan studi antara lain;

- Identifikasi kurikulum SMK yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Faktor-faktor yang mempengaruhi diperlukannya sebuah SMK yang berbasis potensi lokal oleh dunia industri.
- Manajemen yang bagaimana yang diperlukan untuk pengelolaan sebuah SMK yang berbasis potensi lokal.
- Hubungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha bidang perikanan dalam pengembangan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pengembangan Wilayah. Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alma, Buchori. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Perencanaan Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Allyn and Bacon. 1990. *Curriculum, Planning and Developing*. Toronto. St Lucie Press.
- Alkadri et al. 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi (BPPT).
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Bengen. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir di Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. IPB Bogor.
- Burhanuddin. 1999. *Analisa Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Malang. Universitas Press.
- Chung, KH & Megginson I. 1981. *Organizational Behavior Developing Managerial*. New York. Herpen & Row.
- Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang Tahun 2007*. 2007. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
- Data Base Pengolahan Hasil Perikanan Kota Pangkalpinang*. 2008. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
- Djoyonegoro, Wardiman. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta. Depdiknas.
- Dahuri, Rokhmin dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Fauzi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, John. 1987. *Planning In The Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
- Fine C & Mr Gough. 1982. *Administrasy and Supervising Occupational Education*. New Jersy: Prestice Hall. inc.
- Gunawan, dkk. 2006. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisa Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko. 2000. *Manajemen*. Yogyakarta: BPPE UGM.
- Hariwijaya, PB Triton. 2007. *Teknik Penulisan Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Oryza.
- Herdiana. 2009. *Tentang SMK* tersedia di <http://apps.facebook.com/causes/140134?m=c9c214f0&re>
- Istijanto. 2008. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan, Muhammad. 1988. *Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Karunia.
- Jayadinata, dkk. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kecamatan Pangkalbalam Dalam Angka. BPS Kota Pangkalpinang. 2006
- Kecamatan Bukit Intan Dalam Angka. BPS Kota Pangkalpinang. 2006
- Kusbiantoro BS. 1999. *Permasalahan dan Arah Kebijakan Transportasi Perkotaan*. BBT.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Meyer, et.al. 1984. *Urban Transportation Planning* Mc. Grawhill Book.
- Miro, Fidel. 1997. *Sistim Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito.
- Morlok, Edward K. 1998. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi* (Terjemahan J.K Halina). Jakarta: Erlangga.

- Muchdie, et. al. 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. Jakarta: BPPT.
- Muhidin, Ali Sambas dkk. 2007. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurinawati, Umi. dkk. 2007. *Teknik Sampling Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangkalpinang Dalam Angka 2006*. BPS Kota Pangkalpinang.
- Pangkalpinang Dalam Angka 2007*. BPS dan Bappeda Kota Pangkalpinang.
- PB Triton. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Tugu.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Stándar Sarana dan Prasarana Untuk SD/ MI. SMP/ MTs.SMA/ MA*. 2007: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Stándar Nasional Pendidikan*.
- Program Pembangunan Daerah 2004-2008*. 2004: Bappeda Kota Pangkalpinang.
- Propil Pendidikan Kota Pangkalpinang 2006-2007*. 2007: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 2004-2008*. 2004: Dinas Pendidikan kota Pangkalpinag.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang 2004-2009*. 2003: Bappeda Kota Pangkalpinang.
- Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan*. 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan 2005-2009*. Depdiknas. 2001.

- Riduan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosia, Ekonom, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ruky S. Achmad. 2006. *SDM Berkualitas. Mengubah Visi Menjadi Berkualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sallis, Edward. 2008. *Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Irgisod.
- Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar; Mengapa Dengan Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina Kerja Sama dengan Logos Wacana Ilmu.
- Singarimbun, dkk. 1992. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sobry, Sutikno M. 2006. *Pendidikan Semarang dan Massa Depan Suatu Refleksi Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermakna*. Mataram: NIP Press.
- Soenaryo, Endang. 2000. *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Stoner, JAF & Freeman RE. 1992. *Manajemen 3rd Editioan Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice Hall International Edition.
- Suparmoko. Muhammad. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta. BPFE.
- Syaefudin, Sa'ud Udin dkk. 2006. *Perencanaan Pendidikan. Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tamin O.Z. 2000. *Perencanaan Premodelan Transfortasi*. Bandung: ITB.
- Terry, GR. 1960. *The Principles of Management. Third Edition*. Homewood Illinois: Richard Irwin.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Manajemen Pendidikan Nasional*. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang – Undang RI nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.

- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Transportasi.*
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori. Praktek dan Reset Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 1986. *Pengantar Teori Sistem dan Pengembangan SDM.* Bandung: Alumni.

LAMPIRAN TABEL DAN GAMBAR

1. Lampiran TABEL;

TABEL 1
SEBARAN INDUSTRI IKAN LAUT OLAHAN
DI KECAMATAN BUKIT INTAN

No	Kelurahan	Jlh.Usaha kecil & Menengah	Keterangan
1.	Bacang	6 industri	Jumlah tenaga kerja yang terserap 208 orang
2.	Bukit Intan	3 industri	
3.	Air Itam	4 industri	
4.	Semabung Lama	11 industri	
5.	Bukit Besar	3 industri	

(Sumber : Kecamatan Bukit Intan Dalam angka, BPS-2006)

TABEL 2
JUMLAH KARYAWAN UMUM DAN KARYAWAN
TAMATAN SMK NEGERI 4 DISEJUMLAH
USAHA INDUSTRI PERIKANAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jlh Karya Wan	Jlh. Kryan tamatan SMK Neg.4
1.	Haryono	Kulit Ikan Pari	6	2
2.	Bongkuet Young	Getas. Kerupuk	12	3
3.	Sugimin	Getas. Kerupuk	8	0
4.	DjieKhie Khair	Getas. Kerupuk	12	2
5.	Mulyadi	Getas. Kerupuk	5	1
6.	Akhian	Getas Super	6	0
7.	Kerupuk 2 Ikan Mas	Keruupuk	10	2
8.	Rusip Pak Salam	Rusip	3	0
9.	Kemplang Ikan	Kemplang	8	0
10.	Kemplang Panggang 66	Kemplang	6	2
11.	O3 (Otak-Otak Oke)	Otak-Otak ikan	4	1
12.	Stepanus	Kemplang, Kerupuk	8	1
		Getas		
13.	Mei Chen	Kemplang	12	2
14.	Djong Sak Fo	Getas, Kricu	7	1
15.	Tet Liong	Otak-Otak	4	0
16.	Arryanto	Getas	5	0
17.	Chia Sui Liong	Kemplang-Getas	10	3
18.	Herman Susanto		12	2
	Jumlah		131	22

(Sumber; Hasil observasi dan olahan sendiri dri berbagai sumber, 2009)

TABEL 3
SEBARAN INDUSTRI IKAN LAUT OLAHAN
DI KECAMATAN PANGKALBALAM

No	Kelurahan	Jlh.Usaha Mikro, kecil & Menengah	Keterangan
1.	Ketapng	6 industri	Jumlah tenaga kerja yang terserap 210 orang
2.	Ampui	10 industri	
3.	Pasir Garam	4 industri	
4.	Gabek II	2 industri	
5.	Gabek I	1 industri	
6.	Air Itam	5 industri	

(Sumber : Kecamatan Pangkalbalam Dalam Angka-BPS,2006)

TABEL 4
JUMLAH KARYAWAN UMUM DAN KARYAWAN
TAMATAN SMK NEGERI 4 DISEJUMLAH
USAHA INDUSTRI PERIKANAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jumlah Karyawan	Jlh. Karyawan tamatan SMK Perikanan
1.	Suyono	Getas, kerupuk	5	2
2.	PT Surya Sepakat Pulau Bangka	Exp.hasil laut	28	4
3.	PT Bangka Tropindo Adimira	Exp.hasil laut	75	3
4.	PT Surya Hasil Laut	Exp.hasil laut	53 org	2
5.	PT Bugis Mandiri	Exp.hasil laut	61	6
6.	PT Cahaya Bintang Laut Abadi	Exp.hasil laut	27	5
7.	PT Yunus Alam Bangka	Exp.hasil laut	42	2
8.	Melan	Pempek	8	0
9.	Astura	Getas, kerupuk	3	0
10.	Acion	Getas, kerupuk	7	2
11.	PT Mardeka Sarana Usaha	Budidaya Hasil Laut	68	7
12.	Akiun	Ikan Asin	2	0
13.	Wak yan	Pempek	2	1
14.	Susana	Kricu	10	4
15.	"MM"	Kemplang	5	1
16.	CV Sanjaya Haiting	Ikan Beku (CS)	27	4
	Jumlah		423	42

(Sumber ; Hasil observasi dan olahan sendiri dari berbagai sendiri,2006)

TABEL 5
PENDAPAT RESPONDEN TERHADAP RENDAHNYA
KETRAMPILAN NELAYAN DI 2 KECAMATAN
PENELITIAN INI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
sts	3	3.0	3.0	3.0
Ts	14	14.0	14.0	17.0
S	69	69.0	69.0	86.0
ss	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 6
ANGKA INDIKATOR PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG

No	Uraian	Nilai
1.	Angk. Kepadatan. penduduk Us 16-18 thn	89
2.	Angk. Kepadatan. penduduk Us 13-15 thn	84
3.	Angk. Kepadatan. penduduk Us 7 -12 thn	15,98
4.	% tase pendidikan penduduk SMK	0,76
5.	% tase pendidikan. penduduk SMA	0,93
6.	% tase pendidikan. penduduk SMP	1,48
7.	% tase pendidikan penduduk SD	1,77

(Sumber Propil Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2008)

TABEL 7
KEADAAN FASILITAS BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 4
PANGKALPINANG TAHUN 2006

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	R. Belajar	9 bh	Jlh. Kursi 32x9 = 288
2	R. Praktek/Bengkel	3 unit	Bengkel THP dan NPL
3.	Lab. Bhs	1 unit	
4.	R. Perpustakaan	1 unit	
5.	R. Komputer / MM	1 unit	40 bh komputer – online –
6.	R. Gambar	1 unit	sistim jaringan
7.	R. Serbaguna	1 bh	
8.	Kapal Tangkap	1 bh	Beserta kelengkapannya
9.	Asrama siswa	1 unit	
10.	R. BP/BK	1 bh	
11.	WC siswa	3 bh	

(Sumber : SMK Negeri 4 Perikanan Pangkalpinang, 2009)

TABEL 8
DISTRIBUSI PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006

No	Lapangan Usaha	Besar PDRB Dalam persen
1.	Perdagangan	22,8
2.	Jasa	18,1
3.	Pertanian	16,0
4.	Pengangkutan & komunikasi	13,1
5.	Industri	11,1
6.	Keuangan	9,4
7.	Bangunan	7,3
8.	Listrik dan Air	2,2

(Sumber : BAPEDA Kota Pangkalpinang, 2007)

TABEL 9
DISTRIBUSI KEGIATAN PEREKONOMIAN PANGKALPINANG,
2003 – 2006 DALAM PERSEN

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006
1. PERTANIAN	20.27%	18.33%	16.82%	15.96%
a. Tanaman Bahan Makanan	0.92%	0.85%	0.71%	0.69%
b. Tanaman Perkebunan	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.02%	0.93%	0.86%	0.81%
d. Perikanan	18.27%	16.49%	15.20%	14.41%
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10.07%	8.99%	10.81%	11.10%
a. Industri Migas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
b. Industri tanpa Migas	10.07%	8.99%	10.81%	11.10%
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	5.57%	5.09%	4.76%	4.61%
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	3.21%	2.75%	2.57%	2.54%
4. Kertas dan Barang Cetak	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.25%	0.23%	0.21%	0.20%
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00%	0.00%	2.45%	2.96%
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.93%	0.82%	0.72%	0.67%
9. Barang Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	21.61%	21.58%	21.98%	22.93%
a. Perdagangan Besar & Eceran	18.83%	18.96%	19.61%	20.63%
b. Hotel	0.37%	0.35%	0.33%	0.32%
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	14.01%	14.60%	13.31%	13.14%
a. Pengangkutan	12.43%	12.76%	11.26%	10.81%
1. Angkutan Jalan Raya	10.92%	11.35%	10.22%	9.80%
2. Angkutan Laut	0.65%	0.64%	0.48%	0.47%
3. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.53%	0.48%	0.30%	0.28%
4. Jasa Penunjang Angkutan	0.32%	0.30%	0.26%	0.26%
b. Komunik (Sumber: Bagian Perekonomian Pangkalpinang, 2007)				
asi	1.58%	1.84%	2.05%	2.34%
1. Pos dan Telekomunikasi	1.48%	1.72%	1.94%	2.22%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.10%	0.12%	0.11%	0.11%
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	10.38%	10.07%	9.60%	9.36%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(Sumber ; Bagian Ekonomi Pemkot, 2007)

TABEL 10
KEADAAN STATISTIK SOSIAL RESPONDEN

		pendidikan	pekerjaan	Penghasilan
				n
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		2.41	2.25	2.16
Median		3.00	2.00	2.00
Mode		1	2	2
Std. Deviation		1.164	1.038	.884
Variance		1.355	1.078	.782
Range		3	3	3
Minimum		1	1	1
Maximum		4	4	4
Sum		241	225	216
Percentiles	25	1.00	1.00	1.25
	50	3.00	2.00	2.00
	75	3.00	3.00	3.00

TABEL 11
KEADAAN STATISTIK CROSSTAB PENDIDIKAN DAN JLH. ANAK RESPONDEN

		pend anak				Total
		Belum ada skh	di sd	sd/smp/s ma/smk	sma/smk/pt	
Jlh anak >4	Count	1	1	2	4	8
	% within jlh anak	12.5%	12.5%	25.0%	50.0%	100.0%
	% within pend anak	8.3%	3.6%	6.9%	12.9%	8.0%
	% of Total	1.0%	1.0%	2.0%	4.0%	8.0%
	Std.	.0	-.8	-.2	1.0	
0	Residual	.0	-.8	-.2	1.0	
	Count	7	1	1	1	10
	% within jlh anak	70.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
	% within pend anak	58.3%	3.6%	3.4%	3.2%	10.0%
	% of Total	7.0%	1.0%	1.0%	1.0%	10.0%
3-4	Std.	5.3	-1.1	-1.1	-1.2	
	Residual	5.3	-1.1	-1.1	-1.2	
	Count	0	8	18	16	42
	% within jlh anak	.0%	19.0%	42.9%	38.1%	100.0%
	% within pend anak	.0%	28.6%	62.1%	51.6%	42.0%
1-2	% of Total	.0%	8.0%	18.0%	16.0%	42.0%
	Std.	-2.2	-1.1	1.7	.8	
	Residual	-2.2	-1.1	1.7	.8	
	Count	4	18	8	10	40
	% within jlh anak	10.0%	45.0%	20.0%	25.0%	100.0%
Total	% within pend anak		64.3%	27.6%	32.3%	40.0%
	% of Total	33.3%	18.0%	8.0%	10.0%	40.0%
	Std.	4.0%	18.0%	8.0%	10.0%	40.0%
	Residual	-4	2.0	-1.1	-.7	
	Count	12	28	29	31	100
Total	% within jlh anak	12.0%	28.0%	29.0%	31.0%	100.0%
	% within pend anak	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber ;hasil olahan SPSS,2009

TABEL 12
KATAGORI BIAYA PENDIDIKA * PEKERJAAN
CROSSTABULATION

			Pekerjaan				Total
			buruh harian	pns/tni/k arydll	Nelayan	pengusah a bid perikanan	
kata gori biaya pendidikan	sangat besar	Count					
			5	0	3	1	9
		% within katagori biaya pendidika	55.6%	.0%	33.3%	11.1%	100.0%
		% within pekerjaan	17.2%	.0%	12.5%	6.7%	9.0%
		% of Total	5.0%	.0%	3.0%	1.0%	9.0%
	cukup besar	Count	17	25	14	10	66
		% within katagori biaya pendidika	25.8%	37.9%	21.2%	15.2%	100.0%
		% within pekerjaan	58.6%	78.1%	58.3%	66.7%	66.0%
		% of Total	17.0%	25.0%	14.0%	10.0%	66.0%
	Kecil	Count	4	2	3	2	11
		% within katagori biaya pendidika	36.4%	18.2%	27.3%	18.2%	100.0%
		% within pekerjaan	13.8%	6.3%	12.5%	13.3%	11.0%
		% of Total	4.0%	2.0%	3.0%	2.0%	11.0%
	sangat kecil	Count	3	5	4	2	14
		% within katagori biaya pendidika	21.4%	35.7%	28.6%	14.3%	100.0%
		% within pekerjaan	10.3%	15.6%	16.7%	13.3%	14.0%
	% of Total	3.0%	5.0%	4.0%	2.0%	14.0%	
Total	Count	29	32	24	15	100	

Sumber ; Hasil olahan SPSS, 2009

TABEL 13
STATISTIK MINAT UNTUK BERSEKOLAH
DI SMK N.4 PERIKANAN

		usia sma/s mk	di SMK N4	altnf sklh	setlh lulus	pendpt ke SMK N4	als utm ke SMK N.4	als untm tidak ke SMK4
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.32	1.10	.72	.23	1.56	1.93	1.13
Median		1.00	1.00	.00	.00	2.00	2.00	.00
Mode		1	1	0	0	2	0	0
Std. Deviation		.469	.302	1.341	.827	1.200	1.810	1.522
Variance		.220	.091	1.800	.684	1.441	3.278	2.316
Range		1	1	4	4	4	4	4
Minimum		1	1	0	0	0	0	0
Maximum		2	2	4	4	4	4	4
Sum		132	110	72	23	156	193	113
Percentiles	25	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00
	50	1.00	1.00	.00	.00	2.00	2.00	.00
	75	2.00	1.00	.00	.00	2.75	4.00	2.00

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 14
USIA 16-18 TAHUN ANAK RESPONDEN

		Frequ ency	Percent	Valid Percent	Cumul ative Perce nt
V	tidak	68	68.0	68.0	68.0
ali	Ya	32	32.0	32.0	100.0
d	Total	100	100.0	100.0	

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 15
KEADAAN ANAK RESPONDEN YANG
BERSEKOLAH DI SMK N.4

	Fre que ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	90	90.0	90.0	90.0
ya	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 16
ALTERNATIF SEKOLAH SELAIN SMK N.4

	Freque ncy	Perc ent	Valid Percent	Cumula tive Percent
Valid 0	76	76.0	76.0	76.0
Tidak berskl	1	1.0	1.0	77.0
kursus	4	4.0	4.0	81.0
sma/ma	13	13.0	13.0	94.0
smk lain	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 17
PENDAPAT RESPONDEN SETELAH
ANAK-ANAKNYA LULUS SMK N.4

	Freque ncy	Percent	Valid Perce nt	Cumulative Percent
Valid 0	92	92.0	92.0	92.0
mencr kerja	4	4.0	4.0	96.0
ke PT umum	1	1.0	1.0	97.0
PT priknan	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 18
ALASAN RESPONDEN UNTUK TIDAK
MEMILIH SMK N.4

	Frequ ency	Per cent	Valid Perce nt	Cumulativ e Percent
Val id 0	57	57.0	57.0	57.0
lain-lain	10	10.0	10.0	67.0
Diterima sma/smk lain	11	11.0	11.0	78.0
Jauh	7	7.0	7.0	85.0
Tidak sesuai kompt	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100. 0	100.0	

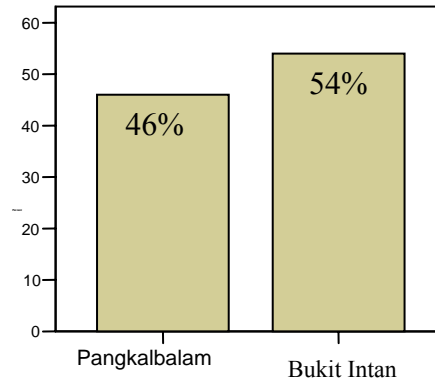
Sumber ' Hasil olahan SPSS,2009

TABEL 19
ALASAN MEMILIH SMK N.4

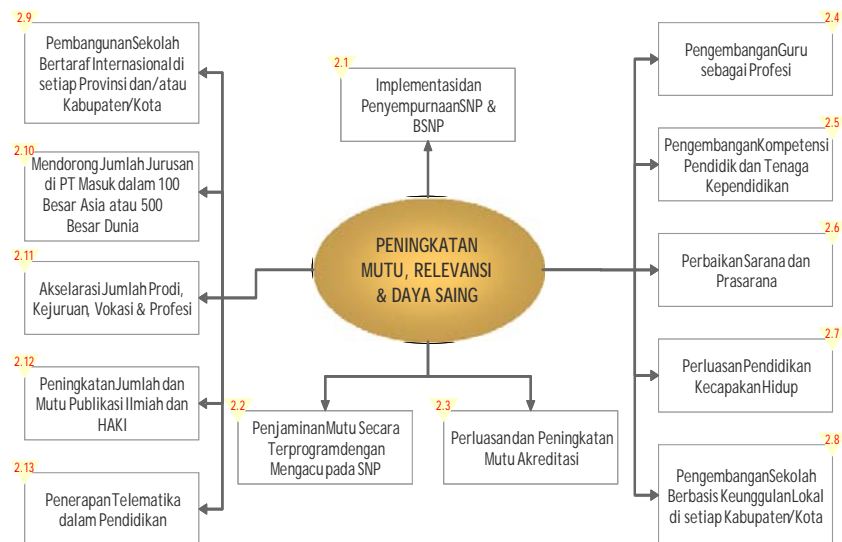
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0	43	43.0	43.0
	lain-lain	3	3.0	3.0
	tidak diterima sma/smk lain	6	6.0	6.0
	Dekat	14	14.0	14.0
	sesuai kompt	34	34.0	34.0
	Total	100	100.0	100.0

(Sumber ‘ Hasil olahan SPSS,2009)

2.Lampiran Gambar

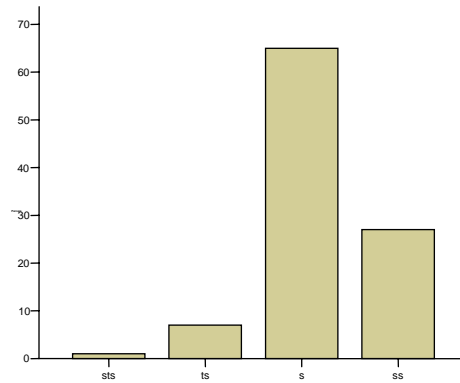


GAMBAR 1
GRAFIK ALAMAT RESPONDEN



Sumber : Renstra Pendidikan Nasional, 2006

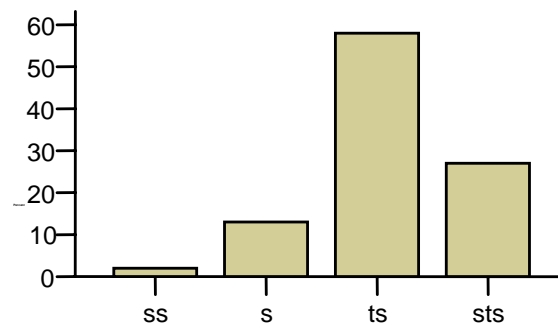
GAMBAR 2
PROGRAM KEGIATAN DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN
MUTU RELEVANSI DAN DAYA SAING



GAMBAR 3
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG
SMK N.4 BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL



GAMBAR 4
AKSES MENUJU SMK N.4 PERIKANAN



GAMBAR 5
RESPON PARA RESPONDEN UNTUK
MENUTUP SMK N.4



GAMBAR 6
SUASANA BELAJAR DI KELAS SMK N.4



GAMBAR 7
TAMPAK MUKA SMK N.4 PERIKANAN



GAMBAR 8
SALAH SATU FASILITAS PENUNJANG PEMBELAJARAN
DI SMK N.4 PANGKALPINANG



GAMBAR 9
RUANG PRAKTEK THP



GAMBAR 10
KEGIATAN SISWA PRAKTEK THP
DI SMK N.4 PKPINANG



GAMBAR 11
DOKUMENTASI PRAKTIKUM SISWA THP



(Sumber : hasil survey, 2009)

GAMBAR 12
SENTRA PEMASARAN HASIL PENGOLAHAN
IKAN PANGKALPINANG



(Sumber : hasil kunjungan, 2009)

GAMBAR 13
PENULIS MENGUNJUNGI SALAH SATU
KIOS MAKANAN OLAHAN IKAN DI PUSAT PEMASARAN
PENGOLAHAN IKAN



(Sumber : hasil kunjungan, 2009)

GAMBAR 14
PARA NELAYAN YANG SIAP MELAUT DI PPI
KETAPANG KEC. PANGKALBALAM



Sumber : hasil kuniungan, 2009

GAMBAR 15
SALAH SATU FASILITAS DI PPI/TPI
KETAPANG KEC. PANGKALBALAM

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tesis ini hasil dari penelitian yang penulis lakukan sejak Desember 2008 sampai dengan April 2009, Identitas Penulis ;
 Nama : H. Herial, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 1 April 1965, Sekarang ini penulis berdomisili di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 5 Pangkalpinang dan tamat pada tahun 1979, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Pangkalpinang dan tamat pada tahun 1982, kemudian ke SMA Negeri 1 Pangkalpinang, dan tamat tahun 1985. Pendidikan tinggi melalui jalur PMDK diterima di DIII Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya Palembang dan selesai pada tahun 1988. Pada tahun 1996 penulis meneruskan pendidikan S.1 di Universitas Terbuka dan dapat menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1998. Pada akhir tahun 2007 penulis mendapatkan kesempatan belajar S.2 di Universitas Diponegoro Semarang dengan status tugas belajar dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan merujuk pada program Beasiswa Unggulan Depdiknas 2007. Penulis awalnya seorang guru sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sejak tahun 1989 sampai dengan pertengahan tahun 2003 penulis mengajar di SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan SMA PGRI Pangkalpinang. Selain mengajar, penulis mendapat tugas tambahan sebagai pembina OSIS, pembina Laboratorium, Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan lain-lain yang sifatnya membantu tugas Kepala Sekolah. Pada bulan Juni 2003 penulis mendapat tugas baru di Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sebagai Kasi Pengembangan Kurikulum sampai dengan Maret 2006. Setelah itu penulis diamanatkan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada dinas yang sama. Pada saat penulis menempuh pendidikan S.2 ini, penulis kembali menjadi staf di Bidang Tata Usaha, karena sudah menjadi keharusan ketika penulis harus memilih untuk sekolah.

Penulis menikah pada tahun 1989 dengan seorang gadis Belitung, Hj. Etty Helastri. Sampai sekarang ini kami dikarunai anak 4 orang; Ikhwannul Karim (alm), Uswatun Hasanah (SMA Kelas 1), Habibatun Rachmah (SMP kelas 2) dan Muhtadin Sholihin (SD kelas 2) Sang istri sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir S.1 di Universitas Terbuka.

Sumber ‘ Hasil olahan SPSS,2009

